



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENDAHULUAN

4.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan yang mencukupi kebutuhan kas;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Daerah.

4.1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar;

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

4.1.3. Unsur Laporan Keuangan

4.1.3.1. Laporan Neraca

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014, yang terdiri atas:

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.389.722.001.590,02 terdiri dari aset lancar sebesar Rp349.768.689.774,87, investasi jangka panjang sebesar Rp17.802.609.419,70 aset tetap sebesar Rp2.951.874.345.718,10, dana cadangan Rp10.173.792.210,00 dan aset lainnya sebesar Rp 60.102.564.467,35.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.848.559.314,46 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp6.848.559.314,46, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.382.873.442.275,56 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp342.920.130.460,41, ekuitas dana investasi sebesar Rp3.029.779.519.605,15, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp10.173.792.210,00.

4.1.3.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.927.712.093.449,89 mencapai 102,63% dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.803.200.913.471,44 atau mencapai 91,12% dari anggarannya.

4.1.3.3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, kenaikan/penurunan bersih kas, dan saldo akhir kas daerah selama periode tertentu.

Saldo awal kas per 1 Januari 2014 sebesar Rp101.268.449.646,35 selama periode tahun 2014 terjadi kenaikan kas sebesar Rp111.432.751.396,45 sehingga saldo akhir kas daerah per 31 Desember 2014 Rp212.701.201.042,80.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.1.3.4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

4.1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Neraca Pemerintah Kabupaten Blitar Per 31 Desember 2014 dan 2013
2. Pemerintah Kabupaten Blitar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013
3. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Blitar Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 4.1. Pendahuluan
 - 4.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Program Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 4.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 4.4. Kebijakan Akuntansi
 - 4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 4.6. Penjelasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - 4.7. Kewajiban Kontijensi
 - 4.8. Penutup

4.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Program Pencapaian Target Kinerja APBD

4.2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (biasanya dihitung dalam jangka waktu satu tahun). Dalam penghitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu) dengan tahun dasar tahun 2000.

PDRB Kabupaten Blitar tahun 2011 untuk atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 1. Perkembangan PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Blitar Tahun 2008-2011

URAIAN	SAT	TAHUN			
		2008	2009	2010*	2011**
PDRB ADHB	Rp	9.935.944,23	11.011.362,01	12.308.947,48	13.785.005,89
PDRB ADHK	Rp	5.126.942,58	5.392.757,37	5.720.374,71	6.082.188,80
PDRB Perkapita ADHB	Rp	8.970.187,00	9.898.788,00	11.023.211,00	12.276.013,73
PDRB Perkapita ADHK	Rp	4.628.612,00	4.847.880,00	5.122.851,00	5.416.394,73

Sumber : BPS Kabupaten Blitar Tahun 2012

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Blitar selalu mengalami peningkatan baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB Perkapita. Hal ini menunjukkan total produksi barang dan jasa masyarakat Kabupaten Blitar meningkat terus pada empat tahun terakhir yaitu tahun 2008 s.d 2011.

Sedangkan distribusi sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Sektor Terhadap PDRB dan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Blitar Tahun 2008 - 2011

No	Sektor	Tahun			
		2008	2009	2010*	2011**
1	Pertanian	47,92	47,41	45,54	44,40
2	Pertambangan dan Penggalian	2,38	2,36	2,36	2,54
3	Industri Pengolahan	2,65	2,58	2,55	2,44
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,42	0,41	0,40	0,40
5	Konstruksi	2,15	2,19	2,38	2,45
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	26,86	27,75	28,93	29,67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,34	2,32	2,30	2,27
8	Bank dan Lembaga Keuangan Lain	4,27	4,36	4,43	4,53
9	Jasa – jasa	11,01	10,92	11,09	11,30

Sumber : BPS Kabupaten Blitar Tahun 2012

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian, disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa - jasa.

Dengan demikian maka Kabupaten Blitar masih sangat tergantung pada sektor pertanian dibanding sektor industri. Ketergantungan pada sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam Kabupaten Blitar. Namun demikian dari sektor pertanian ini persentasenya semakin menurun karena banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan, kantor, ataupun fasilitas umum lainnya.

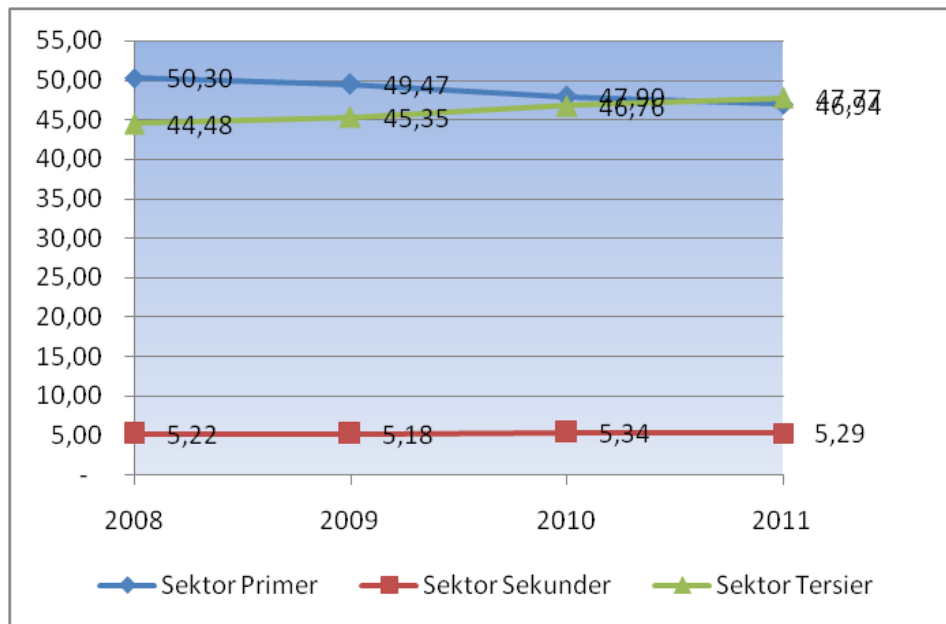
Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sendiri semakin meningkat seiring berkembangnya jaman serta era globalisasi yang berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat Kabupaten Blitar.

Jika dilihat dari pertumbuhan tiga sektor utama pembentuk PDRB yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier maka sektor tersier memiliki laju pertumbuhan yang paling besar disusul dengan sektor sekunder dan sektor primer. Hal ini berarti bahwa sektor tersier mulai menggeser peran sektor primer sebagai pendukung utama pembentukan PDRB. Hal ini bisa dilihat melalui gambar berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2008-2011

4.2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan.

4.2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Untuk tahun 2014, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada Perubahan Anggaran Tahun 2014 akan tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain :

1. meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan mengadakan koordinasi untuk meningkatkan Dana Perimbangan;
3. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Daerah melalui Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014.

Efektifitas perencanaan penganggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan, penentuan besarnya alokasi anggaran yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Memperhatikan perubahan kondisi ekonomi makro regional dan nasional maka dengan memaksimalkan potensi yang ada pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan dan dikoreksi baik dalam komponen Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penyesuaian terhadap pendapatan Daerah terutama dilaksanakan pada komponen Pajak Daerah : khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan khususnya Pajak Pasir dan Batu (Sirtu). Sedangkan pada Retribusi daerah dilaksanakan penyesuaian terutama pada Retribusi Layanan Kesehatan khususnya yang bersumber pada Jamkesmas dan pada Jaminan Kesehatan Nasional; serta Retribusi penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.

Di samping itu, pemerintah daerah tetap akan mendorong upaya peningkatan sumber pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku melalui peningkatan Koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan propinsi.

Secara garis besar, arah pengelolaan pendapatan daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum kebijakan Pendapatan Asli daerah akan dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang berarti pada perolehan pendapatan. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009. Kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Intensifikasi Pajak/Retribusi

Upaya intensifikasi pajak daerah dalam konteks Self Assessment pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengungkap wajib pajak yang tidak jujur dalam memenuhi kewajibannya, oleh sebab itu perlu dilakukan melalui:

- a) Pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak;
- b) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pembayaran pajak (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
- c) Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

teknologi informasi (online system);

- d) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum perpajakan;
- e) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah;
- f) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat;
- g) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- h) Akurasi data base pajak daerah;
- i) Optimalisasi pencairan tunggakan dan penagihan pajak daerah;
- j) Memfasilitasi peranan PPAT dalam melakukan percepatan balik nama atas kepemilikan perumahan, pertokoan dan perkantoran dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB.

Sedangkan intensifikasi retribusi daerah dilakukan melalui :

- a) Pembangunan dan pengembangan sistem pendataan Retribusi daerah;
- b) Peningkatan koordinasi antar unit pemungut;
- c) Sosialisasi dan penyuluhan ketentuan retribusi daerah;
- d) Penyusunan standar administrasi pencatatan dan penerimaan retribusi daerah;
- e) Penyusunan Juklak / Juknis Pelayanan dan Pembayaran Retribusi Daerah.

2) Ekstensifikasi Pajak/Retribusi

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan teknis dan pendekatan yuridis.

a) Pendekatan Teknis

Melalui pendekatan ini hasil yang diharapkan adalah terjadinya pertambahan jumlah wajib pajak, sehingga coverage ratio meningkat dan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah. Cara yang ditempuh melalui pendekatan ini adalah melakukan pendataan dan penyisiran (canvassing) terhadap seluruh wajib pajak serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Retribusi pelayanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan nilainya per tahun tidak signifikan perlu di pertimbangkan.

b) Pendekatan Yuridis

(1) Pajak Daerah

Hasil yang diharapkan dari pendekatan ini adalah bertambahnya jenis pajak baru atau bertambahnya basis pajak yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Cara yang ditempuh adalah dilakukan melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dengan cara mengalihkan sebagian basis pajak pusat menjadi basis pajak daerah atau diciptakan jenis pajak daerah baru.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(2) Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi dibidang retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah untuk menciptakan jenis retribusi daerah atau menghapuskan jenis retribusi daerah yang tidak efektif dan efisien serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

b. Kebijakan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Upaya meningkatkan produktivitas BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- 1) Perbaikan manajemen melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.
- 2) Melakukan evaluasi dan divestasi saham-saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah yang tidak prospektif dan merugi khususnya pada BUMD Savitri Indah,
- 3) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan pelayanan umum, sehingga kedepannya diharapkan akan dapat memberikan sumbangan terhadap perolehan penerimaan.

2. Kebijakan Dana Perimbangan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perolehan penerimaan Dana Perimbangan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Mengingat tingginya ketergantungan dari Dana Alokasi Umum, maka perlu kebijakan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ditempuh pula optimalisasi pajak-pajak daerah sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan penyisiran objek pajak orang pribadi dalam negeri guna meningkatkan penerimaan PPh secara nasional dimana pada akhirnya menambah bagi hasil DBH Pajak dari pemerintah pusat.
- b. Meningkatkan Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah Pusat untuk Perbaikan data dasar perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam sesuai kondisi Kabupaten Blitar.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi data dasar untuk mengitung Bagi hasil Pajak dan pemerintah propinsi serta memperoleh Bantuan Dana Pembangunan yang bersifat Kontinjensi/Penyeimbang ataupun hibah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Hal-hal yang dilaksanakan antara lain, memfasilitasi tim BPKP Jawa Timur dalam melaksanakan audit DAK Bidang infrastruktur sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Tahun 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.2.2.2. Kebijakan Belanja

Pada Tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan kebijakan belanjanya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai disesuaikan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2014 termasuk Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
2. Mencukupi kebutuhan belanja urusan wajib yang sifatnya Pelayanan Dasar dan infrastruktur Dasar Masyarakat sesuai kemampuan keuangan ; selanjutnya mengalokasikan kegiatan prioritas dan lanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah;
3. Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan kurang lebih 4 sampai 5 bulan;
4. Mencukupi anggaran pendamping dan penunjang untuk kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta prioritas daerah;
5. Menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program kegiatan yang belum dianggarkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
6. Menampung Pergeseran jenis belanja, objek belanja dan rincian belanja di lakukan oleh SKPD dengan tetap konsisten dan konsekuen kepada *anggaran berbasis kinerja* (mengutamakan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan skala waktu pelaksanaan)
7. Program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditampung dalam P-APBD merupakan :
 - a. Kegiatan mendesak yang belum dialokasikan pada APBD 2014;
 - b. Amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2014;
 - c. Memiliki daya ungkit terhadap perekonomian daerah baik secara langsung maupun tidak langsung,
 - d. Memperhatikan skala waktu dan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan.
 - e. Penyesuaian program dan kegiatan pada masing-masing SKPD terutama untuk meminimalisir kesalahan rekening penganggaran;
 - f. Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume dan kegiatan pelayanan, dimana fleksibilitas tersebut merupakan pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Secara garis besar Perubahan Belanja Daerah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung maupun dalam bentuk Belanja Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2014 diarahkan kepada :

1. Pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan irigasi di wilayah Kabupaten Blitar yang menjadi kewenangan dan tupoksi pemerintah daerah Kabupaten Blitar;
2. Pemanfaatan alokasi pajak rokok untuk mendukung capaian MDGs khususnya sanitasi dan layanan kesehatan dasar.
3. Persiapan dan sosialisasi aplikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Rehabilitasi fasilitas umum, jaringan jalan/jembatan, jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana;
5. Pemanfaatan SiLPA yang bersumber dari Spesifik Grand: Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCHT, Bantuan Keuangan Propinsi, serta tunjangan sertifikasi guru sesuai perundang-undangan.

4.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan kebijakan Pembiayaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan daerah pada Pos Pembiayaan Daerah di dalam APBD Kabupaten Blitar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013.
2. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan;
3. Mempergunakan selisih SiLPA Audited dengan SiLPA Non Audited untuk menutup defisit anggaran melalui pembiayaan netto.

4.2.2.4. Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai beberapa program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 dijelaskan dalam Daftar Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

4.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar diklasifikasikan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.1. Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.878.258.695.890,00 yang terdiri dari anggaran pendapatan untuk urusan wajib sebesar Rp1.874.102.951.123,00 dan anggaran pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp4.155.744.767,00.

Realisasi kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2014 sebesar Rp1.927.712.093.449,89 yang terdiri dari realisasi pendapatan untuk urusan wajib sebesar Rp1.924.132.022.049,89 realisasi pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp3.580.071.400,00.

Adapun rincian untuk kinerja pendapatan sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2014

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
4.1	Urusan Wajib	1.874.102.951.123,00	1.924.132.022.049,89	50.029.070.926,89	102,67
4.1.02	Kesehatan	90.830.855.880,00	95.923.057.016,00	5.092.201.136,00	105,61
4.1.03	Pekerjaan Umum	702.126.611,00	896.485.316,00	194.358.705,00	127,68
4.1.07	Perhubungan	8.750.329.623,00	9.224.232.797,00	473.903.174,00	105,42
4.1.08	Lingkungan Hidup	251.594.340,00	274.396.847,00	22.802.507,00	109,06
4.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	500.000.000,00	1.082.710.000,00	582.710.000,00	216,54
4.1.14	Ketenaga Kerjaan	18.480.000,00	18.675.000,00	195.000,00	101,06
4.1.17	Kepemudaan dan Olah Raga	1.135.666.250,00	1.486.713.000,00	351.046.750,00	130,91
4.1.20	Otonomi Daerah	1.771.913.898.419,00	1.814.820.752.073,89	43.311.853.654,89	102,44
4.2	Urusan Pilihan	4.155.744.767,00	3.580.071.400,00	(575.673.367,00)	86,15
4.2.01	Pertanian	394.713.000,00	396.288.300,00	1.575.300,00	100,40
4.2.02	Kehutanan	67.148.400,00	67.328.100,00	179.700,00	100,27
4.2.05	Kelautan dan Perikanan	91.953.000,00	92.400.000,00	447.000,00	100,49
4.2.06	Perindustrian	3.601.930.367,00	3.024.055.000,00	(577.875.367,00)	83,96
	Jumlah	1.878.258.695.890,00	1.927.712.093.449,89	49.453.397.559,89	102,63

4.3.1.2. Belanja Daerah

Kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.978.832.457.444,55 yang terdiri dari anggaran belanja untuk urusan wajib sebesar Rp1.899.715.342.850,55 dan anggaran belanja untuk urusan pilihan sebesar Rp79.117.114.594,00.

Realisasi kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2014 sebesar Rp1.803.200.913.471,44 yang terdiri dari realisasi belanja untuk urusan wajib sebesar Rp1.730.556.232.799,44 dan realisasi belanja untuk urusan pilihan sebesar Rp72.644.680.672,00. Adapun rincian untuk kinerja belanja sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2014

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.1	Urusan Wajib	1.899.715.342.850,55	1.730.556.232.799,44	(169.159.110.051,11)	91,10
5.1.01	Pendidikan	959.768.044.367,93	858.528.221.209,00	(101.239.823.158,93)	89,45
5.1.02	Kesehatan	201.156.605.830,00	162.138.054.805,00	(39.018.551.025,00)	80,60
5.1.03	Pekerjaan Umum	322.268.168.906,55	346.761.184.967,00	24.493.016.060,45	107,60
5.1.04	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Penataan Ruang	1.473.155.250,00	1.399.170.750,00	(73.984.500,00)	94,98
5.1.06	Perencanaan Pembangunan	10.073.983.550,00	9.486.762.380,00	(587.221.170,00)	94,17
5.1.07	Perhubungan	9.479.350.531,15	8.725.967.727,00	(753.382.804,15)	92,05
5.1.08	Lingkungan Hidup	8.436.761.744,00	7.592.365.904,00	(844.395.840,00)	89,99
5.1.09	Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	4.661.568.851,00	4.486.847.766,00	(174.721.085,00)	96,25
5.1.12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.407.608.098,00	9.423.244.240,00	(984.363.858,00)	90,54
5.1.13	Sosial	3.922.028.300,00	3.336.915.461,00	(585.112.839,00)	85,08
5.1.14	Ketenagakerjaan	4.584.046.000,00	4.379.281.245,00	(204.764.755,00)	95,53
5.1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.650.915.400,00	3.154.321.718,00	(496.593.682,00)	86,40
5.1.16	Penanaman Modal	93.715.000,00	68.253.373,00	(25.461.627,00)	72,83
5.1.17	Kebudayaan	2.536.388.500,00	2.509.543.300,00	(26.845.200,00)	98,94
5.1.18	Kepemudaan dan Olahraga	16.836.316.462,50	16.292.543.170,00	(543.773.292,50)	96,77
5.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	23.670.678.450,00	21.913.593.900,00	(1.757.084.550,00)	92,58
5.1.20	Otonomi Daerah	296.836.468.748,91	251.287.671.893,44	(45.548.796.855,47)	84,66
5.1.21	Ketahanan Pangan	3.127.590.000,00	3.035.674.264,00	(91.915.736,00)	97,06
5.1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.284.921.410,51	13.646.054.508,00	(638.866.902,51)	95,53
5.1.24	Kearsipan	127.602.000,00	127.526.950,00	(75.050,00)	99,94
5.1.25	Komunikasi dan Informatika	1.005.207.950,00	986.708.962,00	(18.498.988,00)	98,16
5.1.26	Perpustakaan	1.314.217.500,00	1.276.324.307,00	(37.893.193,00)	97,12
5.2	Urusan Pilihan	79.117.114.594,00	72.644.680.672,00	(6.472.433.922,00)	91,82
5.2.01	Pertanian	38.728.766.420,00	35.750.528.577,00	(2.978.237.843,00)	92,31
5.2.02	Kehutanan	8.422.158.500,00	6.805.027.988,00	(1.617.130.512,00)	80,80
5.2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	933.180.000,00	882.012.000,00	(51.168.000,00)	94,52
5.2.04	Pariwisata	8.114.206.850,00	7.676.213.800,00	(437.993.050,00)	94,60
5.2.05	Kelautan dan Perikanan	7.079.488.800,00	6.245.978.221,00	(833.510.579,00)	88,23
5.2.06	Perdagangan	4.427.871.250,00	4.199.964.580,00	(227.906.670,00)	94,85
5.2.07	Perindustrian	11.411.442.774,00	11.084.955.506,00	(326.487.268,00)	97,14
	Jumlah	1.978.832.457.444,55	1.803.200.913.471,44	(175.631.543.973,11)	91,10



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.3.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

1. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan masih kurang;
3. Tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya masih terbatas;
4. Tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan belum sama, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
5. Sesi pengeluaran terkendala dengan keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta terjadi perbedaan juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan entitas lain, sehingga anggaran tidak terserap.

4.4. Kebijakan Akuntansi

4.4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, yang disebut dengan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. **Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA;**
2. **Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.**

Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit, dan atau memanfaatkan surplus anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

a. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- 2) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan;
- 3) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Piutang

Piutang disajikan untuk masing-masing jenis piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai yang diukur pada masing-masing jenis piutang dikurangi dengan penyisihan piutang yang tak tertagih.

c. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang nonpermanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai investasi non permanen dikurangi dengan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Investasi permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan serta Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

g. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, serta pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

i. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi;
- 3) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

6. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

2. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi Aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 untuk pengakuan akuntansi atas belanja barang pakai habis, belanja pemeliharaan, dan belanja modal.

3. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.5.1. Rincian Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
4.5.1.1. Aset	3.389.722.001.590,02	2.874.156.423.723,10

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.389.722.001.590,02 rincian sebagai berikut.

Tabel 5. Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
a.	Aset Lancar	349.768.689.774,87	239.874.685.306,76
b.	Investasi Jangka Panjang	17.802.609.419,70	18.002.399.515,70
c.	Aset Tetap	2.951.874.345.718,10	2.555.981.072.048,00
d.	Dana Cadangan	10.173.792.210,00	2.000.000.000,00
e.	Aset Lainnya	60.102.564.467,35	58.298.266.852,64
Jumlah Aset		3.389.722.001.590,02	2.874.156.423.723,10

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
a. Aset Lancar	349.768.689.774,87	239.874.685.306,76

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp349.768.689.774,87 rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1)	Kas	225.174.352.413,46	108.610.595.151,32
2)	Piutang Pajak Daerah	30.205.956.452,50	1.678.056.966,00
3)	Piutang Retribusi	244.089.463,30	148.532.462,00
4)	Piutang lain-lain	54.752.017.392,22	68.047.362.372,77
5)	Persediaan	39.392.274.053,39	61.390.138.354,67
Jumlah		349.768.689.774,87	239.874.685.306,76

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
1) Kas	225.174.352.413,46	108.610.595.151,32

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp225.174.352.413,46 terdiri atas:

Tabel 7. Rincian Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
a)	Kas di Kasda	207.621.272.403,80	101.268.449.646,35
b)	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	5.079.928.639,00	0,00
c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.507.000,00	659.725.072,31



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
d)	Kas di Bendahara Penerimaan	11.040.026,00	14.407.352,00
e)	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	12.445.604.344,66	6.668.013.080,66
Jumlah		225.174.352.413,46	108.610.595.151,32

- a) Kas di Kasda sebesar Rp207.621.272.403,80, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian Saldo Kas di Kasda Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Dana Kas Murni (Bank Jatim)	17.621.272.403,80
(2)	Deposito (Bank Jatim)	50.000.000.000,00
(3)	Deposito (BRI)	60.000.000.000,00
(4)	Deposito (BTN)	10.000.000.000,00
(5)	Deposito (BNI)	10.000.000.000,00
(6)	Deposito (Bank Mandiri)	60.000.000.000,00
Jumlah		207.621.272.403,80

- b) Kas di Bendahara Dana JKN sebesar Rp5.079.928.639,00 merupakan sisa dana JKN pada 24 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dilaporkan sebagai bagian dari Kas BUD dengan perhitungan sebagai berikut.

- Pendapatan Kapitasi JKN	15.155.493.000,00	
- Belanja	(10.075.564.361,00)	+
<i>Sisa Dana JKN</i>	<i>5.079.928.639,00</i>	

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana JKN merupakan dana yang diperoleh karena pelaksanaan pelayanan kesehatan pada FKTP kepada peserta JKN sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Penerimaan dan penggunaan dana JKN dirinci sebagai berikut.

Tabel 9. Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN Pada FKTP Tahun 2014

No	Nama FKTP	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Sisa (Rp)
(1)	Bacem	366.510.000,00	204.005.806,00	162.504.194,00
(2)	Bakung	349.054.500,00	232.194.050,00	116.860.450,00
(3)	Binangun	424.809.000,00	305.513.819,00	119.295.181,00
(4)	Boro	354.608.500,00	238.915.025,00	115.693.475,00
(5)	Doko	334.965.000,00	240.538.477,00	94.426.523,00
(6)	Gandusari	717.247.000,00	454.535.994,00	262.711.006,00
(7)	Garum	936.612.000,00	607.177.140,00	329.434.860,00
(8)	Kademangan	906.383.500,00	588.296.777,00	318.086.723,00
(9)	Kanigoro	960.985.000,00	547.724.935,00	413.260.065,00
(10)	Kesamben	759.625.000,00	523.820.951,00	235.804.049,00
(11)	Margomulyo	435.735.000,00	302.236.609,00	133.498.391,00
(12)	Nglegok	691.870.000,00	474.719.605,00	217.150.395,00
(13)	Ponggok	832.062.000,00	559.936.258,00	272.125.742,00
(14)	Sanankulon	1.043.595.000,00	721.257.298,00	322.337.702,00
(15)	Selopuro	704.060.000,00	447.903.974,00	256.156.026,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama FKTP	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Sisa (Rp)
(16)	Slumbung	326.760.000,00	243.217.100,00	83.542.900,00
(17)	Srengat	1.196.388.000,00	829.075.961,00	367.312.039,00
(18)	Sutojayan	651.648.000,00	434.190.420,00	217.457.580,00
(19)	Talun	615.564.000,00	411.645.539,00	203.918.461,00
(20)	Udanawu	534.505.000,00	352.181.855,00	182.323.145,00
(21)	Wates	410.090.000,00	279.877.171,00	130.212.829,00
(22)	Wlingi	707.137.500,00	451.566.350,00	255.571.150,00
(23)	Wonodadi	574.132.500,00	402.036.196,00	172.096.304,00
(24)	Wonotirto	321.146.500,00	222.997.051,00	98.149.449,00
Jumlah		15.155.493.000,00	10.075.564.361,00	5.079.928.639,00

- c) Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp16.507.000,00, merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Setor Ke Kasda	Ket.
(1)	Dispenduk Capil	7.000,00	Januari 2015	Sisa UP
(2)	Kecamatan Kademangan	2.800.000,00	Januari 2015	Sisa UP
(3)	Kelurahan Talun	13.700.000,00	Januari 2015	Sisa UP
Jumlah		16.507.000,00		

- d) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp11.040.026,00, merupakan sisa kas di Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp11.039.200,00 dan kas di Rekening Giro BNI No Rek 0109791136 sebesar Rp826,00.
- e) Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp12.445.604.344,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Kas di Bendahara Penerimaan	12.445.604.344,66
(2)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Jumlah		12.445.604.344,66

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan nilai kas murni yang berasal dari pendapatan RSUD Wlingi yang ditampung di rekening giro a.n. Bendahara Penerima BLUD RSUD Wlingi pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0461006033 setelah dikurangi dengan realisasi belanja sebagai berikut.

(a)	Saldo awal	Rp	6.662.631.652,66
(b)	Penambahan	Rp	69.605.870.141,00
	- Pendapatan operasional	Rp	69.225.110.110,00
	- Jasa giro 2014	Rp	380.760.031,00
(c)	Pengeluaran	Rp	(63.822.897.449,00)
	- Januari s/d Desember	Rp	(63.822.897.449,00)
	Saldo akhir (a)+(b)+(c)	Rp	12.445.604.344,66



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian realisasi pendapatan operasional dan belanja RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kas Murni
BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2014

No.	Bulan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
(1)	Januari	2.117.266.618,00	1.691.826.815,00
(2)	Februari	6.845.848.065,00	2.631.920.762,00
(3)	Maret	5.128.284.873,00	4.362.340.208,00
(4)	April	5.548.759.585,00	2.999.331.103,00
(5)	Mei	5.635.657.419,00	5.053.178.263,00
(6)	Juni	5.741.817.587,00	4.517.661.059,00
(7)	Juli	5.325.227.379,00	5.417.952.696,00
(8)	Agustus	5.285.155.798,00	4.607.456.349,00
(9)	September	6.219.445.857,00	5.094.424.152,00
(10)	Oktober	12.186.603.438,00	7.449.610.548,00
(11)	November	5.825.476.712,00	7.420.412.499,00
(12)	Desember	3.365.566.779,00	12.576.782.995,00
Jumlah		69.225.110.110,00	63.822.897.449,00

Kas sebesar Rp12.445.604.344,66 di atas belum termasuk kas Jamkesmas RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi sebesar Rp315.512.937,00 yang ditampung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar dengan Nomor Rekening 0009.01.000807.30.7 a.n RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2014	Rp	3.006.151.289,00
Jumlah Dana yang diterima:	Rp	8.367.712.739,00
Jumlah Dana yang dicairkan:	Rp	(11.058.351.091,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2014	Rp	315.512.937,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Piutang Pajak	30.205.956.452,50	1.678.056.966,00

Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp30.205.956.452,50, dengan perhitungan sebagai berikut.

Piutang Pajak	Rp	36.311.474.853,00
Pengurang-Penyisihan piutang yang tidak tertagih	Rp	(6.105.518.400,50)

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 Rp 30.205.956.452,50

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak secara rinci pada **Lampiran 1**.

Piutang Pajak sebesar Rp30.205.956.452,50 tersebut berada pada Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Pajak per 31 Desember 2014	Harga Perolehan (Rp)	NRV (Rp)
a) Pajak Penerangan Jalan	2.116.557.642,00	2.116.557.642,00
b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)		
- Tahun 2014	1.398.602.174,00	1.398.602.174,00
- Tahun 2013	1.368.998.846,00	1.300.548.903,70
- Tahun 2012	2.483.947.800,00	2.235.553.020,00
- Tahun 2011	2.454.534.645,00	1.963.627.716,00
- Tahun 2010	2.055.254.012,00	1.644.203.209,60
- s.d. 2009	24.433.579.734,00	19.546.863.787,20
<i>Jumlah (b)</i>	<i>34.194.917.211,00</i>	<i>28.089.398.810,50</i>
Jumlah (a)+(b)	36.311.474.853,00	30.205.956.452,50

- Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp2.116.557.642,00 merupakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) bulan Desember 2014 yang diterima pada bulan Januari 2015.
- Piutang PBB per 31 Desember 2014 sebesar Rp34.194.917.211,00 terdiri atas:
 - Piutang PBB sebelum tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp32.796.315.037,00 merupakan pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Blitar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-150/WPJ.12/KP.12/2014 yaitu sebesar Rp33.325.448.536,00 dikurangi pelunasan tunggakan pada tahun 2014 sebesar Rp529.133.499,00;
 - Piutang atas ketetapan PBB tahun 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar yang belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp1.398.602.174,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Piutang Retribusi	244.089.463,30	148.532.462,00

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp244.089.463,30, dengan perhitungan sebagai berikut.

Piutang Retribusi	Rp 250.947.877,00
Pengurang-Penyisihan piutang yang tidak tertagih	Rp (6.858.413,70)
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2014	Rp 244.089.463,30

Untuk perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Retribusi secara rinci pada **Lampiran 2**.

Saldo piutang retribusi sebesar Rp244.089.463,30, dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 13. Rincian saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2014

No	SKPD	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Disperindag	Piutang Retribusi Sewa	73.161.775,00
b)	KPTSP	Piutang Retribusi IMB	57.715.548,65
c)	KPTSP	Piutang Retribusi Ijin Gangguan	24.263.055,35
d)	BPKAD	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	3.624.016,30
e)	Dinas Perhubungan	Retribusi Menara Telekomunikasi	85.325.068,00
Jumlah			244.089.463,30

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4) Piutang Lain-Lain	54.752.017.392,22	68.047.362.372,77

Saldo Piutang Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp54.752.017.392,22, dengan perhitungan sebagai berikut.

Piutang Lain-lain Rp 56.568.906.187,62

Pengurang - Penyisihan Piutang yang Tidak Tertagih Rp (1.816.888.795,40)

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2014 Rp 54.752.017.392,22

Perhitungan Penyisihan Piutang yang Tidak Tertagih - Piutang Lain-Lain secara rinci pada **Lampiran 3**. Piutang Lain-Lain sebesar Rp54.752.017.392,22, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Rincian Saldo Piutang Lain-lain Pemerintah Kabupaten Blitar
per 31 Desember 2014

No	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	11.200.000,00
b)	Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	34.816.885.125,00
c)	Piutang Penjualan Barang Milik Daerah	834.600.000,00
d)	Piutang Dana Bagi Hasil Propinsi	12.836.451.490,00
e)	Piutang Bunga Deposito	103.013.698,62
f)	Piutang Lain Biaya Dibayar dimuka	253.000.000,00
g)	Piutang Pinjaman	777.466.626,60
h)	Piutang-Lain-Lain- RITP	123.000.000,00
i)	Piutang-Lain-Lain- Pendapatan BLUD	4.996.400.452,00
Jumlah		54.752.017.392,22

a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.200.000,00 merupakan hasil lelang kendaraan bermotor oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada tahun 2008 yang belum lunas dengan rincian:

Saldo piutang (harga perolehan) 14.000.000,00

Penyisihan piutang tidak tertagih (20%) (2.800.000,00)

Saldo akhir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan 11.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian piutang sesuai harga perolehan sebesar Rp14.000.000,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 15. Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2014

No	Pembeli	JenisKendaraan	Harga Pembelian (Rp)	Angsuran s/d 31 Des 2014 (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
(1)	T	Toyota Kijang KF 80	34.500.000,00	34.500.00,00	-
(2)	MSR	Mitsubishi Galant	18.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00
Jumlah					14.000.000,00

- b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah sebesar Rp34.816.885.125,00 adalah Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang telah mempunyai penetapan pengadilan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang Mempunyai Penetapan Pengadilan

No	Nama	Tahun	Saldo Per 31 Des 2014	Keterangan
(a)	IM	2004	27.560.635.125,00	IM, mantan Bupati Blitar. Telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar No. B.724/0.5.22/EP.1/05/2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
(b)	KR	2004	6.600.000.000,00	Kr, mantan Kabag Keu. Kab. Blitar. Telah putusan pengadilan melalui surat Kajari Bitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008. Namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
(c)	SD	2004	506.250.000,00	SD. Telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
(d)	SR	2004	150.000.000,00	Sr. Telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR.
Jumlah			34.816.885.125,00	

Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar kepada Bupati Blitar Nomor B-3127/0.5.22/Fu/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 perihal Klarifikasi Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah antara lain menyebutkan bahwa:

- (1) Piutang Ganti Rugi atas nama Alm. IM (temuan Belanja TA 2003-2004) sebesar Rp27.560.635.125,00 telah dibayar sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara;
- (2) Piutang Ganti Rugi atas nama KR (temuan Belanja TA 2003-2004) sebesar Rp6.600.000.000,00 telah dibayar sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara;
- (3) Piutang Ganti Rugi atas nama SD dengan rincian uang pengganti sebesar Rp306.250.000,00 dan denda Rp200.000.000. Denda dan uang



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penganti tidak sanggup dibayar dan memilih menjalani subsidair pidana kurungan serta menjalani pidana penjara.

(4) Piutang Ganti Rugi atas nama SR (TP 2004) sebesar Rp150.000.000,00 telah dibayar sebesar Rp50.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara.

- c) Piutang penjualan barang milik daerah sebesar Rp834.600.000,00 merupakan kompensasi atas tanah aset daerah di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok yang digunakan untuk pembangunan Perumahan Puri Ponggok Indah oleh PT BPPM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Rincian Piutang Penjualan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Kompensasi Tanah	834.600.000,00
(2)	Sisa Profit Sharing	0,00
(3)	Denda s/d November 2012	0,00
Jumlah		834.600.000,00

Kompensasi tanah sebesar Rp834.600.000,00 sudah disetor ke Kas Daerah namun tidak dicatat sebagai pendapatan. Setoran tersebut dicatat sebagai Uang Titipan-Penerimaan PFK dan tahun 2013 telah dibayarkan kepada pihak ke III. Sedangkan *profit sharing* dan denda telah dibayar lunas dan diakui sebagai pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Bupati Blitar Nomor 028/110/409.116/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Penjelasan Setoran atas Kompensasi Tanah.

- d) Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi sebesar Rp12.836.451.490,00 merupakan dana bagi hasil per 31 Desember 2014 belum diterima di rekening Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2015 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Dari Provinsi per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Pajak Kendaraan Bermotor	3.757.320.008,00
(2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.309.945.042,00
(3)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.758.796.386,00
(4)	Pajak Air Permukaan	0,00
(5)	Sumbangan Pihak Ketiga (SP III)	10.390.054,00
Jumlah		12.836.451.490,00

- e) Piutang bunga deposito sebesar Rp103.013.698,62, merupakan kurang bayar bunga harian penutupan rekening deposito tanggal 27 Juli 2014 dan 28 Juli 2014 pada Bank BTN dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening 388-01-40-000102-6	50.410.958,90
Nomor Rekening 388-01-40-000100-0	52.602.739,72
Jumlah	103.013.698,62

- f) Piutang Lain Biaya Dibayar di Muka sebesar Rp253.000,00 merupakan piutang atas penyediaan jasa oleh pihak ketiga atas penyewaan rumah yang telah dibayar lunas oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang sampai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2014 masih terdapat jasa yang belum digunakan/dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Rincian Piutang Lain Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Sewa rumah dinas Wabub untuk 2011-2016	78.000.000,00
(2)	Sewa rumah untuk mess/perwakilan di Jakarta untuk 2013 -2016	175.000.000,00
Jumlah		253.000.000,00

- g) Piutang Pinjaman sebesar Rp777.466.626,60 terdiri atas pokok pinjaman sebesar Rp721.388.766,30 dan bunga pinjaman sebesar Rp56.077.860,30 merupakan Piutang Pinjaman pada Dinas Peternakan, BP4K, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Rincian Saldo Piutang Pinjaman per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)		
		Pokok	Bunga	Jumlah
a)	Dinas Peternakan	130.370.700,00	13.692.000,00	144.062.700,00
b)	BP4K	32.287.500,00	2.925.000,00	35.212.500,00
c)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	558.730.566,30	39.460.860,30	598.191.426,60
Jumlah Piutang Pinjaman		721.388.766,30	56.077.860,30	777.466.626,60

Saldo Piutang Pokok Pinjaman sebesar Rp721.388.766,30 merupakan saldo Piutang Pinjaman yang dikelola oleh BPR Hambangun Artha Selaras (HAS). Adapun mutasi Piutang Pinjaman adalah sebagai berikut.

Saldo awal piutang pokok pinjaman:

1. Dinas Peternakan 439.569.000,00
2. BP4K 111.625.000,00
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.091.684.023,00

Jumlah I

2.642.878.023,00

Pengurangan (Pengembalian Pokok Pinjaman):

1. Dinas Peternakan (5.000.000,00)
2. BP4K (4.000.000,00)
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (229.248.802,00)

Jumlah II

(238.248.802,00)

Saldo akhir piutang pokok pinjaman (Jum I + II)

2.404.629.221,00

Penyisihan piutang tidak tertagih (70%)

(1.683.240.454,70)

Saldo akhir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan

721.388.766,30

Sedangkan saldo Piutang Bunga Pinjaman sebesar Rp56.077.860,30 merupakan saldo Piutang Pinjaman yang dikelola oleh BPR HAS dengan mutasi Piutang Pinjaman adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo awal Piutang Bunga Pinjaman (harga perolehan):

1. Dinas Peternakan	45.640.000,00	
2. BP4K	9.750.000,00	
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142.542.599,00	
Jumlah I		197.932.599,00

Pengurangan (pembayaran Piutang Bunga Pinjaman):

1. Dinas Peternakan	0,00	
2. BP4K	0,00	
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(11.006.398,00)	
Jumlah II		(11.006.398,00)

Saldo akhir Piutang Bunga Pinjaman (Jum I + II) 186.926.201,00

Penyisihan piutang tidak tertagih (70%) (130.848.340,70)

Saldo akhir Piutang Bunga Pinjaman berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan 56.077.860,30

Kondisi Piutang Pinjaman yang dikelola oleh BPR HAS sebesar Rp777.466.626,60 adalah sebagai berikut.

Tabel 21. Kondisi Piutang Pinjaman yang Dikelola oleh BPR HAS
per 31 Desember 2014

No	Kondisi Investasi	Nilai (Rp)	NRV (Rp)
a)	Lancar	-	-
b)	Kurang Lancar	-	-
c)	Diragukan	-	-
d)	Macet	2.591.555.422,00	777.466.626,60
Jumlah Penyertaan Modal		2.591.555.422,00	777.466.626,60

- h) Piutang Lain-Lain Rawat Inap Tahap Pertama (RITP) sebesar Rp123.000.000,00 merupakan pendapatan RITP tahun 2014 yang diterima pada bulan Januari dan Pebruari 2015 pada Dinas Kesehatan.
- i) Piutang Lain-Lain - Pendapatan BLUD pada RSUD “Ngudi Waluyo” sebesar Rp4.996.400.452,00 rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Rincian Piutang Retribusi Lainnya pada RSUD “Ngudi Waluyo”
per 31 Desember 2014

No	Jenis	Nilai (Rp)
a)	Pihak Ketiga Lain (PT KAI)	8.172.300,00
b)	BPJS-Kesehatan	4.986.842.152,00
c)	Asuransi In-Health	1.386.000,00
Jumlah		4.996.400.452,00

Piutang BPJS-Kesehatan sebesar Rp4.986.842.152,00 merupakan Piutang Pendapatan BLUD di RSUD “Ngudi Waluyo” atas klaim BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah disetujui untuk dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Piutang Retribusi sebesar Rp4.996.400.452,00 tersebut belum termasuk saldo Piutang Jamkesda dan Surat Pernyataan Miskin (SPM) RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

“Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp208.950.358,00, dengan rincian sebagai berikut.

Jamkesda	Rp	46.310.858,00
Surat Pernyataan Miskin (SPM)	Rp	162.639.500,00
Jumlah	Rp	208.950.358,00

Piutang lain-lain sebesar Rp54.752.017.392,22 tersebut belum termasuk piutang ganti rugi kekayaan daerah sebesar Rp6.246.378.132,21 yang terdiri dari kasus yang telah disidang oleh Majelis TP-TGR sebesar Rp201.372.000,00, kasus TP-TGR yang masih berupa informasi dari BPK sebesar Rp6.044.133.153,21, dan berupa informasi dari APIP sebesar Rp872.979,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Rincian Piutang Ganti Rugi Kekayaan Daerah yang Masih Berupa Berita Acara Sidang Majelis TP-TGR, Informasi BPK, dan APIP

No	Nama	Tahun	Saldo Per 31 Des 2014	Keterangan
I. Berupa Berita Acara Sidang Majelis TP-TGR				
1	Mantan Kepala Dinas Hutbun	2004	77.500.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
2	HS	2006	24.000.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
3	Alm. Sm	2006	11.200.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
4	MA. SH	2007	88.672.000,00	Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007
Jumlah I			201.372.000,00	
II. Informasi dari BPK				
1	a.n Bupati	2005	23.804.899,00	Bupati
2	DPRD (1999-2004) dan (2004-2009)	2005	5.191.810.576,00	Rincian pada Lampiran 4
3	CVAT Dispendukcapil	2008	771.300.000,00	Denda kekurangan pekerjaan SIAK
4	Dinas Kesehatan	2009	0,75	Kelebihan pembayaran pekerjaan pustu dan puskesmas
5	CVAm, PT AW, PT KDI, S,Y,H pada DPPKAD	2009	0,00	Kekurangan pungutan dan penyetoran pajak galian gol. C
6	DPPKAD	2009	24.547.500,00	Kekurangan penyetoran denda keterlambatan penyetoran retribusi
7	CVBJSDinas Pertanian	2009	(0,71)	Kurang volume pekerjaan
8	CV BJSDinas Pertanian	2009	32.670.178,17	Kurang volume pekerjaan
9	CV SA	2011	0,00	Kurang Volume Pekerjaan
Jumlah II			6.044.133.153,21	



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama	Tahun	Saldo Per 31 Des 2014	Keterangan
III. Informasi dari APIP				
1	Kelurahan Tawangsari	2008	705.670,00	Lain-lain
2	Kecamatan Selorejo	2010	167.309,00	ADD
Jumlah III			872.979,00	
Jumlah I,II dan III			6.246.378.132,21	

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
5) Persediaan	39.392.274.053,39	61.390.138.354,67

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp39.392.274.053,39, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Persediaan Alat Tulis Kantor	299.379.065,46
b)	Persediaan Alat-alat Listrik	40.548.117,00
c)	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	8.800.000,00
d)	Persediaan Bibit Ternak	7.400.000,00
e)	Persediaan Obat-obatan	9.071.631.615,45
f)	Persediaan Bahan Kimia	323.560.659,00
h)	Persediaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis	809.871.594,74
i)	Persediaan Bahan Material Lainnya	234.603.726,00
j)	Persediaan Lenen	4.383.397,00
k)	Persediaan Bahan Pakaian Dinas	6.494.934.083,24
l)	Persediaan Darah	6.000.000,00
m)	Persediaan Selimut	17.000.000,00
o)	Persediaan Alat Kontrasepsi	359.474.527,00
p)	Persediaan Induk Ternak	88.070.000,00
q)	Persediaan Vaksin	576.168.809,00
r)	Persediaan Perangko	70.000,00
s)	Persediaan Materai	4.299.500,00
t)	Persediaan Amplop	126.000,00
u)	Persediaan Bahan Bakar Gas	2.318.000,00
v)	Persediaan Bahan Makanan Logistik	41.580.000,00
w)	Persediaan Bahan Makanan Pasien (RSUD)	1.476.183,00
x)	Persediaan Karcis	370.261.368,00
y)	Persediaan Buku Cetak	107.307.680,00
z)	Persediaan Stiker	22.566.260,00
aa)	Persediaan Blangko	453.478.830,00
ab)	Persediaan Map	36.353.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai (Rp)
ac)	Persediaan Kertas Kop	1.320.000,00
ad)	Persediaan Amplop	12.959.377,50
ae)	Persediaan Plakat / Vandel	22.675.000,00
af)	Persediaan Alat Kebersihan	22.717.511,00
ag)	Persediaan Barang Bantuan Modal Gedung dan Bangunan	3.720.456.000,00
ah)	Persediaan Barang Bantuan Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi	16.230.483.500,00
	Jumlah	39.392.274.053,39

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2014 untuk setiap SKPD pada **lampiran 5**.

Persediaan Barang Bantuan Modal Gedung dan Bangunan Rp3.720.456.000,00 dan Persediaan Barang Bantuan Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp16.230.483.500,00 merupakan bantuan modal yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diserahkan kepada masyarakat yaitu pada Dinas PU Cipta Karya, BPBD, dan Dinas Pertanian yang dirinci sebagai berikut.

Rincian Persediaan Barang Bantuan Modal Gedung dan Bangunan dan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
Persediaan Barang Bantuan Modal Gedung dan Bangunan		
1.	Dinas PU Cipta Karya	
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana	111.635.000,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Rehabilitasi dinding pengaman, talud, saluran dan pintu air	3.608.821.000,00
	Jumlah	3.720.456.000,00
Persediaan Barang Bantuan Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi		
1.	Dinas PU Cipta Karya	
a.	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Wilayah Barat)	1.097.430.000,00
b.	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Wilayah Timur)	743.240.000,00
c.	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Bantuan Keuangan Propinsi)	231.445.000,00
d.	Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK dan Pendamping DAK)	587.050.000,00
e.	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Keuangan Propinsi)	1.575.370.000,00
f.	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	1.182.699.000,00
g.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan	100.790.000,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
a.	Jalan	952.014.500,00
b.	Jaringan	1.804.210.000,00
3.	Dinas Pertanian	
	Kegiatan pengembanan pertanian dan ketahanan pangan	7.956.235.000,00
	Jumlah	16.230.483.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
c. Investasi Jangka Panjang	17.802.609.419,70	18.002.399.515,70

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.002.399.515,70 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.802.609.419,70 rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2014 dan 2013

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1)	Investasi Non Permanen	700.000,00	7.589.000,00
2)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.801.909.419,70	17.994.810.515,70
Jumlah Investasi Jangka Panjang		17.802.609.419,70	18.002.399.515,70

- 1) Investasi Non Permanen sebesar Rp700.000,00 merupakan piutang yang dikelola oleh Bank Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun mutasi Investasi Non Permanen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo (harga perolehan) 1.400.000,00

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih (50%) (700.000,00)

Saldo akhir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan 700.000,00

Kondisi Investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Bank Pasar) sebesar Rp700.000,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Kondisi Investasi Dana Bergulir Yang Dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Bank Pasar) per 31 Desember 2014

No	Kondisi Investasi	Nilai (Rp)	NRV (Rp)
(1)	Lancar	-	-
(2)	Kurang Lancar	-	-
(3)	Diragukan	-	-
(4)	Macet	1.400.000,00	700.000,00
Jumlah Penyertaan Modal		1.400.000,00	700.000,00

Penyajian Investasi Non Permanen dalam laporan keuangan tahun 2014 telah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi.

- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp17.801.909.419,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Rincian Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	Per 31 Desember 2014	Mutasi		Per 31 Desember 2013
			Tambah	Kurang	
a)	PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Bank Jatim	9.874.098.750,00	0,00	0,00	9.874.098.750,00
c)	PT BPR Jatim	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
d)	PD Savitri Indah	650.756.719,70	0,00	(42.555.596,00)	693.312.315,70
e)	BPR HAS	7.227.053.950,00	0,00	(150.345.500,00)	7.377.399.450,00
Jumlah Penyertaan Modal		17.801.909.419,70	0,00	(192.901.096,00)	17.994.810.515,70



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyertaan modal pada PDAM, PD Savitri Indah, dan BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) dihitung dengan metode ekuitas. Perhitungan penyertaan modal dengan metode ekuitas secara rinci pada **Lampiran 6,7, dan 8**.

Perhitungan saldo penyertaan modal dengan ekuitas dilakukan berdasarkan laporan keuangan BUMD PDAM dan BPR HAS yang telah diaudit oleh KAP, kecuali atas nilai penyertaan modal pada PD Savitri Indah belum dilakukan audit oleh KAP sejak tahun buku 2012 s.d. 2014.

Jumlah Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp22.414.283.300,60 telah memiliki dasar hukum berupa Perda Pendirian dan Penyertaan Modal Awal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014

No	Uraian	Penyertaan Modal			Dasar Hukum
		Modal Disetor (Rp)	Nilai yang Sudah Diperdakan (Rp)	(%)	
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	8.442.283.300,60	8.442.283.300,60	100	Perda Nomor 3 Tahun 2013
2	PT Bank Jatim	6.656.000.000,00	6.656.000.000,00	100	Perda Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 15 September 2011 dan Perda Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012
3	PT BPR Jatim	50.000.000,00	50.000.000,00	100	Perda Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012
4	PD Savitri Indah	215.000.000,00	215.000.000,00	100	Perda Nomor 8 Tahun 1976 tanggal 14 Juni 1976, Perda Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012
5	PT BPR Hambangun Artha Selaras	7.051.000.000,00	7.051.000.000,00	100	Perda Nomor 3 Tahun 2012
Jumlah Penyertaan		22.414.283.300,60	22.414.283.300,60		

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp22.414.283.300,60 tersebut belum termasuk penyertaan modal pada PT. Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS) sebesar Rp375.000.000,00 dengan bukti kepemilikan Nomor 06/CSS/2010 tanggal 26 April 2010 dengan total nilai nominal saham Rp175.000.000,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
d. Aset Tetap	2.951.874.345.718,10	2.555.981.072.048,00

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.555.981.072.048,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.951.874.345.718,10 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 29. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014

No	Uraian	Saldo Tahun 2014 (Rp)	Mutasi TA 2014 (Rp)		Saldo Tahun 2013 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	586.656.201.004,76	28.772.408.513,00	(29.309.850.110,00)	587.193.642.601,76
2	Peralatan dan Mesin	350.620.073.844,30	89.252.160.683,47	(40.078.083.540,87)	301.445.996.701,70
3	Gedung dan Bangunan	741.201.304.154,92	125.591.249.315,00	(74.131.158.047,00)	689.741.212.886,92
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.170.889.657.457,12	485.568.846.842,96	(249.415.934.356,46)	934.736.744.970,62
5	Aset Tetap Lainnya	32.039.809.800,00	18.424.680.109,00	(14.780.821.146,00)	28.395.950.837,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.467.299.457,00	56.386.052.407,00	(386.277.000,00)	14.467.524.050,00
Jumlah Aset Tetap		2.951.874.345.718,10	803.995.397.870,43	(408.102.124.200,33)	2.555.981.072.048,00

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2013 (Rp)</u>
1) Tanah	586.656.201.004,76	587.193.642.601,76

Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp586.656.201.004,76 dengan dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp 587.193.642.601,76
Penambahan Aset	
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00
b) Belanja Barang dan Jasa	0,00
c) Belanja Modal	Rp 234.473.500,00
d) Koreksi	Rp 3,00
e) Reklasifikasi	Rp 25.115.235.010,00
f) Mutasi antar SKPD	Rp 3.422.700.000,00
g) Hibah	Rp 0,00
Jumlah Penambahan Aset	Rp 28.772.408.513,00
Pengurangan Aset	
a) Penghapusan	Rp (467.593.600,00)
b) Hibah	Rp (0,00)
c) Koreksi	Rp (19.848.000,00)
d) Reklasifikasi	Rp (25.399.708.510,00)
e) Mutasi antar SKPD	Rp (3.422.700.000,00)
f) Ekstrakomtable	Rp 0,00
Jumlah Pengurangan Aset	Rp (29.309.850.110,00)
Saldo Akhir	RP 586.656.201.004,76

Mutasi aset tetap tanah dijelaskan sebagai berikut.

- Reklasifikasi tambah sebesar Rp25.115.235.010,00 merupakan reklasifikasi antara rekening Aset Tetap - Tanah karena *mapping* rekening Aset Tetap TA 2014;
- Koreksi tambah sebesar Rp3,00 karena kurang catat Aset Tetap - Tanah pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.422.700.000,00 merupakan mutasi Aset Tetap - Tanah dari BPKAD ke KPTSP;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Penghapusan sebesar Rp467.593.600,00 merupakan penghapusan Aset Tetap - Tanah Bangunan Perumahan sebesar Rp36.000.000,00 dan Tanah Lempiran/Bantaran sebesar Rp431.593.600,00 pada Dinas PU Bina Marga berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/294/409.012/KPTS/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
- e. Reklasifikasi kurang sebesar Rp25.399.708.510,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi antara rekening Aset Tetap - Tanah karena *mapping* rekening Aset Tetap TA 2014 sebesar Rp25.115.235.010,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Tanah ke Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp234.473.500,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Tanah ke Aset Lainnya – Aset Lain-Lain sebesar Rp50.000.000,00 merupakan tanah milik desa yang tercatat pada BMD Dinas Peternakan dan menunggu penghapusan;

Mutasi Aset Tetap - Tanah (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 9: Ringkasan mutasi Aset Tetap - Tanah** dan **Lampiran 10: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD Aset Tetap - Tanah tahun 2014** serta **Lampiran 11: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Tanah per Rincian Obyek Rekening tahun 2014**.

Rincian Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp586.656.201.004,76 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

	Tanah per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
1	Dinas Pendidikan	93.157.628.561,00	93.157.628.561,00	-
2	Dinas Kesehatan	12.511.621.650,00	12.511.621.650,00	-
3	RSUD	25.960.000.000,00	25.960.000.000,00	-
4	Dinas PU Bina Marga	30.350.115.603,00	30.817.709.200,00	(1,52)
5	Dinas PU Cipta Karya	20.385.768.100,00	20.385.768.100,00	-
6	Dinas Perhubungan	3.466.437.000,00	3.466.437.000,00	-
7	Dinas Sosial	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	-
8	Dinas Nakertrans	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
9	Dinas Koperasi dan UMKM	2.097.650.000,00	2.097.650.000,00	-
10	Disporbudpar	37.117.050.000,00	37.117.050.000,00	-
11	Badan Kesbangpol	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-
12	Sekretariat Daerah	691.874.500,00	691.874.500,00	-
	- Bagian Pemerintahan	125.274.500,00	125.274.500,00	-
	- Bagian Umum	566.600.000,00	566.600.000,00	-
13	Sekretariat DPRD	13.345.600.000,00	13.345.600.000,00	-
14	BPKAD	82.611.903.259,00	86.054.451.259,00	(4,00)
15	BKD	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Tanah per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
16	KPTSP	3.422.700.000,00	-	-
17	Dinas Pendapatan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
25	Kantor Ketahanan Pangan	324.000.000,00	324.000.000,00	-
26	Bapemas	9.563.400.000,00	9.563.400.000,00	-
28	Dinas Pertanian	13.431.650.000,00	13.431.650.000,00	-
29	Dinas Peternakan	1.449.600.000,00	1.499.600.000,00	-
30	BP4K	15.184.900.000,00	15.184.900.000,00	-
31	Dinas Hutbun	34.453.680.000,00	34.453.680.000,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	4.658.592.400,00	4.658.592.400,00	-
33	Disperindag	19.134.194.000,00	19.134.194.000,00	-
34	Kecamatan Selopuro	406.850.000,00	406.850.000,00	-
35	Kecamatan Wlingi	11.987.000.000,00	11.987.000.000,00	-
36	Kecamatan Talun	271.080.000,00	271.080.000,00	-
37	Kecamatan Gandusari	91.000.000,00	91.000.000,00	-
38	Kecamatan Doko	198.500.000,00	198.500.000,00	-
39	Kecamatan Garum	651.150.000,00	651.150.000,00	-
40	Kecamatan Kanigoro	270.000.000,00	270.000.000,00	-
41	Kecamatan Sutojayan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
42	Kecamatan Binangun	150.000.000,00	150.000.000,00	-
43	Kecamatan Wates	2.659.072.850,00	2.659.072.850,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	157.500.000,00	157.500.000,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	96.095.000,00	96.095.000,00	-
46	Kecamatan Bakung	345.197.500,00	345.197.500,00	-
47	Kecamatan Kademangan	176.525.000,00	176.525.000,00	-
48	Kecamatan Sanankulon	277.500.000,00	277.500.000,00	-
49	Kecamatan Srengat	1.164.280.000,06	1.164.280.000,06	-
50	Kecamatan Wonodadi	341.400.000,00	341.400.000,00	-
51	Kecamatan Udanawu	164.160.000,00	164.160.000,00	-
52	Kecamatan Ponggok	357.000.000,00	357.000.000,00	-
53	Kecamatan Selorejo	411.250.000,00	411.250.000,00	-
55	Kecamatan Kesamben	398.780.000,00	398.780.000,00	-
57	Kelurahan Garum	5.549.720.000,00	5.549.720.000,00	-
58	Kelurahan Tawangsasri	2.162.000.000,00	2.162.000.000,00	-
59	Kelurahan Sumberdiren	3.892.025.000,00	3.892.025.000,00	-
60	Kelurahah Bence	4.657.000.000,00	4.657.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Tanah per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
61	Kelurahan Kanigoro	4.245.360.000,00	4.245.360.000,00	-
62	Kelurahan Satriyan	6.318.140.000,00	6.318.140.000,00	-
63	Kelurahan Kembangarum	4.184.219.305,00	4.184.219.305,00	-
64	Kelurahan Jingglong	1.860.131.460,00	1.860.131.460,00	-
65	Kelurahan Kalipang	3.147.197.388,75	3.147.197.388,75	-
66	Kelurahan Jegu	1.482.444.847,50	1.482.444.847,50	-
67	Kelurahan Sukorejo	890.075.550,00	890.075.550,00	-
68	Kelurahan Sutojayan	1.015.246.292,25	1.015.246.292,25	-
69	Kelurahan Kedungbunder	743.261.970,70	743.261.970,70	-
70	Kelurahan Wlingi	2.187.039.187,50	2.187.039.187,50	-
71	Kelurahan Beru	5.034.715.600,00	5.034.715.600,00	-
72	Kelurahan Tangkil	6.867.067.680,00	6.867.067.680,00	-
73	Kelurahan Klemunan	3.918.776.400,00	3.918.776.400,00	-
74	Kelurahan Babadan	3.955.943.000,00	3.955.943.000,00	-
75	Kelurahan Talun	76.500.000,00	76.500.000,00	-
76	Kelurahan Bajang	23.930.218.125,00	23.930.218.125,00	-
77	Kelurahan Kaweron	4.791.458.375,00	4.791.458.375,00	-
78	Kelurahan Kamulan	4.120.636.300,00	4.120.636.300,00	-
79	Kelurahan Kauman	5.570.079.237,50	5.570.079.237,50	-
80	Kelurahan Dandong	1.338.773.437,50	1.338.773.437,50	-
81	Kelurahan Srengat	9.455.446.100,00	9.455.446.100,00	-
82	Kelurahan Togokan	3.904.754.500,00	3.904.754.500,00	-
83	Kelurahan Kademangan	8.923.054.775,00	8.923.054.775,00	-
84	Kelurahan Nglegok	9.285.811.050,00	9.285.811.050,00	-
TOTAL		586.656.201.004,76	587.193.642.601,76	(0,09)

Untuk legalitas tanah Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

- Tanah bersertifikat sebanyak 724 bidang dengan luas 4.287.074 m²;
- Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 1.035 bidang dengan luas 6.019.184,31m².

Aset Tetap - Tanah sebesar Rp586.656.201.004,76 tersebut termasuk di dalamnya:

- Tanah yang berlokasi di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok seluas 15.300m² dengan nilai Rp1.139.850.000,00 yang sertifikatnya dikuasai oleh pihak ketiga (PT BPPM);
- Tanah milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang digunakan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp2.382.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Tanah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk digunakan sebagai pabrik tiwul instan sebesar Rp787.200.000,00;
- Tanah seluas 5.272m² sebesar Rp1.054.400.000,00 yang terletak di Kelurahan Babadan (Kecamatan Wlingi) dan tercatat sebagai Aset Tetap Dinas Pertanian yang telah ditukar guling;
- Tanah sebanyak 256 bidang pada 22 SKPD yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00.

Namun nilai Aset Tetap - Tanah tersebut tidak termasuk didalamnya:

- 278 bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah yang belum dicatat dalam Neraca karena belum seluruhnya memiliki nilai. Dari 278 bidang tersebut 97 bidang sudah memiliki sertifikat, 171 bidang belum memiliki sertifikat, dan 10 bidang masih dalam proses pengurusan sertifikat;
- Aset tanah di Jalan Anjasmoro Kepanjen Lor yang digunakan untuk unit usaha percetakan PD Savitri Indah bersertifikat Hak Pakai Nomor 56 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar yang tidak tercatat sebagai BMD Kabupaten Blitar dan tidak tercatat sebagai aset PD Savitri Indah.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
2) Peralatan dan Mesin	350.620.073.844,30	301.445.996.701,70

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp350.620.073.844,30 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal		Rp 301.445.996.701,70
Penambahan Aset		
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 165.072.400,00	
c) Belanja Modal	Rp 25.903.803.760,00	
d) Koreksi	Rp 21.337.763.737,97	
e) Reklasifikasi	Rp 6.313.397.690,50	
f) Mutasi antar SKPD	Rp 7.563.691.850,00	
g) Hibah	Rp 26.885.879.245,00	+
Jumlah Penambahan Aset		Rp 88.169.608.683,47
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp (52.700.000,00)	
b) Hibah	Rp -	
c) Koreksi	Rp (18.004.530.485,62)	
d) Reklasifikasi	Rp (13.067.100.595,25)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp (7.549.341.850,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp (321.858.610,00)	+
Jumlah Pengurangan Aset		Rp (38.995.531.540,87) +
Saldo Akhir		Rp <u>350.620.073.844,30</u>

- a. Koreksi tambah sebesar Rp21.337.763.737,97 dan koreksi kurang sebesar Rp(18.004.530.485,62) merupakan koreksi karena kurang/lebih catat pada Neraca berdasarkan hasil penelusuran aset SKPD TA 2014;
- b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp6.313.397.690,50 terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp119.900.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya yang merupakan penambahan Aset Tetap dari belanja BLUD yang sebesar Rp4.042.845.577,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada KPTSP sebesar Rp360.100.000,00 dan BP4K sebesar Rp10.527.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Kelurahan Nglepok sebesar Rp3.200.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Lain-Lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.500.000,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.144.000,00;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.764.181.113,50 karena *mapping*/penyesuaian rekening Aset Tetap TA 2014;
- c. Reklasifikasi kurang sebesar Rp13.067.100.595,25 terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kelurahan Kanigoro sebesar Rp6.936.000,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp77.687.500,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp11.218.295.981,75, terdiri dari Aset Lain-Lain karena kondisi rusak sebesar Rp11.157.355.981,75 dan ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp60.940.000,00;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.764.181.113,50;
- d. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp7.563.691.850,00 merupakan penambahan Aset Tetap pada 77 SKPD dari Bagian Umum Sekretariat sesuai Keputusan Bupati Nomor 188/405/409.212/2014 sebesar Rp7.471.655.850,00 dan penambahan Aset Tetap pada Kecamatan Talun, Panggungrejo, Kademangan, dan Pongok dari Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp92.036.000,00;
- e. Mutasi kurang antar SKPD sebesar Rp7.549.341.850,00 merupakan mutasi keluar:
- Aset Tetap dari Bagian Umum Sekretariat kepada 77 SKPD lain sebesar Rp7.457.305.850,00;
 - Kendaraan bermotor roda 3 dari Badan Lingkungan Hidup kepada empat kecamatan sebesar Rp92.036.000,00;
- Terdapat selisih antara mutasi tambah antar SKPD dengan mutasi kurang antara SKPD sebesar Rp14.350.000,00, yaitu:
- | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Mutasi tambah antara SKPD | Rp | 7.563.691.850,00 |
| Mutasi kurang antar SKPD | <u>Rp</u> | <u>7.549.341.850,00 -</u> |
| Selisih | Rp | 14.350.000,00 |
- Selisih tersebut disebabkan Bagian Umum Sekretariat Daerah belum mencatat pengeluaran 1 unit sepeda motor dari BMD Bagian Umum, sedangkan Dinas Perhubungan dan Infokom sebagai penerima aset telah mencatat penambahan dalam BMD Dinas Perhubungan dan Infokom. Atas selisih tersebut akan dilakukan koreksi pada TA 2015.
- f. Penghapusan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.700.000,00 pada Kecamatan Sanankulon;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- g. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp26.885.879.245,00 terdiri dari Aset Tetap dari belanja modal BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp4.213.491.495,00, RSUD sebesar Rp21.187.517.500,00, Kantor Ketahanan Pangan sebesar Rp407.968.750,00, Dinas Peternakan sebesar Rp594.336.500,00, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp482.565.000,00;
- h. Mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp321.858.610,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap karena di bawah nilai kapitalisasi pada 83 SKPD yang dirinci pada Tabel 34.

Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 12: Ringkasan Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin** dan **Lampiran 13: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD Aset Tetap - Peralatan dan Mesin tahun 2014** serta **Lampiran 14: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per Rincian Obyek Rekening tahun 2014**.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp350.620.073.844,30 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Peralatan Dan Mesin per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
1	Dinas Pendidikan	96.537.774.190,00	84.787.126.145,00	13,86
2	Dinas Kesehatan	42.635.143.300,00	39.428.920.150,00	8,13
3	RSUD	57.087.412.491,67	40.519.196.717,00	40,89
4	Dinas PU Bina Marga	13.233.403.053,68	11.804.832.890,00	12,10
5	Dinas PU Cipta Karya	6.504.363.955,00	5.207.801.955,00	24,90
6	Bappeda	1.708.594.093,99	1.370.132.314,00	24,70
7	Dinas Perhubungan	6.895.948.335,00	5.930.584.755,00	16,28
8	Badan Lingkungan Hidup	3.666.719.417,00	2.144.768.251,00	70,96
9	Dinas Kependudukan dan Capil	5.409.498.559,18	5.339.650.804,50	1,31
10	Badan PPKB	6.238.399.331,60	5.794.430.948,00	7,66
11	Dinas Sosial	1.026.695.500,00	759.713.500,00	35,14
12	Dinas Nakertrans	1.161.302.103,00	1.071.041.903,00	8,43
13	Dinas Koperasi dan UMKM	550.383.500,00	497.337.000,00	10,67
14	Disporbudpar	1.526.526.315,00	1.340.321.925,00	13,89
15	Badan Kesbangpol	1.162.094.214,00	946.623.714,00	22,76
16	BPBD	5.848.952.625,00	4.886.895.875,00	19,69
17	Satpol PP	2.724.659.477,00	2.256.096.990,00	20,77
18	Sekretariat Daerah	31.105.840.907,44	37.362.865.603,24	(16,77)
	- Bagian Pemerintahan	167.485.000,00	188.175.000,00	(11,00)
	- Bagian Hukum	131.525.500,00	131.525.500,00	-
	- Bagian Kesra	99.834.500,00	67.271.000,00	48,41
	- Bagian Pembangunan	1.335.992.979,00	1.200.248.979,00	11,31



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Peralatan Dan Mesin per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
	- Bagian Perekonomian	147.919.750,00	89.193.500,00	65,84
	- Bagian Organisasi	259.388.000,00	146.904.000,00	76,57
	- Bagian Umum	27.975.950.178,44	34.631.774.224,24	(19,22)
	- Bagian Humas dan Protokol	987.745.000,00	907.773.400,00	7,75
19	Sekretariat DPRD	18.276.182.998,00	13.758.912.223,00	32,83
20	BPKAD	3.409.905.394,74	3.076.807.423,00	10,83
21	Inspektorat	1.715.022.390,00	1.572.547.390,00	9,06
22	BKD	1.790.861.290,00	1.891.686.790,00	(5,33)
23	KPTSP	1.734.858.593,00	889.982.000,00	94,93
24	Dinas Pendapatan	6.277.958.313,00	5.431.978.313,00	15,57
25	Kantor Ketahanan Pangan	386.356.000,00	477.675.250,00	(19,12)
26	Bapemas	1.021.061.500,00	452.344.500,00	125,73
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.042.702.814,36	1.026.702.814,36	1,56
28	Dinas Pertanian	5.213.969.424,04	3.883.023.569,00	34,28
29	Dinas Peternakan	3.710.213.606,00	3.673.427.506,00	1,00
30	BP4K	2.217.412.900,00	1.966.680.300,00	12,75
31	Dinas Hutbun	1.724.028.900,00	1.582.615.900,00	8,94
32	Dinas Kelautan Perikanan	2.761.062.273,00	1.717.871.233,00	60,73
33	Disperindag	1.631.632.900,00	1.293.968.607,00	26,10
34	Kecamatan Selopuro	339.810.500,00	167.664.500,00	102,67
35	Kecamatan Wlingi	371.833.200,00	147.491.500,00	152,10
36	Kecamatan Talun	368.245.500,00	158.408.500,00	132,47
37	Kecamatan Gandusari	390.054.600,00	161.442.600,00	141,61
38	Kecamatan Doko	395.655.500,00	207.382.500,00	90,79
39	Kecamatan Garum	634.511.000,00	478.291.000,00	32,66
40	Kecamatan Kanigoro	324.548.000,00	134.991.500,00	140,42
41	Kecamatan Sutojayan	344.852.500,00	152.520.980,00	126,10
42	Kecamatan Binangun	388.290.500,00	225.887.500,00	71,90
43	Kecamatan Wates	336.187.500,00	156.689.500,00	114,56
44	Kecamatan Panggungrejo	319.057.500,00	132.393.500,00	140,99
45	Kecamatan Wonotirto	343.400.500,00	150.822.500,00	127,69
46	Kecamatan Bakung	455.607.051,50	264.284.056,00	72,39
47	Kecamatan Kademangan	458.968.028,00	230.961.028,00	98,72
48	Kecamatan Sanankulon	336.590.691,00	219.796.691,00	53,14
49	Kecamatan Srengat	365.245.565,00	190.787.500,00	91,44
50	Kecamatan Wonodadi	315.184.150,00	115.993.950,00	171,72
51	Kecamatan Udanawu	344.377.500,00	194.809.500,00	76,78
52	Kecamatan Ponggok	410.736.100,00	180.904.600,00	127,05



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Peralatan Dan Mesin per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
53	Kecamatan Nglegok	366.080.150,00	147.402.810,00	148,35
54	Kecamatan Selorejo	333.459.224,00	182.540.224,00	82,68
55	Kecamatan Kesamben	380.710.395,00	231.719.500,00	64,30
57	Kelurahan Garum	143.068.000,00	110.135.000,00	29,90
58	Kelurahan Tawangsasri	151.791.937,50	100.038.937,50	51,73
59	Kelurahan Sumberdiren	100.195.500,00	57.532.500,00	74,15
60	Kelurahah Bence	199.679.000,00	141.551.000,00	41,07
61	Kelurahan Kanigoro	90.292.437,50	73.034.437,50	23,63
62	Kelurahan Satriyan	73.619.437,50	60.576.437,50	21,53
63	Kelurahan Kembangarum	120.763.000,00	106.650.000,00	13,23
64	Kelurahan Jingglong	145.776.937,50	115.023.937,50	26,74
65	Kelurahan Kalipang	174.664.000,00	125.681.000,00	38,97
66	Kelurahan Jegu	170.622.752,50	133.291.752,50	28,01
67	Kelurahan Sukorejo	202.993.187,50	167.150.187,50	21,44
68	Kelurahan Sutojayan	211.188.237,50	147.847.237,50	42,84
69	Kelurahan Kedungbunder	165.642.437,50	109.974.437,50	50,62
70	Kelurahan Wlingi	160.121.437,50	57.549.437,50	178,23
71	Kelurahan Beru	130.344.817,50	72.181.479,50	80,58
72	Kelurahan Tangkil	137.008.937,50	84.455.937,50	62,23
73	Kelurahan Klemunan	113.341.990,10	87.097.220,10	30,13
74	Kelurahan Babadan	111.153.407,50	85.023.407,50	30,73
75	Kelurahan Talun	267.657.227,50	173.613.227,50	54,17
76	Kelurahan Bajang	128.839.037,50	92.811.037,50	38,82
77	Kelurahan Kaweron	157.647.250,00	119.913.900,00	31,47
78	Kelurahan Kamulan	145.777.437,50	91.214.437,50	59,82
79	Kelurahan Kauman	151.068.437,50	111.345.437,50	35,68
80	Kelurahan Dandong	165.986.437,50	109.721.437,50	51,28
81	Kelurahan Srengat	180.525.937,50	119.681.937,50	50,84
82	Kelurahan Togokan	239.201.830,00	195.369.267,50	22,44
83	Kelurahan Kademangan	186.819.037,50	131.236.037,50	42,35
84	Kelurahan Nglegok	133.937.437,50	88.544.437,50	51,27
TOTAL		350.620.073.844,30	301.445.996.701,70	16,31

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Gedung dan Bangunan	741.201.304.154,92	689.741.212.886,92

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp741.201.304.154,92 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Awal			Rp 689.741.212.886,92
Penambahan Aset			
a) Belanja Pegawai	Rp	700.000,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	277.800.000,00	
c) Belanja Modal	Rp	102.978.867.182,00	
d) Koreksi	Rp	4.435.639.340,00	
e) Reklasifikasi	Rp	13.492.924.793,00	
f) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00	
g) Hibah	Rp	4.405.318.000,00	+
<i>Jumlah Penambahan Aset</i>			Rp 125.591.249.315,00
Pengurangan Aset			
a) Penghapusan	Rp	(1.935.336.750,00)	
b) Hibah	Rp	(0,00)	
c) Koreksi	Rp	(10.888.405.218,00)	
d) Reklasifikasi	Rp	(61.280.589.579,00)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp	(0,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp	(26.826.500,00)	+
<i>Jumlah Pengurangan Aset</i>			Rp (74.131.158.047,00) +
Saldo Akhir			RP <u>741.201.304.154,92</u>

Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Koreksi tambah sebesar Rp4.435.639.340,00 dan koreksi kurang sebesar Rp10.888.405.218,00 merupakan koreksi kurang/lebih catat pada Neraca berdasarkan hasil penelusuran aset SKPD;
- b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp13.492.924.793,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan penambahan Aset Tetap dari Belanja BLUD yang sebesar Rp9.082.961.407,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Sosial sebesar Rp9.491.614,00;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.400.471.772,00 karena *mapping*/penyesuaian rekening Aset Tetap TA 2014;
- c. Reklasifikasi kurang sebesar Rp61.280.589.579,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp51.725.000,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp56.151.578.907,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan Dan Mesin sebesar Rp370.627.000,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya – Aset Lain-Lain sebesar Rp306.186.900,00;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.400.471.772,00 karena *mapping* Aset Tetap TA 2014;
- d. Penghapusan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.935.336.750,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp197.531.500,00, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp56.915.000,00, serta RSUD “Ngudi Waluyo” sebesar Rp1.680.890.250,00;
- e. Hibah dari Pemerintah Pusat Rp4.405.318.000,00 terdiri dari RSUD sebesar Rp1.233.863.000,00, Dinas Peternakan Rp1.408.976.000,00, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.762.479.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

f. Mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp26.826.500,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap karena di bawah nilai kapitalisasi pada Sekretariat DPRD, Kecamatan Doko, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Talun yang dirinci pada Tabel 34.

Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 15: Ringkasan Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan** dan **Lampiran 16: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2014** serta **Lampiran 17: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2014**.

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp741.201.304.154,92 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Gedung dan Bangunan per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
Rekap Dinas Kantor		709.141.166.719,92	658.729.305.201,92	
1	Dinas Pendidikan	410.777.266.687,86	386.119.427.637,86	6,39
2	Dinas Kesehatan	60.738.925.291,00	52.487.007.461,00	15,72
3	RSUD	23.917.248.349,00	27.427.607.959,00	(12,80)
4	Dinas PU Bina Marga	4.180.321.000,00	3.987.158.000,00	4,84
5	Dinas PU Cipta Karya	71.915.051.776,00	67.464.275.276,00	6,60
7	Dinas Perhubungan	11.231.804.451,04	10.352.345.201,04	8,50
8	Badan Lingkungan Hidup	2.890.316.200,00	2.194.541.200,00	31,70
9	Dinas Kependudukan dan Capil	413.501.000,00	413.501.000,00	-
10	Badan PPKB	3.341.404.299,64	2.690.213.299,64	24,21
11	Dinas Sosial	343.917.875,00	249.395.261,00	37,90
12	Dinas Nakertrans	343.856.094,00	343.856.094,00	-
13	Dinas Koperasi dan UMKM	354.377.000,00	290.411.000,00	22,03
14	Disporbudpar	35.130.978.925,00	33.826.383.425,00	3,86
15	Badan Kesbangpol	326.584.000,00	248.208.000,00	31,58
16	BPBD	1.164.151.000,00	1.164.151.000,00	-
17	Satpol PP	58.130.000,00	-	100,00
18	Sekretariat Daerah	3.923.983.770,00	2.580.459.462,00	52,07
	- Bagian Pembangunan	40.950.800,00	40.950.800,00	-
	- Bagian Umum	3.883.032.970,00	2.539.508.662,00	52,90
19	Sekretariat DPRD	2.959.411.400,00	2.727.010.350,00	8,52
20	BPKAD	20.291.051.600,05	18.371.347.601,05	10,45
21	Inspektorat	46.125.000,00	46.125.000,00	-
22	BKD	437.513.000,00	437.513.000,00	-
23	KPTSP	430.790.500,00	296.456.500,00	45,31
24	Dinas Pendapatan	4.815.212.600,00	4.074.453.100,00	18,18
25	Kantor Ketahanan Pangan	309.860.000,00	309.860.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Gedung dan Bangunan per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
26	Bapemas	812.305.339,33	709.053.339,33	14,56
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip	334.100.000,00	136.810.000,00	144,21
28	Dinas Pertanian	5.472.086.260,00	5.487.935.135,00	(0,29)
29	Dinas Peternakan	15.037.609.350,00	13.577.531.350,00	10,75
30	BP4K	3.539.958.042,00	2.999.548.240,00	18,02
31	Dinas Hutbun	330.018.030,00	330.018.030,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	9.688.538.730,00	5.906.418.130,00	64,03
33	Disperindag	13.584.769.150,00	11.480.284.150,00	18,33
34	Kecamatan Selopuro	963.870.000,00	963.870.000,00	-
35	Kecamatan Wlingi	471.447.000,00	471.447.000,00	-
36	Kecamatan Talun	373.179.000,00	353.229.000,00	5,65
37	Kecamatan Gandusari	290.053.000,00	290.053.000,00	-
38	Kecamatan Doko	193.757.250,00	193.757.250,00	-
39	Kecamatan Garum	254.803.500,00	219.934.500,00	15,85
40	Kecamatan Kanigoro	669.175.500,00	669.175.500,00	-
41	Kecamatan Sutojayan	152.269.800,00	152.269.800,00	-
42	Kecamatan Binangun	168.237.000,00	99.237.000,00	69,53
43	Kecamatan Wates	361.294.500,00	398.686.500,00	(9,38)
44	Kecamatan Panggungrejo	275.794.025,00	275.794.025,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	128.877.000,00	128.877.000,00	-
46	Kecamatan Bakung	3.613.745.250,00	3.646.618.750,00	(0,90)
47	Kecamatan Kademangan	355.166.500,00	305.166.500,00	16,38
48	Kecamatan Sanankulon	229.881.000,00	229.881.000,00	-
49	Kecamatan Srengat	257.794.850,00	257.794.850,00	-
50	Kecamatan Wonodadi	472.074.000,00	472.074.000,00	-
51	Kecamatan Udanawu	332.026.700,00	307.026.700,00	8,14
52	Kecamatan Ponggok	91.591.000,00	76.551.000,00	19,65
53	Kecamatan Nglegok	169.122.800,00	169.122.800,00	-
54	Kecamatan Selorejo	439.897.500,00	439.897.500,00	-
55	Kecamatan Kesamben	109.931.625,00	109.931.625,00	-
57	Kelurahan Garum	194.969.000,00	134.349.000,00	45,12
58	Kelurahan Tawangsasri	267.957.050,00	224.558.750,00	19,33
59	Kelurahan Sumberdiren	190.400.750,00	177.400.750,00	7,33
60	Kelurahah Bence	325.962.000,00	275.967.000,00	18,12
61	Kelurahan Kanigoro	132.518.000,00	146.855.400,00	(9,76)
62	Kelurahan Satriyan	254.046.250,00	217.656.250,00	16,72
63	Kelurahan Kembangarum	364.593.725,00	315.623.725,00	15,52
64	Kelurahan Jingglong	184.739.000,00	121.639.000,00	51,87



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Gedung dan Bangunan per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
65	Kelurahan Kalipang	347.457.550,00	347.457.550,00	-
66	Kelurahan Jegu	329.528.300,00	307.853.300,00	7,04
67	Kelurahan Sukorejo	303.798.500,00	279.298.500,00	8,77
68	Kelurahan Sutojayan	10.370.166.320,00	10.350.356.320,00	0,19
69	Kelurahan Kedungbunder	175.285.000,00	122.785.000,00	42,76
70	Kelurahan Wlingi	981.681.000,00	941.758.000,00	4,24
71	Kelurahan Beru	362.729.455,00	362.729.455,00	-
72	Kelurahan Tangkil	952.702.200,00	857.362.200,00	11,12
73	Kelurahan Klemunan	274.047.445,00	274.047.445,00	-
74	Kelurahan Babadan	896.830.100,00	1.022.635.100,00	(12,30)
75	Kelurahan Talun	411.054.000,00	326.054.000,00	26,07
76	Kelurahan Bajang	485.037.125,00	357.257.125,00	35,77
77	Kelurahan Kaweron	354.083.250,00	354.083.250,00	-
78	Kelurahan Kamulan	247.607.665,00	191.035.665,00	29,61
79	Kelurahan Kauman	336.383.850,00	336.383.850,00	-
80	Kelurahan Dandong	633.542.700,00	617.837.350,00	2,54
81	Kelurahan Srengat	141.018.000,00	141.018.000,00	-
82	Kelurahan Togokan	499.912.250,00	441.412.250,00	13,25
83	Kelurahan Kademangan	575.497.900,00	492.997.900,00	16,73
84	Kelurahan Nglegok	1.092.600.250,00	1.043.100.250,00	4,75
TOTAL		741.201.304.154,92	689.741.212.886,92	7,46

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp741.201.304.154,92 tersebut termasuk di dalamnya bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk digunakan sebagai pabrik tiwul instan sebesar Rp321,651,000,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.170.889.657.457,12	934.736.744.970,62

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.170.889.657.457,12 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal		Rp	934.736.744.970,62
Penambahan Aset			
a) Belanja Pegawai	Rp	0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00	
c) Belanja Modal	Rp	238.361.984.855,00	
d) Koreksi	Rp	182.064.155.693,96	
e) Reklasifikasi	Rp	65.142.706.294,00	
f) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00	
g) Hibah	Rp	0,00	
Jumlah Penambahan Aset		485.568.846.842,96	



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurangan Aset

a) Penghapusan	Rp	(0,00)	
b) Hibah	Rp	(0,00)	
c) Koreksi	Rp	(182.355.151.350,50)	
d) Reklasifikasi	Rp	(66.702.069.005,96)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp	(0,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp	(358.714.000,00)	+
Jumlah Pengurangan Aset			Rp (249.415.934.356,46) +
Saldo Akhir			RP 1.170.889.657.457,12

- a. Koreksi tambah sebesar Rp182.064.155.693,96 dan koreksi kurang sebesar Rp182.355.151.350,50 merupakan koreksi karena kurang/lebih catat pada Neraca berdasarkan hasil penelusuran Aset Tetap SKPD TA 2014;
- b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp65.142.706.294,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya yang merupakan penambahan Aset Tetap dari Belanja BLUD yang sebesar Rp390.617.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp386.277.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.725.000,00, pada Kecamatan Udanawu sebesar Rp25.000.000,00 dan Kecamatan Kauman sebesar Rp26.725.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.936.000,00 pada Kelurahan Kanigoro;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Gedung Dan Bangunan sebesar Rp64.307.151.294,00 karena *mapping*/penyesuaian rekening Aset Tetap TA 2014;
- c. Reklasifikasi kurang sebesar Rp66.702.069.005,96 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.900.000,00 pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial sebesar Rp9.491.614,00;
 - Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp2.265.526.097,96 pada Dinas Pertanian;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp64.307.151.294,00 karena *mapping*/penyesuaian rekening Aset Tetap TA 2014;
- d. Mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp358.714.000,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap karena di bawah nilai kapitalisasi pada Dinas PU Bina Marga, Kelurahan Kalipang, dan Kelurahan Kauman yang dirinci pada Tabel 34

Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan(saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 18: Ringkasan Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan** dan **Lampiran 19: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2014** dan **Lampiran 20: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2014**.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2014 sebesar 1.170.889.657.457,12 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
1	Dinas Pendidikan	113.438.839,12	83.815.839,12	35,34
2	Dinas Kesehatan	46.509.950,00	46.509.950,00	-
3	RSUD	3.754.755.181,00	3.118.438.181,00	20,40
4	Dinas PU Bina Marga	1.018.674.133.635,00	815.174.479.466,00	24,96
5	Dinas PU Cipta Karya	132.693.054.846,00	98.994.117.131,00	34,04
7	Dinas Perhubungan	102.782.140,00	88.790.800,00	15,76
8	Badan Lingkungan Hidup	1.324.712.846,00	1.324.712.846,00	-
9	Dinas Kependudukan dan Capil	4.500.100,00	4.500.100,00	-
10	Badan PPKB	34.690.250,00	14.990.250,00	131,42
11	Dinas Sosial	2.270.000,00	11.761.614,00	(80,70)
12	Dinas Nakertrans	8.375.000,00	8.375.000,00	-
13	Dinas Koperasi dan UMKM	4.420.000,00	4.420.000,00	-
16	BPBD	6.112.343.000,00	6.112.343.000,00	-
17	Satpol PP	2.500.000,00	2.500.000,00	-
18	Sekretariat Daerah	390.170.861,00	390.170.861,00	-
	- Bagian Umum	390.170.861,00	390.170.861,00	-
19	Sekretariat DPRD	386.520.000,00	467.190.500,00	(17,27)
20	BPKAD	204.577.800,00	204.577.800,00	-
21	Inspektorat	69.723.500,00	69.723.500,00	-
22	Dinas Pendapatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
23	Bapemas	23.150.000,00	23.150.000,00	-
24	Dinas Pertanian	285.740.000,00	2.950.195.373,00	(90,31)
25	Dinas Hutbun	14.169.500,00	14.169.500,00	-
26	Dinas Kelautan Perikanan	1.538.133.507,00	1.094.699.507,00	40,51
27	Disperindag	14.165.000,00	14.165.000,00	-
28	Kecamatan Doko	412.160.000,00	412.160.000,00	-
29	Kecamatan Bakung	-	0,50	(100,00)
30	Kecamatan Udanawu	28.400.000,00	3.400.000,00	735,29
31	Kelurahan Garum	114.076.000,00	114.076.000,00	-
32	Kelurahan Tawangsasri	553.950.000,00	553.950.000,00	-
33	Kelurahan Bence	58.451.500,00	58.451.500,00	-
34	Kelurahan Kanigoro	70.340.000,00	33.850.000,00	107,80
35	Kelurahan Kembangarum	585.437.500,00	585.437.500,00	-
36	Kelurahan Jingglong	166.620.900,00	166.620.900,00	-
37	Kelurahan Kalipang	182.018.000,00	132.705.000,00	37,16
38	Kelurahan Jegu	15.700.000,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
39	Kelurahan Sukorejo	182.150.400,00	103.392.400,00	76,17
40	Kelurahan Sutojayan	196.087.250,00	175.960.500,00	11,44
41	Kelurahan Kedungbunder	77.380.000,00	77.380.000,00	-
42	Kelurahan Wlingi	148.750.000,00	50.250.000,00	196,02
43	Kelurahan Tangkil	90.102.327,00	90.102.327,00	-
44	Kelurahan Babadan	239.127.400,00	172.427.400,00	38,68
45	Kelurahan Talun	151.300.000,00	151.300.000,00	-
46	Kelurahan Bajang	445.413.500,00	445.413.500,00	-
47	Kelurahan Kaweron	257.527.875,00	173.657.875,00	48,30
48	Kelurahan Kamulan	82.800.550,00	82.800.550,00	-
49	Kelurahan Kauman	63.890.000,00	37.165.000,00	71,91
50	Kelurahan Dandong	278.636.500,00	213.946.500,00	30,24
51	Kelurahan Srengat	182.701.000,00	182.701.000,00	-
52	Kelurahan Togokan	368.319.800,00	368.319.800,00	-
53	Kelurahan Kademangan	33.481.000,00	33.481.000,00	-
TOTAL		1.170.889.657.457,12	934.736.744.970,62	25,26

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
5) Aset Tetap Lainnya	32.039.809.800,00	28.395.950.837,00
Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp32.039.809.800,00 dengan rincian sebagai berikut.		
Saldo Awal		Rp 28.395.950.837,00
Penambahan Aset		
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 0,00	
c) Belanja Modal	Rp 16.702.272.455,00	
d) Koreksi	Rp 53.178.400,00	
e) Reklasifikasi	Rp 419.719.482,00	
f) Mutasi antar SKPD	Rp 0,00	
g) Hibah	Rp 1.249.509.772,00	
<i>Jumlah Penambahan Aset</i>		Rp 18.424.680.109,00
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp (0,00)	
b) Hibah	Rp (0,00)	
c) Koreksi	Rp (6.898.400,00)	
d) Reklasifikasi	Rp (14.663.065.866)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp (0,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp (110.856.880,00)	
<i>Jumlah Pengurangan Aset</i>		Rp (14.780.821.146,00)
Saldo Akhir		Rp 32.039.809.800,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Koreksi tambah sebesar Rp53.178.400,00 dan koreksi kurang sebesar - Rp6.898.400,00 merupakan koreksi karena kurang/lebih catat pada Neraca berdasarkan hasil penelusuran Aset Tetap SKPD TA 2014;
- b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp419.719.482 terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp77.687.500,00;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp342.031.982,00 karena *mapping* rekening Aset Tetap TA 2014;
- c. Reklasifikasi kurang sebesar Rp14.663.065.866 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD sebesar Rp13.516.423.984;
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.200.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya – Aset Lain-Lain karena kondisi rusak berat sebesar Rp801.409.900,00;
 - Reklasifikasi antar rekening Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp342.031.982,00;
- d. Mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp110.856.880,00,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap karena di bawah nilai kapitalisasi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Dinas Kelautan Perikanan yang dirinci pada Tabel 34

Mutasi aset tetap lainnya (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 21: Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya** dan **Lampiran 22: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap Lainnya Tahun 2014** serta **Lampiran 23: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya, per Rincian Obyek Rekening Tahun 2014**.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp32.039.809.800,00 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Aset Tetap Lainnya per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
1	Dinas Pendidikan	26.807.768.255,00	22.702.322.612,00	18,08
2	Dinas Kesehatan	693.200,00	693.200,00	-
3	RSUD	4.575.000,00	5.575.000,00	(17,94)
4	Dinas PU Bina Marga	69.472.000,00	69.472.000,00	-
5	Dinas PU Cipta Karya	2.679.973.500,00	2.679.973.500,00	-
6	Bappeda	277.865.500,00	277.865.500,00	-
7	Dinas Perhubungan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
8	Badan Lingkungan Hidup	712.050.550,00	712.050.550,00	-
9	Disporbudpar	125.450.125,00	134.522.625,00	(6,74)
10	BPBD	16.700.000,00	16.700.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap Lainnya per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
11	Sekretariat Daerah	498.050.400,00	317.100.400,00	57,06
	- Bagian Hukum	10.852.900,00	7.002.900,00	-
	- Bagian Perekonomian	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	- Bagian Umum	482.697.500,00	305.597.500,00	57,95
19	Sekretariat DPRD	89.913.400,00	42.808.400,00	110,04
20	BPKAD	-	800.000,00	(100,00)
21	Inspektorat	40.000,00	40.000,00	-
24	Dinas Pendapatan	1.260.000,00	1.260.000,00	-
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip	241.818.070,00	219.311.350,00	10,26
29	Dinas Peternakan	-	5.200,00	(100,00)
30	BP4K	12.000,00	12.000,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	120.045.000,00	120.045.000,00	-
33	Disperindag	6.000.000,00	6.000.000,00	-
35	Kecamatan Wlingi	-	3.974.700,00	(100,00)
36	Kecamatan Talun	-	58.000.000,00	(100,00)
38	Kecamatan Doko	18.000,00	18.000,00	-
39	Kecamatan Garum	65.010.000,00	65.010.000,00	-
40	Kecamatan Kanigoro	25.000,00	25.000,00	-
41	Kecamatan Sutojayan	2.870.000,00	2.870.000,00	-
42	Kecamatan Binangun	15.000,00	15.000,00	-
43	Kecamatan Wates	38.140.000,00	58.140.000,00	(34,40)
44	Kecamatan Panggungrejo	72.500.000,00	72.500.000,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	18.500.000,00	18.500.000,00	-
46	Kecamatan Bakung	36.960.000,00	36.960.000,00	-
47	Kecamatan Kademangan	28.795.000,00	28.895.000,00	(0,35)
48	Kecamatan Sanankulon	-	603.025.000,00	(100,00)
49	Kecamatan Srengat	36.000.000,00	36.000.000,00	-
50	Kecamatan Wonodadi	31.500.000,00	31.500.000,00	-
52	Kecamatan Ponggok	100.000,00	100.000,00	-
66	Kelurahan Sukorejo	34.500.000,00	34.500.000,00	-
67	Kelurahan Sutojayan	3.250.000,00	3.250.000,00	-
69	Kelurahan Wlingi	4.590.000,00	-	-
72	Kelurahan Klemunan	148.000,00	168.000,00	(11,90)
73	Kelurahan Babadan	440.000,00	1.940.000,00	(77,32)
74	Kelurahan Talun	100.000,00	100.000,00	-
76	Kelurahan Kaweron	4.600.000,00	4.600.000,00	-
78	Kelurahan Kauman	2.000.000,00	2.000.000,00	-
80	Kelurahan Srengat	400.000,00	400.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap Lainnya per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
81	Kelurahan Togokan	6.511.800,00	52.800,00	12.232,95
82	Kelurahan Kademangan	-	22.500.000,00	(100,00)
83	Kelurahan Nglegok	-	3.200.000,00	(100,00)
TOTAL		32.039.809.800,00	28.395.950.837,00	12,83

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
6) Konstruksi dalam Pengerjaan	70.467.299.457,00	14.467.524.050,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp70.467.299.457,00 merupakan reklasifikasi atas pembangunan yang belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp	14.467.524.050,00
Penambahan Aset		
a) Belanja Pegawai	Rp	0,00
b) Belanja Barang dan Jasa		0,00
c) Belanja Modal	Rp	0,00
d) Koreksi	Rp	0,00
e) Reklasifikasi	Rp	56.386.052.407,00
f) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00
g) Hibah	Rp	0,00 +
<i>Jumlah Penambahan Aset</i>	<i>Rp</i>	<i>56.386.052.407,00</i>
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp	(0,00)
b) Hibah	Rp	(0,00)
c) Koreksi	Rp	(0,00)
d) Reklasifikasi	Rp	(386.277.000,00)
e) Mutasi antar SKPD	Rp	(0,00)
f) Ekstrakomtable	Rp	(0,00) +
<i>Jumlah Pengurangan Aset</i>	<i>Rp</i>	<i>(386.277.000,00) +</i>
Saldo Akhir	Rp	70.467.299.457,00

Penambahan Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp56.386.052.407,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Reklasifikasi yang menambah Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp56.386.052.407,00, yaitu pada SKPD:

1	Dinas Kesehatan	Rp	242.440.700,00
2	RSUD Ngudi Waluyo	Rp	4.959.958.407,00
3	Dinas PU Bina Marga	Rp	234.473.500,00
4	Dinas PU Cipta Karya	Rp	50.949.179.800,00
<i>Jumlah reklasifikasi yang menambah</i>		<i>Rp</i>	<i>56.386.052.407,00</i>
<i>Kontruksi dalam Pengerjaan</i>			



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp386.277.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Reklasifikasi yang menambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(386.277.000,00), yaitu pada SKPD:

1	Dinas PU Bina Marga dan Pengairan	Rp	386.277.000,00
	<i>Jumlah reklasifikasi yang mengurangi</i>	<i>Rp</i>	<i>386.277.000,00</i>
	<i>Kontruksi dalam Pengerjaan</i>		

Mutasi Kontruksi dalam Pengerjaan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 24: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Kontruksi dalam Pengerjaan Tahun 2014** dan **Lampiran 25: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2014**.

Rincian Aset Tetap - Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

		Rincian KDP			
No	SKPD	No	Nama Kontruksi	Per 31 Des 2014	Per 31 Des 2013
1	Dinas Kesehatan	1	Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Ngadri Kecamatan Binangun	174.256.168,00	-
		2	Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Sutojayan	68.184.532,00	-
			Jumlah	242.440.700,00	-
2	RSUD	1	Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral	4.959.958.407,00	-
			Jumlah	4.959.958.407,00	-
3	Dinas PU Bina Marga	1	Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Tahun 2014	-	337.927.000,00
		2	Jasa Konsultasi Perencanaan Jaringan Irigasi Tahun 2014	-	48.350.000,00
		3	Investigasi dan Pemetaan Lokasi Pelurusan Jalan Brongkos Kesamben dan Jalan menuju akses wisata Sirah Kencong	234.473.500,00	-
		4	Penunjang Pengadaan Tanah Pelurusan Jalan Brongkos Karang Kates	305.906.700,00	305.906.700,00
			Jumlah	540.380.200,00	692.183.700,00
4	Dinas PU Cipta Karya	1	Pembangunan Kantor Sekretariat Bupati dan SKPD Kab Blitar di Kanigoro	44.231.676.950,00	13.775.340.350,00
		2	Pembangunan Kantor SKPD (BLH dan Dispenduk Capil)	4.539.695.200,00	-
		3	Pembangunan Stadion Olahraga Kab Blitar di Kec. Nglegok	12.332.745.000,00	-
		4	Pembangunan Amphitheatre	3.620.403.000,00	-
			Jumlah	64.724.520.150,00	13.775.340.350,00
TOTAL				70.467.299.457,00	14.467.524.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
e. Dana Cadangan	10.173.792.210,00	2.000.000.000,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.173.792.210,00 merupakan dana untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Adapun mutasi Dana Cadangan tersebut sebagai berikut.

Saldo awal		2.000.000.000,00
Penambahan		
a) Pembentukan Dana Cadangan	Rp	8.000.000.000,00
b) Bunga Deposito Dana Cadangan	Rp	173.792.210,00
Jumlah	Rp	8.173.792.210,00
Saldo akhir		10.173.792.210,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp10.173.792.210,00 disimpan dalam rekening bank:

a) Rekening Deposito BRI dengan nomor Bilyet Deposito 0009-01-006599-40-7	Rp	2.000.000.000,00
b) Rekening Giro BRI dengan nomor Rekening 0009-01-001145-30-0	Rp	8.173.792.210,00

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
f. Aset Lainnya	60.102.564.467,35	58.298.266.852,64

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp60.102.564.467,35 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp58.298.266.852,64 dan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1)	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	348.445.570,00	0,00
2)	Aset Tak berwujud	3.247.540.832,64	2.107.548.832,64
3)	Aset Lain-lain	56.506.578.064,71	56.190.718.020,00
Jumlah Aset		60.102.564.467,35	58.298.266.852,64

Sedangkan mutasi penambahan dalam TA 2014 sebesar Rp1.804.297.614,71 diperoleh dari jumlah Aset Lainnya Tahun 2014 dikurangi dengan jumlah Aset Lainnya Tahun 2013 (Rp60.102.564.467,35 -Rp58.298.266.852,64) dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	348.445.570,00	0,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2014 sebesar Rp348.445.570,00 merupakan TGR yang sudah ada SK Pembebanannya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Rincian Aset lain-lain - TGR per 31 Desember 2014

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2014
a	<i>Piutang TGR-Anggota DPRD</i>	
(1)	KP	144.170.948,00
(2)	BP	8.853.500,00
(3)	AS	7.733.500,00
(4)	TW	4.203.500,00
(5)	TDS	7.833.500,00
(6)	MS	144.150.622,00
	Jumlah	316.945.570,00
b	<i>Piutang TGR-Staf DPRD</i>	
(1)	E S	3.600.000,00
(2)	S S	3.000.000,00
(3)	Modj	3.000.000,00
(4)	Sbkir	3.850.000,00
(5)	Mlyadi	2.800.000,00
(6)	Snarto	3.600.000,00
(7)	Boed	3.600.000,00
(8)	Sgt, SH	900.000,00
(9)	M S	1.500.000,00
(10)	T S	3.600.000,00
(11)	E W	750.000,00
(12)	Sats	1.300.000,00
	Jumlah	31.500.000,00
	JUMLAH TOTAL a+b	348.445.570,00

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
2) Aset Tidak Berwujud	3.247.540.832,64	2.107.548.832,64

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.247.540.832,64 merupakan *software*/perangkat lunak dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp 2.107.548.832,64
Penambahan Aset	
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 0,00
c) Belanja Modal	Rp 1.079.052.000,00
d) Koreksi	Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

e) Reklasifikasi	Rp	60.940.000,00	
f) Mutasi antar SKPD	Rp	0,00	
g) Hibah	Rp	0,00	+
<i>Jumlah Penambahan Aset</i>		Rp	1.139.992.000,00

Pengurangan Aset

a) Penghapusan	Rp	(0,00)	
b) Hibah	Rp	(0,00)	
c) Koreksi	Rp	(0,00)	
d) Reklasifikasi	Rp	(0,00)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp	(0,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp	(0,00)	+
<i>Jumlah Pengurangan Aset</i>		Rp	(0,00) +

Saldo Akhir **RP 3.247.540.832,64**

Penambahan sebesar Rp1.139.992.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Belanja Modal berupa pengadaan *software aplikasi* pada Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi, BKD, KPTSP, Dinas Pendapatan, Bapemas, BP4K dan Kelurahan Srengat;
- b) Reklasifikasi sebesar Rp60.940.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hasil pengadaan tahun 2007;

Mutasi Aset Tidak Berwujud (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 26: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tidak Berwujud Tahun 2014** dan **Lampiran 27: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud per Rincian Obyek Rekening Tahun 2014**.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.247.540.832,64 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
1	Dinas Kesehatan	42.775.897,00	42.775.897,00	-
2	Dinas PU Bina Marga	14.475.000,00	14.475.000,00	-
3	Bappeda	87.400.000,00	25.000.000,00	-
4	Dinas Perhubungan	186.003.500,00	141.882.500,00	31,10
5	Dinas Kependudukan dan Capil	278.295.000,00	169.355.000,00	64,33
6	Dinas Nakertrans	57.900.000,00	57.900.000,00	-
7	Sekretariat Daerah	300.994.500,00	97.934.500,00	207,34
	- Bagian Pemerintahan	19.602.000,00	19.602.000,00	-
	- Bagian Hukum	13.832.500,00	13.832.500,00	-
	- Bagian Pembangunan	79.460.000,00	64.500.000,00	23,19
	- Bagian Organisasi	188.100.000,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tidak Berwujud per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
	Rupiah	Rupiah	%
8 Sekretariat DPRD	98.900.000,00	98.900.000,00	-
9 BPKAD	448.314.500,00	448.314.500,00	-
10 BKD	207.640.000,00	147.855.000,00	40,43
11 KPTSP	237.440.000,00	208.245.000,00	14,02
12 Dinas Pendapatan	1.088.992.000,00	616.067.000,00	76,77
13 Bapemas	91.400.000,00	10.000.000,00	814,00
14 Kantor Perpustakaan dan Arsip	26.944.435,64	26.944.435,64	-
15 BP4K	72.666.000,00	-	-
16 Kelurahan Wlingi	1.900.000,00	1.900.000,00	-
17 Kelurahan Srengat	5.500.000,00	-	-
TOTAL	3.247.540.832,64	2.107.548.832,64	54,09

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Aset Lain-lain	56.506.578.064,71	56.190.718.020,00
Saldo Aset Lain-Lain merupakan aset dihibahkan dan aset rusak per 31 Desember 2014 sebesar Rp56.506.578.064,71 dengan dengan rincian sebagai berikut.		
Saldo Awal		Rp 56.190.718.020,00
Penambahan Aset		
a) Belanja Pegawai	Rp 0,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	0,00	
c) Belanja Modal	Rp 0,00	
d) Koreksi	Rp 1.096.800,00	
e) Reklasifikasi	Rp 14.705.705.789,71	
f) Mutasi antar SKPD	Rp 0,00	
g) Hibah	Rp 0,00	
Jumlah Penambahan Aset		Rp 14.706.802.589,71
Pengurangan Aset		
a) Penghapusan	Rp (14.372.997.046,00)	
b) Hibah	Rp (0,00)	
c) Koreksi	Rp (5.301.499,00)	
d) Reklasifikasi	Rp (12.644.000,00)	
e) Mutasi antar SKPD	Rp (0,00)	
f) Ekstrakomtable	Rp (0,00)	
Jumlah Pengurangan Aset		Rp (14.390.942.545,00) +
Saldo Akhir		Rp 56.506.578.064,71



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp14.706.802.589,71 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Koreksi tambah sebesar Rp1.096.800,00 dan koreksi kurang sebesar Rp5.301.499,00 merupakan koreksi karena kurang/lebih catat pada Neraca berdasarkan hasil penelusuran Aset Tetap SKPD TA 2014;
- b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp14.705.705.789,71 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Persediaan yang rusak/kadaluarsa sebesar Rp125.226.910,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Tanah sebesar Rp50.000.000,00 pada Dinas Peternakan;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.157.355.981,75;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp306.186.900,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.265.526.097,96;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp801.409.900,00.
- c. Reklasifikasi kurang sebesar Rp12.644.000,00 ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.500.000,00 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.144.000,00;
- d. Penghapusan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain sebesar Rp14.372.997.046,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp10.185.000,00, merupakan persediaan yang kadaluarsa;
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp588.999.400,00, merupakan penghapusan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/279/409.012/KPTS/2014;
 - Dinas Pertanian sebesar Rp13.542.941.646,00, merupakan penghapusan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/355/409.012/KPTS/2014;
 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp230.871.000 merupakan penghapusan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/280/409.012/KPTS/2014.
- e. Mutasi aset lain-lain (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada **Lampiran 28: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Lain-Lain Tahun 2014** dan **Lampiran 29: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain per Rincian Obyek Rekening Tahun 2014**.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp56.506.578.064,71 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

	Aset Lain-Lain per SKPD	Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
1	Dinas Pendidikan	7.647.856.720,00	7.647.856.720,00	-
2	Dinas Kesehatan	141.329.985,00	21.693.325,00	551,49



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Lain-Lain per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
3	RSUD	8.345.526.885,51	202.647.185,00	4.018,25
4	Dinas PU Bina Marga	15.214.480.100,00	15.189.701.100,00	0,16
5	Dinas PU Cipta Karya	13.035.425.200,00	13.035.425.200,00	-
6	Bappeda	17.341.000,00	17.341.000,00	-
7	Badan Lingkungan Hidup	32.717.000,00	-	-
8	Dinas Kependudukan dan Capil	181.321.843,34	12.685.000,00	1.329,92
9	Badan PPKB	65.547.619,40	-	-
10	Dinas Sosial	1.250.000,00	-	-
11	Dinas Nakertrans	36.721.800,00	18.098.000,00	102,91
12	Dinas Koperasi dan UMKM	16.936.800,00	16.940.000,00	(0,02)
13	Disporbudpar	236.548.610,00	-	-
14	Badan Kesbangpol	67.248.000,00	67.248.000,00	-
15	BPBD	55.332.800,00	38.127.800,00	45,12
16	Sekretariat Daerah	500.483.200,00	-	-
	- Bagian Pemerintahan	29.450.000,00	-	-
	- Bagian Umum	469.458.200,00	-	-
	- Bagian Humas dan Protokol	1.575.000,00	-	-
17	Sekretariat DPRD	30.010.000,00	-	-
18	BPKAD	4.872.000,00	500.000,00	874,40
19	Dinas Pendapatan	874.300,00	-	-
20	Inspektorat	9.220.000,00	9.220.000,00	-
21	BKD	315.541.000,00	-	-
23	KPTSP	56.693.125,00	-	-
24	Kantor Ketahanan Pangan	533.288.000,00	-	-
25	Bapemas	317.129.000,00	906.128.400,00	(65,00)
26	Dinas Pertanian	7.221.533.580,96	17.855.856.447,00	(59,56)
27	Dinas Peternakan	787.136.940,00	701.413.340,00	12,22
28	BP4K	16.586.000,00	16.586.000,00	-
29	Dinas Hutbun	70.622.448,00	301.493.448,00	(76,58)
30	Dinas Kelautan Perikanan	240.893.210,00	70.594.255,00	241,24
31	Disperindag	53.018.800,00	61.162.800,00	(13,32)
32	Kecamatan Selopuro	10.070.000,00	-	-
33	Kecamatan Wlingi	7.547.500,00	-	-
34	Kecamatan Talun	59.940.000,00	-	-
35	Kecamatan Doko	2.270.000,00	-	-
36	Kecamatan Garum	2.583.000,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Lain-Lain per SKPD		Per 31-Des-2014	Per 31-Des-2013	Naik/ (Turun)
		Rupiah	Rupiah	%
37	Kecamatan Kanigoro	6.564.000,00	-	-
38	Kecamatan Sutojayan	3.691.480,00	-	-
39	Kecamatan Binangun	1.510.000,00	-	-
40	Kecamatan Wates	68.387.000,00	-	-
41	Kecamatan Panggungrejo	11.213.000,00	-	-
42	Kecamatan Wonotirto	210.000,00	-	-
43	Kecamatan Bakung	47.537.500,00	-	-
44	Kecamatan Kademangan	8.570.000,00	-	-
45	Kecamatan Sanankulon	616.075.000,00	-	-
46	Kecamatan Srengat	4.925.000,00	-	-
47	Kecamatan Wonodadi	17.402.800,00	-	-
48	Kecamatan Udanawu	6.625.000,00	-	-
49	Kecamatan Ponggok	695.500,00	-	-
50	Kecamatan Selorejo	17.255.000,00	-	-
51	Kecamatan Kesamben	22.640.000,00	-	-
52	Kelurahan Tawangsasri	890.000,00	-	-
53	Kelurahah Bence	105.000,00	-	-
54	Kelurahan Kanigoro	18.222.400,00	-	-
55	Kelurahan Kembangarum	90.000,00	-	-
56	Kelurahan Kalipang	2.060.000,00	-	-
57	Kelurahan Jegu	5.812.000,00	-	-
58	Kelurahan Sutojayan	3.922.000,00	-	-
59	Kelurahan Kedungbunder	150.000,00	-	-
60	Kelurahan Wlingi	2.395.000,00	-	-
61	Kelurahan Beru	2.064.000,00	-	-
62	Kelurahan Tangkil	480.000,00	-	-
63	Kelurahan Klemunan	11.138.480,00	-	-
64	Kelurahan Babadan	225.263.000,00	-	-
65	Kelurahan Talun	9.656.000,00	-	-
66	Kelurahan Kaweron	460.000,00	-	-
67	Kelurahan Kauman	1.120.000,00	-	-
68	Kelurahan Dandong	2.628.000,00	-	-
69	Kelurahan Srengat	5.834.000,00	-	-
70	Kelurahan Togokan	22.590.437,50	-	-
71	Kelurahan Kademangan	22.500.000,00	-	-
TOTAL		56.506.578.064,71	56.190.718.020,00	0,56



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Lain-Lain sebesar Rp56.506.578.064,71 berupa aset dihibahkan sebesar Rp41.122.139.577,00 dan aset rusak sebesar Rp15.384.438.487,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014

No	SKPD	HIBAH (Rp)	RUSAK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.647.856.720,00	-	7.647.856.720,00
2	Dinas Kesehatan	-	141.329.985,00	141.329.985,00
3	RSUD	-	8.345.526.885,51	8.345.526.885,51
4	Dinas PU Bina Marga	15.181.721.100,00	32.759.000,00	15.214.480.100,00
5	Dinas PU Cipta Karya	13.035.425.200,00	-	13.035.425.200,00
6	Bappeda	-	17.341.000,00	17.341.000,00
7	Dinas Perhubungan	-	-	-
8	Badan Lingkungan Hidup	-	32.717.000,00	32.717.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Capil	-	181.321.843,34	181.321.843,34
10	Badan PPKB	-	65.547.619,40	65.547.619,40
11	Dinas Sosial	-	1.250.000,00	1.250.000,00
12	Dinas Nakertrans	-	36.721.800,00	36.721.800,00
13	Dinas Koperasi dan UMKM	-	16.936.800,00	16.936.800,00
14	Disporbudpar	-	236.548.610,00	236.548.610,00
15	Badan Kesbangpol	-	67.248.000,00	67.248.000,00
16	BPBD	-	55.332.800,00	55.332.800,00
17	Satpol PP	-	-	-
18	Sekretariat Daerah	-	500.483.200,00	500.483.200,00
	- Bagian Pemerintahan	-	29.450.000,00	29.450.000,00
	- Bagian Hukum	-	-	-
	- Bagian Kesra	-	-	-
	- Bagian Pembangunan	-	-	-
	- Bagian Perekonomian	-	-	-
	- Bagian Organisasi	-	-	-
	- Bagian Umum	-	469.458.200,00	469.458.200,00
	- Bagian Humas dan Protokol	-	1.575.000,00	1.575.000,00
19	Sekretariat DPRD	-	30.010.000,00	30.010.000,00
20	BPKAD	-	4.872.000,00	4.872.000,00
21	Inspektorat	-	9.220.000,00	9.220.000,00
22	BKD	-	315.541.000,00	315.541.000,00
23	KPTSP	-	56.693.125,00	56.693.125,00
24	Dinas Pendapatan	-	874.300,00	874.300,00
25	Kantor Ketahanan Pangan	-	533.288.000,00	533.288.000,00
26	Bapemas	317.129.000,00	-	317.129.000,00
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip	-	-	-
28	Dinas Pertanian	4.312.913.302,00	2.908.620.278,96	7.221.533.580,96
29	Dinas Peternakan	556.500.000,00	230.636.940,00	787.136.940,00
30	BP4K	-	16.586.000,00	16.586.000,00
31	Dinas Hutbun	-	70.622.448,00	70.622.448,00
32	Dinas Kelautan Perikanan	70.594.255,00	170.298.955,00	240.893.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	HIBAH (Rp)	RUSAK (Rp)	JUMLAH (Rp)
33	Disperindag	-	53.018.800,00	53.018.800,00
34	Kecamatan Selopuro	-	10.070.000,00	10.070.000,00
35	Kecamatan Wlingi	-	7.547.500,00	7.547.500,00
36	Kecamatan Talun	-	59.940.000,00	59.940.000,00
37	Kecamatan Gandusari	-	-	-
38	Kecamatan Doko	-	2.270.000,00	2.270.000,00
39	Kecamatan Garum	-	2.583.000,00	2.583.000,00
40	Kecamatan Kanigoro	-	6.564.000,00	6.564.000,00
41	Kecamatan Sutojayan	-	3.691.480,00	3.691.480,00
42	Kecamatan Binangun	-	1.510.000,00	1.510.000,00
43	Kecamatan Wates	-	68.387.000,00	68.387.000,00
44	Kecamatan Panggungrejo	-	11.213.000,00	11.213.000,00
45	Kecamatan Wonotirto	-	210.000,00	210.000,00
46	Kecamatan Bakung	-	47.537.500,00	47.537.500,00
47	Kecamatan Kademangan	-	8.570.000,00	8.570.000,00
48	Kecamatan Sanankulon	-	616.075.000,00	616.075.000,00
49	Kecamatan Srengat	-	4.925.000,00	4.925.000,00
50	Kecamatan Wonodadi	-	17.402.800,00	17.402.800,00
51	Kecamatan Udanawu	-	6.625.000,00	6.625.000,00
52	Kecamatan Ponggok	-	695.500,00	695.500,00
53	Kecamatan Nglegok	-	-	-
54	Kecamatan Selorejo	-	17.255.000,00	17.255.000,00
55	Kecamatan Kesamben	-	22.640.000,00	22.640.000,00
56	Kelurahan Garum	-	-	-
57	Kelurahan Tawangasari	-	890.000,00	890.000,00
58	Kelurahan Sumberdiren	-	-	-
59	Kelurahan Bence	-	105.000,00	105.000,00
60	Kelurahan Kanigoro	-	18.222.400,00	18.222.400,00
61	Kelurahan Satriyan	-	-	-
62	Kelurahan Kembangarum	-	90.000,00	90.000,00
63	Kelurahan Jingglong	-	-	-
64	Kelurahan Kalipang	-	2.060.000,00	2.060.000,00
65	Kelurahan Jegu	-	5.812.000,00	5.812.000,00
66	Kelurahan Sukorejo	-	-	-
67	Kelurahan Sutojayan	-	3.922.000,00	3.922.000,00
68	Kelurahan Kedungbunder	-	150.000,00	150.000,00
69	Kelurahan Wlingi	-	2.395.000,00	2.395.000,00
70	Kelurahan Beru	-	2.064.000,00	2.064.000,00
71	Kelurahan Tangkil	-	480.000,00	480.000,00
72	Kelurahan Klemunan	-	11.138.480,00	11.138.480,00
73	Kelurahan Babadan	-	225.263.000,00	225.263.000,00
74	Kelurahan Talun	-	9.656.000,00	9.656.000,00
75	Kelurahan Bajang	-	-	-
76	Kelurahan Kaweron	-	460.000,00	460.000,00
77	Kelurahan Kamulan	-	-	-
78	Kelurahan Kauman	-	1.120.000,00	1.120.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	HIBAH (Rp)	RUSAK (Rp)	JUMLAH (Rp)
79	Kelurahan Dandong	-	2.628.000,00	2.628.000,00
80	Kelurahan Srengat	-	5.834.000,00	5.834.000,00
81	Kelurahan Togokan	-	22.590.437,50	22.590.437,50
82	Kelurahan Kademangan	-	22.500.000,00	22.500.000,00
83	Kelurahan Nglegok	-	-	-
TOTAL		41.122.139.577,00	15.384.438.487,71	56.506.578.064,71

Saldo Aset Lain-Lain – Aset yang Dihibahkan termasuk:

- a) Aset hasil pengadaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp25.940.418.417,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 33. Daftar Aset Lain-Lain berupa Barang yang Sudah Diserahkan
pada Masyarakat

No	SKPD	Hibah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	7.647.856.720,00	Hasil pengadaan yang diserahkan kepada masyarakat
2	DPUCKTR	13.035.425.200,00	Pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi TA 2010.
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	317.129.000,00	Alat besar, alat bengkel, alat pertanian, mesin jahit dan bangunan irigasi pengadaan tahun 2010.
4	Dinas Pertanian	4.312.913.302,00	Bangunan, irigasi pengadaan tahun 2007-2010.
5	Dinas Peternakan	556.500.000,00	Ternak sapi pengadaan tahun 1999, 2000, dan 2004
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.594.255,00	Alat besar dan alat pertanian
Jumlah		25.940.418.477,00	

- b) Aset Lain-Lain yang akan dihibahkan sebesar Rp15.181.721.100,00 pada DPU Bina Marga dan Pengairan. Aset tersebut adalah jalan dalam lingkungan Kabupaten Blitar yang diperoleh dari kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2011. Kegiatan tersebut merupakan pembangunan/peningkatan jalan yang akan diserahkan kepada masyarakat, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum diserahkan kepada masyarakat.

Untuk perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal tahun 2014 terdapat Aset Tetap di bawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset Tetap di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok Aset Tetap dan digolongkan dalam daftar aset di bawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstrakomptabel) dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 34. Daftar Perolehan Aset Tetap Di Bawah Batasan Minimal Kapitalisasi Aset
(Ekstrakomptabel)
Periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Aset	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.235.000,00
2	Dinas Kesehatan	Alat Ukur Lainnya	200.000,00
		Alat Dapur	500.000,00
		Alat Kedokteran Umum	39.572.000,00
		Alat Farmasi	119.883.870,00
		<i>Jumlah</i>	<i>160.155.870,00</i>
3	RSUD	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	55.000,00
		Alat Kedokteran Umum	12.029.740,00
		Alat Kedokteran Gigi	110.000,00
		Alat Kedokteran Keluarga Berencana	231.000,00
		Alat Kedokteran Bedah	954.000,00
		Alat Kesehatan Anak	742.500,00
		Alat Laboratorium Umum	275.000,00
		Alat Laboratorium Immunologi	864.000,00
		Alat Laboratorium Hematologi	220.000,00
		Alat Laboratorium Proses Pengelolaan Panas	495.000,00
		Alat Laboratorium Kearsipan	451.000,00
		Alat Laboratorium Lainnya	220.000,00
		Alat Perlindungan	1.650.000,00
		<i>Jumlah</i>	<i>18.297.240,00</i>
4	Dinas PU Bina Marga	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	354.514.000,00
5	Dinas Perhubungan Kominfo	Alat Kantor Lainnya	975.000,00
6	Sekretariat DPRD	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.461.000,00
		Rambu Tidak Bersuar	1.776.500,00
		<i>Jumlah</i>	<i>8.237.500,00</i>
7	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Umum	9.898.380,00
		Agama	1.250.400,00
		Geografi, Biografi, Sejarah	6.400.440,00
		Matematika	7.540.860,00
		Ilmu Pengetahuan Praktis	10.766.800,00
		<i>Jumlah</i>	<i>35.856.880,00</i>
8	Dinas Pertanian	Alat Laboratorium Pertanian	31.110.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Aset	Nominal (Rp)
		Barang Habis Pakai	30.112.000,00
		<i>Jumlah</i>	<i>61.222.000,00</i>
9	Dinas Hutbun	Alat Laboratorium Pertanian	7.062.500,00
10	Dinas Kelautan Perikanan	Binatang Ikan	75.000.000,00
11	Kecamatan Wlingi	Meubelair	2.750.000,00
12	Kecamatan Doko	Meubelair	3.750.000,00
		Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00
		<i>Jumlah</i>	<i>13.750.000,00</i>
13	Kecamatan Sutojayan	Alat Dapur	2.915.000,00
14	Kecamatan Binangun	Rambu Tidak Bersuar	5.300.000,00
15	Kecamatan Kademangan	Peralatan Jaringan	550.000,00
16	Kecamatan Sanankulon	Alat Pendingin	1.000.000,00
17	Kecamatan Ponggok	Meubelair	6.500.000,00
18	Kecamatan Selorejo	Meubelair	3.975.000,00
19	Kelurahan Sumberdiren	Meubelair	3.750.000,00
20	Kelurahan Kembangarum	Meubelair	5.000.000,00
21	Kelurahan Kalipang	Jaringan Distribusi	2.300.000,00
22	Kelurahan Sutojayan	Meubelair	8.500.000,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.260.000,00
		<i>Jumlah</i>	<i>12.760.000,00</i>
23	Kelurahan Talun	Tugu Peringatan Lainnya	9.750.000,00
24	Kelurahan Kauman	Meubelair	6.500.000,00
		Jaringan Distribusi	1.900.000,00
		<i>Jumlah</i>	<i>8.400.000,00</i>
25	Kelurahan Togogan	Meubelair	12.000.000,00
26	Kelurahan Kademangan	Meubelair	3.000.000,00
TOTAL			818.255.990,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4.5.1.2. Kewajiban	6.848.559.314,46	1.706.730.645,46

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp6.848.559.314,46 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Kewajiban Jangka Pendek	6.848.559.314,46	1.706.730.645,46

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per 31



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Desember 2014 sebesar Rp6.848.423.052,00 dan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.706.730.645,46. Jumlah Utang Jangka Pendek tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Utang PFK sebesar Rp136.262,46 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	2014	2013
1)	RSU Wlingi	0,00	5.381.428,00
2)	BPKAD	136.262,46	16.780.944,46
Jumlah utang		136.262,46	22.162.372,46

Utang Jangka Pendek pada BPKAD sebesar Rp136.262,46 merupakan Utang Penerimaan PFK yang sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum disetorkan ke kas negara.

- 2) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp6.848.423.052,00 merupakan utang yang dimiliki RSUD “Ngudi Waluyo” dan Dinas Pendapatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
1)	RSUD Ngudi Waluyo	3.382.841.761,00
2)	Dinas Pendapatan	3.465.581.291,00
Jumlah utang		6.848.423.052,00

Utang Jangka Pendek sebesar Rp3.382.841.761,00,00 merupakan utang yang dimiliki RSUD “Ngudi Waluyo” dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya RSUD Ngudi Waluyo per 31 Desember 2014

No	Uraian Utang	Nilai (Rp)
a)	Utang Pegawai	1.192.216.084,00
b)	Utang Pihak Ke III	2.124.695.417,00
c)	Utang SPJ 2014	65.930.260,00
Jumlah Hutang		3.382.841.761,00

Utang Pegawai RSUD sebesar Rp1.192.216.084,00 merupakan Belanja Jasa Pelayanan dan uang lembur yang belum dibayarkan per 31 Desember 2014.

Utang Pihak Ke III sebesar Rp2.124.695.417,00 merupakan utang kepada pihak ketiga berupa utang obat, alat kesehatan dan utang pihak ketiga lainnya yang belum dibayarkan per 31 Desember 2014.

Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp3.465.581.291,00 merupakan utang pada Dinas Pendapatan yang terdiri dari:

- a. Belanja Penerangan Jalan Umum (PJU) bulan Desember 2014 sebesar Rp1.274.310.620,00 yang dibayarkan pada 21 Januari 2015;
- b. Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa TA 2013 sebesar Rp331.161.219,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa TA 2013;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa TA 2014 sebesar Rp1.860.109.452,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2014.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4.5.1.3. Ekuitas Dana	3.382.873.442.275,56	2.872.449.693.077,64

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.382.873.442.275,56 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Ekuitas Dana Lancar	342.920.130.460,41	238.167.954.661,30

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan utang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp342.920.130.460,41 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Rincian Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	225.163.176.125,00
(2)	Cadangan Piutang	85.202.063.308,02
(3)	Cadangan Persediaan	39.392.274.053,39
(4)	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(6.848.423.052,00)
(5)	Pendapatan yang Ditangguhkan	11.040.026,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		342.920.130.460,41

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Ekuitas Dana Investasi	3.029.779.519.605,15	2.632.281.738.416,34

Saldo akun ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.029.779.519.605,15 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 39. Rincian Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014

No	Uraian	Nilai (Rp)
(1)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	17.802.609.419,70
(2)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.951.874.345.718,10
(3)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	60.102.564.467,35
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		3.029.779.519.605,15

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
c. Ekuitas Dana Cadangan	10.173.792.210,00	2.000.000.000,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp10.173.792.210,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4.5.2.1. Pendapatan	1.927.712.093.449,89	1.604.229.567.580,37

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2014 serta realisasi Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut.

Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah 2014 dan Realisasi 2013

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a.	Pendapatan Asli Daerah	167.268.618.919,00	188.827.430.090,89	115.670.863.817,37
b.	Pendapatan Transfer	1.632.271.309.971,00	1.625.297.146.359,00	1.436.838.818.763,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	78.718.767.000,00	113.587.517.000,00	51.719.885.000,00
	Jumlah	1.878.258.695.890,00	1.927.712.093.449,89	1.604.229.567.580,37

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah	188.827.430.090,89	115.670.863.817,37

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar selama TA 2014 terealisasi sebesar Rp188.827.430.090,89, lebih tinggi jika dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp115.670.863.817,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Pendapatan Pajak Daerah	41.226.372.150,00	47.934.618.068,60	21.856.652.834,50
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	27.177.787.214,00	23.965.271.566,00	20.565.238.381,72
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.694.048.967,00	2.012.683.600,95	1.573.086.737,30
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	96.170.410.588,00	114.914.856.855,34	71.675.885.863,85
	Jumlah	167.268.618.919,00	188.827.430.090,89	115.670.863.817,37

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1) Pajak Daerah	47.934.618.068,60	21.856.652.834,50

Pajak Daerah merupakan unsur PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Blitar dikelola oleh Dinas Pendapatan. Realisasi selama TA 2014 sebesar Rp47.934.618.068,60 lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp21.856.652.834,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Pajak Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Pajak Hotel	47.190.000,00	52.355.000,00	43.505.000,00
b)	Pajak Restoran	435.118.000,00	636.507.224,00	738.987.903,00
c)	Pajak Hiburan	36.710.950,00	38.150.000,00	41.589.750,00
d)	Pajak Reklame	410.235.200,00	435.004.724,00	400.293.127,50
e)	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	20.818.681.327,00	17.853.630.488,00
f)	Pajak Parkir	24.000.000,00	25.788.500,00	23.630.000,00
g)	Pajak Air Tanah	46.000.000,00	54.188.734,00	42.363.957,00
h)	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	502.118.000,00	571.761.250,00	288.815.750,00
i)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.000.000.000,00	20.350.877.529,60	0,00
j)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.725.000.000,00	4.951.303.780,00	2.423.836.859,00
Jumlah		41.226.372.150,00	47.934.618.068,60	21.856.652.834,50

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
2) Retribusi Daerah	23.965.271.566,00	20.565.238.381,72

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi selama TA 2014 sebesar Rp23.965.271.566,00 lebih tinggi daripada realisasi TA 2013 sebesar Rp20.565.238.381,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi	
			2014	2013
a)	Retribusi Jasa Umum	22.453.413.103,00	18.688.149.397,00	15.775.507.130,72
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.820.090.880,00	5.771.268.500,00	2.688.212.175,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	180.065.000,00	164.215.100,00	142.526.300,00
	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	150.000.000,00	981.455.000,00	2.161.852.500,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.635.951.000,00	6.579.020.000,00	6.195.065.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.692.104.600,00	2.702.412.000,00	2.358.469.100,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	851.845.000,00	991.952.500,00	940.842.500,00
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	18.480.000,00	18.675.000,00	18.675.000,00
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.104.876.623,00	1.479.151.297,00	1.269.864.555,72



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2014	Realisasi	
		(Rp)	2014	2013
b)	Retribusi Jasa Usaha	4.062.731.060,00	4.359.074.736,00	4.088.017.360,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	698.202.700,00	698.938.930,00	691.017.660,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	14.553.000,00	14.000.000,00	14.700.000,00
	Retribusi Terminal	142.941.000,00	159.205.000,00	163.852.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	11.664.000,00	48.230.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	94.170.000,00	88.056.000,00	85.422.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.130.666.250,00	1.476.713.000,00	1.097.776.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	58.867.300,00
	Retribusi Rumah Dinas	55.296.250,00	81.261.056,00	52.517.600,00
	Retribusi Gedung Serba Guna	35.052.000,00	46.385.000,00	36.135.000,00
	Retribusi Tanah dan Bangunan	88.481.250,00	102.669.000,00	409.708.200,00
	Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok	1.715.668.610,00	1.602.682.750,00	1.418.691.600,00
	Retribusi Stadion	7.700.000,00	2.500.000,00	6.100.000,00
c)	Retribusi Perizinan Tertentu	661.643.051,00	918.047.433,00	701.713.891,00
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	401.332.711,00	637.510.586,00	424.587.522,00
	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00
	Retribusi Ijin Gangguan	251.594.340,00	274.396.847,00	267.223.369,00
	Retribusi Ijin Trayek	4.716.000,00	3.240.000,00	4.878.000,00
	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.900.000,00	2.900.000,00	2.025.000,00
Jumlah		27.177.787.214,00	23.965.271.566,00	20.565.238.381,72

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2014	TA 2013
(Rp)	(Rp)

2.012.683.600,95	1.573.086.737,30
-------------------------	-------------------------

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Realisasi selama TA 2014 sebesar Rp2.012.683.600,95 lebih tinggi dari TA 2013 yaitu sebesar Rp439.596.863,65. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2014 dan TA 2013

No	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	PD Savitri Indah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
b)	BPD Jatim	2.100.000.000,00	1.603.948.600,95	1.569.586.737,30
c)	PT BPR Jatim	4.500.000,00	3.735.000,00	3.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
d)	BPR Hambangun Artha Selaras	514.548.967,00	330.000.000,00	0,00
Jumlah		2.694.048.967,00	2.012.683.600,95	1.573.086.737,30

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4) Lain-lain PAD yang Sah	114.914.856.855,34	71.675.885.863,85

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2014 sebesar Rp114.914.856.855,34 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp71.572.627.463,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	494.848.400,00	104.018.100,00	81.727.400,00
b)	Penerimaan jasa giro	1.763.793.850,00	3.053.110.065,17	2.248.535.821,18
c)	Penerimaan bunga deposito	10.798.609.782,00	19.446.411.878,50	14.287.305.782,37
d)	TGR	1.168.938.300,00	147.059.627,00	194.344.088,00
e)	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	559.081.352,00	345.834.667,67	539.019.828,15
f)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	110.940.800,00
g)	Pendapatan dari pengembalian	3.196.854.204,00	7.390.617.009,00	4.742.220.702,15
h)	Fasilitas sosial dan umum	34.046.000,00	36.196.000,00	34.231.000,00
i)	Pendapatan bunga dari pemberian pinjaman	0,00	11.006.398,00	13.103.125,00
j)	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	99.000.000,00	0,00	0,00
k)	Pendapatan dari Badan Layanan Umum	62.710.000.000,00	69.225.110.110,00	49.424.457.317,00
l)	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.345.528.700,00	15.155.493.000,00	0,00
Jumlah		96.170.410.588,00	114.914.856.855,34	71.675.885.863,85

- Realisasi Pendapatan dari penerimaan jasa giro sebesar Rp3.053.110.065,17 sudah termasuk pendapatan jasa giro RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi (BLUD) sebesar Rp380.760.031,00;
- Realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum sejumlah Rp69.225.110.110,00 merupakan pendapatan operasional BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp15.155.493.000,00 merupakan pendapatan yang diterima FKTP berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar sesuai data dari BPJS Kesehatan.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
b. Pendapatan Transfer	1.625.297.146.359,00	1.436.838.818.763,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan realisasi dalam TA 2014 sebesar Rp1.625.297.146.359,00 sebagai berikut.

Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.163.819.958.492,00	1.161.109.878.332,00	1.088.237.985.072,00
2)	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	340.311.384.000,00	341.876.688.000,00	276.727.595.500,00
3)	Transfer Pemerintah Provinsi	128.139.967.479,00	122.310.580.027,00	71.873.238.191,00
Jumlah		1.632.271.309.971,00	1.625.297.146.359,00	1.436.838.818.763,00

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1) Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.161.109.878.332,00	1.088.237.985.072,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2014 sebesar Rp1.161.109.878.332,00 sebagai berikut.

Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Dana Bagi Hasil Pajak	25.740.707.239,00	27.764.546.810,00	45.036.592.116,00
b)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39.410.434.253,00	34.676.514.522,00	28.581.290.956,00
c)	Dana Alokasi Umum	1.027.251.687.000,00	1.027.251.687.000,00	944.297.542.000,00
d)	Dana Alokasi Khusus	71.417.130.000,00	71.417.130.000,00	70.322.560.000,00
Jumlah		1.163.819.958.492,00	1.161.109.878.332,00	1.088.237.985.072,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	341.876.688.000,00	276.727.595.500,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya meliputi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian, dengan realisasi dalam TA 2014 sebesar Rp341.876.688.000,00 sebagai berikut.

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
b)	Dana Penyesuaian	340.311.384.000,00	341.876.688.000,00	276.727.595.500,00
Jumlah		340.311.384.000,00	341.876.688.000,00	276.727.595.500,00

Realisasi Dana Penyesuaian sebesar Rp341.876.688.000,00 terdiri dari:

- (1) Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp340.037.604.000,00
- (2) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp273.780.000,00;
- (3) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) sebesar Rp1.565.304.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Transfer Pemerintah Provinsi	122.310.580.027,00	71.873.238.191,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2014 sebesar Rp122.310.580.027,00 sebagai berikut.

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.008.253.982,00	121.877.736.579,00	71.399.808.284,00
b)	Pendapatan bagi Hasil Lainnya	131.713.497,00	432.843.448,00	473.429.907,00
Jumlah		128.139.967.479,00	122.310.580.027,00	71.873.238.191,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2014 sebesar Rp121.877.736.579,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2014

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.424.278.702,00	35.815.457.282,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.075.592.491,00	31.430.032.446,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.184.325.794,00	31.690.994.602,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	861.786.603,00	874.512.587,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	27.462.270.392,00	22.066.739.662,00
Jumlah		128.008.253.982,00	121.877.736.579,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	113.587.517.000,00	51.719.885.000,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2014 sebesar Rp113.587.517.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur)	78.718.767.000,00	113.587.517.000,00	51.719.885.000,00
		78.718.767.000,00	113.587.517.000,00	51.719.885.000,00

Anggaran Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur) sebesar Rp78.718.767.000,00 tersebut belum termasuk Penambahan Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur) sebesar Rp35.107.250.000,00.

Anggaran Pendapatan Lainnya menjadi sebesar Rp113.826.017.000,00 sesuai Peraturan Bupati Blitar No. 35 Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Anggaran dan realisasi atas Pendapatan tersebut dirinci sebagai berikut.

Tabel 52. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2014

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Peningkatan Pendidikan		
(1)	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	6.180.000.000,00	6.180.000.000,00
(2)	BOP MADIN	80.000.000,00	80.000.000,00
(3)	BKSM Jenjang SLTA	1.053.000.000,00	1.053.000.000,00
(4)	Lembaga terpencil/kepulauan	75.000.000,00	75.000.000,00
(5)	Kantin Kejuruan TK/SD dan PK	7.405.000,00	7.405.000,00
(6)	Kantin Kejuruan SMP dan SMA	10.000.000,00	10.000.000,00
(7)	Sekolah Standar Nasional (SSN)	150.000.000,00	150.000.000,00
(8)	Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	500.000.000,00	500.000.000,00
(9)	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	7.500.000,00	7.500.000,00
(10)	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(11)	Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	15.000.000,00	15.000.000,00
(12)	Alat Kesenian	100.000.000,00	100.000.000,00
b)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
(1)	Peningkatan Fungsi Polindes Menjadi Poskesdes	229.500.000,00	306.000.000,00
(2)	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS	36.900.000,00	49.200.000,00
(3)	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar	55.350.000,00	73.800.000,00
(4)	Pengembangan Taman Posyandu	80.712.000,00	80.712.000,00
(5)	Pemberian Makanan Tambahan	42.000.000,00	42.000.000,00
c)	Percepatan Pengembangan Perekonomian Daerah		
(1)	Pengadaan Alat Ubinan Untuk Petugas Mantri Tani di 22 Kecamatan	26.400.000,00	26.400.000,00
(2)	Pembangunan Pasar Desa di Bapemas	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
(3)	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur pada Kantor Ketahanan Pangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
d)	Percepatan Pembangunan Infrastruktur		
(1)	Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	31.400.000.000,00	31.400.000.000,00
(2)	Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Drainase Perdesaan	12.500.000.000,00	26.000.000.000,00
(3)	Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
(4)	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	15.600.000.000,00	15.600.000.000,00
(4)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengairan	0,00	11.500.000.000,00
(5)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kebinamargaan	0,00	10.000.000.000,00
e)	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke 69 Tahun 2014	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah	78.718.767.000,00	113.826.017.000,00

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4.5.2.2. Belanja	1.803.200.913.471,44	1.637.252.053.174,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. TA 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri atas 83 SKPD yang masing-masing merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
a. Belanja Operasi	1.363.044.753.326,44	1.300.295.938.835,00

Belanja Operasi Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan realisasi TA 2014 Rp1.363.044.753.326,44 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2014 dan Realisasi Tahun 2013

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Belanja Pegawai	1.144.359.223.984,63	1.016.728.197.141,00	959.366.258.673,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	261.337.704.887,92	221.573.412.648,00	175.187.970.862,00
3)	Belanja Bunga	9.721.202,44	9.721.202,44	0,00
4)	Belanja Hibah	129.197.073.339,11	120.549.512.335,00	115.570.028.800,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	3.878.000.000,00	3.348.000.000,00	3.721.361.000,00
6)	Belanja Bantuan Keuangan	835.910.000,00	835.910.000,00	46.450.319.500,00
Jumlah		1.539.617.633.414,10	1.363.044.753.326,40	1.300.295.938.835,00

Adapun rincian dari tabel diatas dijelaskan sebagai berikut.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1) Belanja Pegawai	1.016.728.197.141,00	959.366.258.673,00

Pada TA 2014, Belanja Pegawai pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp1.016.728.197.141,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.000.406.700.457,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp16.321.496.684,00.

Tabel 54. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Belanja Tidak Langsung	1.125.915.188.884,63	1.000.406.700.457,00	919.879.058.336,00
	Gaji dan Tunjangan	708.760.280.265,93	670.073.406.490,00	658.338.584.067,00
	Tambahan Penghasilan PNS	409.549.355.194,00	323.080.265.989,00	254.219.935.870,00
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.633.600.000,00	4.538.060.000,00	4.134.300.000,00
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	1.520.194.930,00
	Insentif Pemungutan Pajak daerah	2.061.318.608,00	2.057.332.841,00	926.243.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	910.634.816,70	657.635.137,00	739.800.469,00
b)	Belanja Langsung	18.444.035.100,00	16.321.496.684,00	39.487.200.337,00
	Honorarium PNS	13.275.028.500,00	12.035.441.250,00	12.033.843.750,00
	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	3.926.841.000,00
	Uang Lembur	1.620.267.600,00	1.483.063.000,00	996.242.000,00
	Honorarium Pengelolaan BLUD	3.100.000.000,00	2.374.692.434,00	22.166.608.587,00
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	448.739.000,00	428.300.000,00	363.665.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		1.144.359.223.984,63	1.016.728.197.141,00	959.366.258.673,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
2) Belanja Barang dan Jasa	221.573.412.648,00	175.187.970.862,00

Pada TA 2014, Belanja Barang dan Jasa pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp221.573.412.648,00 yang terdiri dari Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Langsung			
a)	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.444.686.473,63	7.803.603.806,00	6.944.273.186,00
b)	Belanja Bahan/Material	9.655.202.189,00	7.241.658.623,00	6.120.038.366,00
c)	Belanja Jasa Kantor	72.676.567.252,15	63.919.137.474,00	47.944.215.938,00
d)	Belanja Premi Asuransi	121.450.000,00	111.450.000,00	198.500.000,00
e)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.690.638.463,00	2.824.219.653,00	2.475.828.621,00
f)	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.459.949.571,00	9.264.080.354,00	8.724.702.171,00
g)	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.526.701.500,00	3.056.080.012,00	2.796.589.628,00
h)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	570.771.200,00	517.956.000,00	544.572.000,00
i)	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.573.296.869,00	1.379.692.250,00	2.043.779.000,00
j)	Belanja Makanan dan Minuman	17.556.254.600,00	10.874.634.804,00	10.565.554.950,00
k)	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.436.311.000,00	3.873.672.600,00	758.907.550,00
l)	Belanja Pakaian Kerja	1.091.355.000,00	668.811.500,00	533.399.500,00
m)	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.043.899.900,00	3.786.740.000,00	4.015.725.500,00
n)	Belanja Perjalanan Dinas	39.381.899.438,00	31.457.700.233,00	34.421.592.807,00
o)	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	74.000.000,00
p)	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.825.119.386,00	4.327.478.100,00	2.750.630.618,00
q)	Belanja Pemeliharaan	4.350.565.304,14	3.579.227.731,00	8.224.443.049,00
r)	Belanja Jasa Konsultasi	10.924.060.090,00	9.510.728.800,00	11.437.289.150,00
s)	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	1.314.500.000,00	1.217.700.000,00	822.250.000,00
t)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	56.413.631.652,00	53.258.665.708,00	20.898.553.828,00
u)	Belanja Transport Lokal Non PNS	3.280.845.000,00	2.900.175.000,00	2.893.125.000,00
	Jumlah Belanja Langsung - Barang dan Jasa	261.337.704.887,92	221.573.412.648,00	175.187.970.862,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
3) Belanja Bunga	9.721.202,44,00	0,00

Pada TA 2014, Belanja Bunga pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp9.721.202,44 yang merupakan pembayaran bunga atas Pinjaman kepada IBRD No. SLA-1019/DP3/1998 Tanggal 7 Januari 1998. Pinjaman IBRD merupakan Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jawa Timur dalam rangka penggunaan dana dari *International Bank For Reconstruction And Development* (Loan Agreement Nomor: 4017-IND tanggal 23 September 1996) untuk pembiayaan *Second East Java Urban Development Project*. Adapun perhitungan bunga (denda bunga pinjaman) sebagai berikut.

<i>Jenis Tunggalan</i>	Jumlah Tunggakan	Jatuh Tempo	Denda s/d	Hari Denda	Jumlah Denda
Saldo Denda sebelumnya					1.073.762,50
Pokok	20.598.042,56	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	4.201.142,49
Pokok	20.598.042,56	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	4.201.142,49
Pokok	16.772.005,26	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	3.420.790,24
Jasa Bank	118.770,82	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	24.224,30
Bunga	5.463.457,75	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	1.114.317,74
Jasa Bank	74.070,34	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	15.107,26
Bunga	3.407.235,57	7 Juli 2008	23 Des 2009	534	694.934,09
Jumlah Denda					13.671.658,61
Total Denda (Saldo Denda+Jumlah Denda)					14.745.421,11
Pembayaran Denda					
	Tanggal Pembayaran				Jumlah Bayar
					31 Desember 2006
					1.073.762,50
					23 Desember 2009
					3.950.456,17
	Jumlah Denda Yang Telah Dibayar				5.024.218,67
	Jumlah Denda Yang Masih Harus Dibayar (Total Denda-Jumlah Denda Yang Telah Dibayar)				9.721.202,44

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4) Belanja Hibah	120.549.512.335,00	115.570.028.800,00

Pada TA 2014, Belanja Hibah pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp120.549.512.335,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut.

Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Belanja Hibah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Tidak Langsung-Belanja Hibah			
a)	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Badan / Lembaga /Organisasi Swasta	30.975.500.000,00	28.191.667.800,00	20.875.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Hibah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa			
b)	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	98.221.573.339,11	92.357.844.535,00	94.694.278.800,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung - Hibah	129.197.073.339,11	120.549.512.335,00	115.570.028.800,00

Belanja Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Barang masing-masing SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, maka di LRA dikonversikan menjadi Belanja Hibah.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
5) Belanja Bantuan Sosial	3.348.000.000,00	3.721.361.000,00

Pada TA 2014, Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp3.348.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 dan Realisasi TA 2013

No	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Tidak Langsung			
a)	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.053.000.000,00	1.053.000.000,00	1.053.000.000,00
b)	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	2.795.000.000,00	2.295.000.000,00	2.668.361.000,00
c)	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung-Bantuan Sosial	3.878.000.000,00	3.348.000.000,00	3.721.361.000,00

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
6) Belanja Bantuan Keuangan	835.910.000,00	46.450.319.500,00

Pada TA 2014, Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp835.910.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 58. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2014

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	835.910.000,00	835.910.000,00	777.469.500,00
	Jumlah	835.910.000,00	835.910.000,00	777.469.500,00

Jumlah Belanja Operasi tersebut termasuk:

- 1) Realisasi belanja operasi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang berasal dari Pendapatan RSUD sebesar Rp55.633.358.142,00. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.374.692.434,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp53.258.665.708,00;
- 2) Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset dan seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal masing-masing sebesar Rp700.000,00 dan Rp442.872.400,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59. Realisasi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa yang Seharusnya Dibebankan Pada Belanja Modal TA 2014

No	Nama SKPD	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)
(a)	Dinas Pendidikan	-	9.950.000,00
(b)	Dinas Kesehatan	-	0,00
(c)	Rumah Sakit Umum Daerah	-	3.252.400,00
(d)	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	-	150.000.000,00
(e)	Dinas Perhubungan Komunikasi , Informatika	-	185.200.000,00
(f)	Dinas Pendapatan	-	1.870.000,00
(g)	Dinas Kelautan dan Perikanan	700.000,00	-
(h)	Kantor Kel Babadan	-	92.600.000,00
	Jumlah	700.000,00	442.872.400,00

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
b. Belanja Modal	385.260.453.752,00	330.813.083.801,00

Belanja Modal Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dan terealisasi tahun 2014 sebesar Rp385.260.453.752,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 dan Realisasi Tahun 2013

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.501.930.000,00	234.473.500,00	305.906.700,00
	Jumlah 1)	1.501.930.000,00	234.473.500,00	305.906.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
2)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	1.530.130.000,00	1.481.122.000,00	1.097.394.075,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.433.836.400,00	2.637.320.000,00	18.568.229.797,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	286.029.550,00	285.364.550,00	203.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Bengkel	34.800.000,00	34.800.000,00	17.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	64.550.000,00	34.470.000,00	190.554.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	468.533.400,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian	349.776.500,00	244.584.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan	129.834.500,00	128.130.500,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan	175.800.000,00	174.100.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.087.810.000,00	971.290.200,00	631.618.450,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	1.429.573.040,00
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.858.180.743,62	2.438.167.595,00	3.798.066.160,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	401.341.000,00	383.143.880,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	59.570.000,00	56.895.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	494.367.403,00	451.153.500,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	24.450.000,00	15.355.000,00	106.502.450,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	783.600.413,00	755.054.165,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	1.682.271.625,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.412.093.434,00	5.688.148.550,00	7.052.020.286,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	733.612.000,00	688.133.150,00	2.167.281.972,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	357.658.000,00	337.631.400,00	514.042.910,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.662.855.301,00	2.217.815.820,00	4.342.312.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	8.519.932.730,00	7.927.984.950,00	6.687.370.400,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan /Keamanan	32.400.000,00	32.191.500,00	9.981.000,00
	Jumlah 2)	34.432.627.974,62	26.982.855.760,00	48.966.251.565,00
3)	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	99.433.874.911,64	93.651.198.132,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	70.000.000,00	68.600.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	406.550.000,00	405.784.500,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	8.730.847.145,37	7.919.167.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	244.108.700,00	239.977.300,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Rambu - Rambu	719.224.250,00	694.140.250,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)Bangunan	0,00	0,00	92.480.781.133,00
	Belanja Modal Sarana Fasilitas Jalan	0,00	0,00	1.606.295.700,00
	Jumlah 3)	109.604.605.007,01	102.978.867.182,00	94.087.076.833,00
4)	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	126.724.192.124,19	147.601.834.500,00	108.032.247.400,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7.925.000.000,00	7.826.520.200,00	4.481.989.200,00
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	59.774.578.866,63	70.118.652.100	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	52.817.744.800,00
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	3.709.049.000,00	3.388.512.715,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	9.620.262.000,00	9.426.465.340,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	256.844.100,00
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	7.816.629.033,00
	Jumlah 4)	207.753.081.990,82	238.361.984.855,00	173.405.454.533,00
5)	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	7.406.110.100,00	2.818.649.471,00	191.837.600,00
	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	282.650.000,00	276.600.000,00	249.450.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	11.049.000,00	15.599.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	105.500.000,00	75.000.000,00	66.257.500,00
	Jumlah 5)	7.805.309.100,00	3.185.848.471,00	507.545.100,00
6)	Belanja Modal BLUD			
	Belanja Modal BLUD	15.556.659.067,00	13.516.423.984,00	13.540.849.070,00
	Jumlah 6)	15.556.659.067,00	13.516.423.984,00	13.540.849.070,00
7)	Belanja Modal Dana BOS			
	Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 7)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	376.654.213.139,45	385.260.453.752,00	330.813.083.801,00

Jumlah tersebut termasuk:

- 1) Jumlah Belanja Modal sebesar Rp385.260.453.752,00 tersebut termasuk realisasi Belanja Modal RSUD "Ngudi Waluyo" yang berasal dari Pendapatan RSUD "Ngudi Waluyo" sebesar Rp8.189.539.307,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Realisasi Belanja Modal yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp798.973.330, karena bernilai berada di bawah Batasan Minimal Kapitalisasi Aset.

Tabel 61. Realisasi Belanja Modal Di bawah Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No	Nama SKPD	Nominal Rupiah
1	Dinas Pendidikan	3.235.000,00
2	Dinas Kesehatan	160.155.870,00
3	RSUD "Ngudi Waluyo"	18.297.240,00
4	Dinas PU Bina Marga	354.514.000,00
5	Sekretariat DPRD	8.237.500,00
6	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	17.549.220,00
7	Dinas Pertanian	61.222.000,00
8	Dinas Hutbun	7.062.500,00
9	Dinas Kelautan Perikanan	75.000.000,00
10	Kecamatan Wlingi	2.750.000,00
11	Kecamatan Doko	13.750.000,00
12	Kecamatan Sutojayan	2.915.000,00
13	Kecamatan Binangun	5.300.000,00
14	Kecamatan Kademangan	550.000,00
15	Kecamatan Sanankulon	1.000.000,00
16	Kecamatan Ponggok	6.500.000,00
17	Kecamatan Selorejo	3.975.000,00
18	Kelurahan Sumberdiren	3.750.000,00
19	Kelurahan Kembangarum	5.000.000,00
20	Kelurahan Kalipang	2.300.000,00
21	Kelurahan Sutojayan	12.760.000,00
22	Kelurahan Talun	9.750.000,00
23	Kelurahan Kauman	8.400.000,00
24	Kelurahan Togokan	12.000.000,00
25	Kelurahan Kademangan	3.000.000,00
	Jumlah	798.973.330,00

Aset Ekstrakomptabel pada RSUD sebesar Rp18.297.240,00 berasal dari hibah, bukan belanja modal RSUD.

	TA 2014	TA 2013
	(Rp)	(Rp)
c. Belanja Tidak Terduga	2.566.953.857,00	416.768.000,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp8.755.876.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.566.953.857,00 untuk:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Kelud sebesar Rp2.551.077.257,00 ;
- Pengembalian Restitusi Pajak Daerah (BPHTB) Tahun 2013 sebesar Rp15.876.600,00.

	TA 2014	TA 2013
	(Rp)	(Rp)
d. Transfer	52.328.752.536,00	5.726.262.538,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil selama tahun 2014 sebesar Rp52.328.752.536,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62. Anggaran dan Realisasi Transfer/Bagi Hasil
Tahun 2014 dan Realisasi Tahun 2013

No	Transfer/Bagi Hasil	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	4.845.274.430,00	4.289.717.731,00	1.593.961.721,00
2)	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota	0,00	0,00	1.105.482.600,00
3)	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Propinsi (Parkir Berlangganan)	837.222.490,00	837.139.550,00	0,00
4)	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Lembaga/Instansi (Parkir Berlangganan)	322.008.650,00	321.976.750,00	0,00
5)	Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	2.702.778.721,00	2.384.968.505,00	3.026.818.217,00
6)	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	45.097.450.000,00	44.494.950.000,00	0,00
Jumlah		53.804.734.291,00	52.328.752.536,00	5.726.262.538,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp4.289.717.731,00 dan Rp2.384.968.505,00 belum termasuk kurang bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2013 dan TA 2014 sebesar Rp331.161.219,00 dan Rp1.860.109.452,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa TA 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2014

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2014 dikonversi ke Belanja Transfer - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp44.494.950.000,00 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 63. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	26.920.000.000,00
(2)	Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	17.187.950.000,00
(3)	Bantuan Keuangan untuk Pilkades	25.000.000,00
(4)	Bantuan Keuangan Untuk Tali Asih Perangkat Desa	275.000.000,00
(5)	Bantuan Keuangan untuk Kompensasi Sekretaris Desa	87.000.000,00
Total		44.494.950.000,00

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
e. Pembiayaan Netto	100.651.996.146,55	141.596.247.148,18

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi tahun 2014, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah sebagai berikut.

Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2014 dan Realisasi Tahun 2013

No	Pembiayaan	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1)	Penerimaan Pembiayaan	108.573.761.554,55	108.825.788.356,55	143.596.247.148,18
2)	Pengeluaran Pembiayaan	(8.000.000.000,00)	(8.173.792.210,00)	(2.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto		100.573.761.554,55	100.651.996.146,55	141.596.247.148,18

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
1) Penerimaan Pembiayaan	108.825.788.356,55	143.596.247.148,18

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut.

Tabel 65. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014 dan Realisasi Tahun 2013

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	108.573.761.554,55	108.573.761.554,55	142.669.268.568,18
b)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	252.026.802,00	434.533.030,00
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	492.445.550,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		108.573.761.554,55	108.825.788.356,55	143.596.247.148,18



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp252.026.802 ,00 adalah sebagai berikut.

- Pengembalian Piutang Lain-Lain Dinas Peternakan Rp5.000.000,00;
- Pengembalian Piutang Lain-Lain Dinas Perindag Rp229.248.802,00;
- Pengembalian Piutang Lain-Lain KIPP (BP4K) Rp4.000.000,00;
- Pengembalian Piutang Lain-Lain Dana Bank Pasar Rp13.778.000,00.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
2) Pengeluaran Pembiayaan	8.173.792.210,00	2.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut.

Tabel 66. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2014 dan Realisasi 2013

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
a)	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000,00	8.173.792.210,00	2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.000.000.000,00	8.173.792.210,00	2.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar Rp8.173.792.210,00 diperuntukkan sebagai Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Realisasi sebesar Rp8.173.792.210,00 tersebut sebesar Rp8.000.000.000,00 merupakan pengeluaran pokok dana cadangan sedangkan sebesar Rp173.792.210,00 merupakan hasil bunga dana cadangan yang menambah dana cadangan.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	225.163.176.125,00	108.573.761.554,55

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut.

Tabel 67. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013

No	SiLPA	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2014	Tahun 2013
1)	Pendapatan dan Belanja		
a)	Pendapatan	1.927.712.093.449,89	1.604.229.567.580,37
b)	Belanja dan Transfer	(1.803.200.913.471,44)	(1.637.252.053.174,00)
	Surplus/(Defisit) Anggaran (a-b)	124.511.179.978,45	(33.022.485.593,63)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SILPA	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2014	Tahun 2013
2)	Pembiayaan		
a)	Penerimaan Pembiayaan	108.825.788.356,55	143.596.247.148,18
b)	Pengeluaran Pembiayaan	8.173.792.210,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto (a-b)	100.651.996.146,55	141.596.247.148,18
3)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2)	225.163.176.125,00	108.573.761.554,55

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun sebesar Rp225.163.176.125,00 terdiri dari:

1)	Kas Daerah		
	a) Kas Murni	17.621.272.403,80	
	b) Deposito	190.000.000.000,00	
	c) Kas di Bendahara FKTP	5.079.928.639,00	
			212.701.201.042,80
2)	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a) Dispenduk Capil	7.000,00	
	b) Kecamatan Kademangan	2.800.000,00	
	c) Kelurahan Talun	13.700.000,00	
			16.507.000,00
3)	Kas di BLUD		12.445.604.344,66
	Jumlah		225.163.312.387,46
4)	Utang Potongan PFK		(136.262,46)
	Jumlah		225.163.176.125,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2014 dan 2013 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan, sebagai berikut.

Tabel 68. Realisasi Arus Kas Tahun 2014 dan 2013

No	Arus Kas dari:	Tahun 2014	Tahun 2013
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Aktivitas Operasi	495.695.103.631,45	291.295.584.972,71
2	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(376.966.896.345,00)	(325.477.811.331,00)
3	Aktivitas Pembiayaan	(7.747.973.198,00)	(1.073.021.420,00)
4	Aktivitas Non Anggaran	452.517.308,00	(1.494.753.482,54)
5	Kenaikan/Penurunan Kas	111.432.751.396,45	(36.750.001.260,83)
6	Saldo Awal Kas	101.268.449.646,35	138.018.450.907,18
7	Saldo Akhir Kas BUD	212.701.201.042,80	101.268.449.646,35
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	16.507.000,00	659.725.072,31
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	11.040.026,00	14.407.352,00
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	12.445.604.344,66	6.668.013.080,66
11	Saldo Akhir Kas	225.174.352.413,46	108.610.595.151,32

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4.5.3.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	495.695.103.631,45	291.295.584.972,71

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi pada tahun 2014 surplus sebesar Rp495.695.103.631,45 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemkab Blitar dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 69. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2014 dan 2013

Uraian		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
a. Arus Kas Masuk			
1)	Pendapatan Pajak Daerah	47.934.618.068,60	21.856.652.834,50
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	23.965.271.566,00	20.565.238.381,72
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.012.683.600,95	1.573.086.737,30
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.204.968.614,34	21.896.097.664,19
5)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.441.061.332,00	73.617.883.072,00
6)	Dana Alokasi Umum	1.027.251.687.000,00	944.297.542.000,00
7)	Dana Alokasi Khusus	71.417.130.000,00	70.322.560.000,00
8)	Dana Penyesuaian	341.876.688.000,00	276.727.595.500,00
9)	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.310.580.027,00	71.873.238.191,00
10)	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	113.587.517.000,00	51.719.885.000,00
Jumlah a		1.858.002.205.208,89	1.554.449.779.380,71



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
b. Arus Kas Keluar			
1)	Belanja Pegawai	1.014.353.504.707,00	937.199.650.086,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	168.314.746.940,00	154.069.804.484,00
3)	Belanja Bunga	9.721.202,44	0,00
4)	Belanja Hibah	120.549.512.335,00	115.570.028.800,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	3.348.000.000,00	3.721.361.000,00
6)	Belanja Tidak Terduga	2.566.953.857,00	416.768.000,00
7)	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	52.328.752.536,00	5.726.262.538,00
8)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	835.910.000,00	46.450.319.500,00
Jumlah b		1.362.307.101.577,44	1.263.154.194.408,00
Arus Kas bersih (a-b)		495.695.103.631,45	291.295.584.972,71

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada arus kas masuk dari aktivitas operasi di Laporan Arus Kas sebesar Rp45.204.968.614,34 berbeda dengan yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp114.914.856.855,34 sehingga terdapat selisih sebesar Rp69.709.888.241,00 (Rp114.914.856.855,34 – Rp45.204.968.614,34). Perbedaan sebesar Rp69.709.888.241,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Pendapatan BLUD "RSUD Ngudi Waluyo"	Rp 69.605.870.141,00
- Diklasifikasikan dalam arus kas masuk aktivitas investasi Non Keuangan (LAK)	Rp 104.018.100,00
Jumlah	Rp 69.709.888.241,00

Belanja Pegawai pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi disajikan sebesar Rp1.014.353.504.707,00 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebesar Rp1.016.728.197.141,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.374.692.434,00 (Rp1.016.728.197.141,00 – Rp1.014.353.504.707,00). Perbedaan sebesar Rp2.374.692.434,00 tersebut merupakan Belanja Pegawai BLUD RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi.

Belanja Barang dan Jasa pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp168.305.742.599,00 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp221.564.408.307,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp53.258.665.708,00 (Rp221.564.408.307,00 - Rp168.305.742.599,00). Selisih sebesar Rp53.258.665.708,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari kas murni BLUD "RSUD Ngudi Waluyo" Wlingi.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4.5.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(376.966.896.345,00)	(325.477.811.331,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan defisit sebesar Rp376.966.896.345,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masyarakat akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 70. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Tahun 2014 dan 2013

Uraian		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
a. Arus Kas Masuk			
1)	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
2)	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	500.000,00
3)	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	36.690.000,00	12.200.000,00
4)	Penjualan Hasil Kehutanan	0,00	0,00
5)	Penjualan Hasil Perkebunan	67.328.100,00	69.027.400,00
6)	Penjualan Hasil Perikanan	0,00	0,00
	Jumlah a	104.018.100,00	81.727.400,00
b. Arus Kas Keluar			
1)	Belanja Tanah	234.473.500,00	305.906.700,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	26.982.855.760,00	48.966.251.565,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	102.978.867.182,00	94.087.076.833,00
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	238.361.984.855,00	173.405.454.533,00
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.512.733.148,00	8.794.849.100,00
6)	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah b	377.070.914.445,00	325.559.538.731,00
Arus Kas bersih (a-b)		(376.966.896.345,00)	(325.477.811.331,00)

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan di Laporan Arus Kas sebesar Rp377.070.914.445,00 sedangkan pada realisasi Belanja Modal di Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp385.260.453.752,00 sehingga selisih sebesar Rp8.189.539.307,00 (Rp385.260.453.752,00 - Rp377.070.914.445,00). Selisih tersebut merupakan Belanja Modal yang bersumber dari kas murni BLUD "RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi".

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4.5.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(7.921.765.408,00)	(1.073.021.420,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan defisit sebesar (Rp7.747.973.198,00) mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa depan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2014 dan 2013

Uraian		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
a. Arus Kas Masuk			
1)	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2)	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	252.026.802,00	434.533.030,00
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	492.445.550,00
	Jumlah a	252.026.802,00	926.978.580,00
b. Arus Kas Keluar			
1)	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
2)	Pembentukan Dana Cadangan	8.173.792.210,00	2.000.000.000,00
3)	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
	Jumlah b	8.173.792.210,00	2.000.000.000,00
Arus Kas bersih (a-b)		(7.921.765.408,00)	(1.073.021.420,00)

	TA 2014	TA 2013
	(Rp)	(Rp)
4.5.3.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	626.309.518,00	(1.494.753.482,54)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas *netto* yang tidak mempengaruhi anggaran. TA 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penyesuaian penyajian format LAK berdasarkan SAP, hal ini menyebabkan terdapat perbedaan penyajian Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2013 pada Laporan Keuangan TA 2014 dibandingkan Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2013 pada Laporan Keuangan TA 2013.

Penyesuaian pencatatan LAK TA 2014 dan TA 2013 sesuai SAP dirinci sebagai berikut.

Tabel 72. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2014 dan 2013

Uraian		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
a. Arus Kas Masuk			
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
(1)	Potongan IWP, PPH, Taperum, Lain-lain	171.699.697.765,00	154.222.895.833,46
(2)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
(3)	Pengembalian Belanja	0,00	0,00
(4)	Penerimaan Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	659.461.200,00	3.275.700,00
	Jumlah a	172.359.158.965,00	154.226.171.533,46
b. Arus Kas Keluar			
a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
(1)	Potongan IWP, PPH, Taperum, Lain-lain	171.716.342.447,00	155.061.463.816,00
(2)	Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran yang Terlambat Disetor	16.507.000,00	659.461.200,00
	Jumlah b	171.732.849.447,00	155.720.925.016,00
Arus Kas bersih (a-b)		626.309.518,00	(1.494.753.482,54)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Arus Kas Masuk-Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Arus kas Keluar – Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut tidak termasuk pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh fihak ketiga tanpa melalui mekanisme non anggaran.

	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)
4.5.3.5. Posisi Kas	225.174.352.413,46	108.610.595.151,32

Posisi Kas akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp225.174.352.413,46 terdiri dari:

Saldo Akhir Kas BUD	212.701.201.042,80
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	16.507.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	11.040.026,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	12.445.604.344,66
Saldo Akhir Kas	225.174.352.413,46

TA 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penyesuaian penyajian format LAK berdasarkan SAP, hal ini menyebabkan terdapat perbedaan penyajian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2013 pada Laporan Keuangan TA 2014 dibandingkan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2013 pada Laporan Keuangan TA 2013.

Penyesuaian pencatatan LAK TA 2013 sesuai SAP dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 73. Penyesuaian Pencatatan LAK TA 2013 Berdasarkan SAP

No	URAIAN	Saldo TA 2013 (Rp)	Saldo TA 2013 (Penyesuaian SAP) (Rp)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas	1.554.449.779.380,71	1.554.449.779.380,71
3	Arus Keluar Kas	1.263.154.194.408,00	1.263.154.194.408,00
4	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (2-3)	291.295.584.972,71	291.295.584.972,71
5	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
6	Arus Masuk Kas	81.727.400,00	81.727.400,00
7	Arus Keluar Kas	325.559.538.731,00	325.559.538.731,00
8	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (6-7)	(325.477.811.331,00)	(325.477.811.331,00)
9	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
10	Arus Masuk Kas	926.978.580,00	926.978.580,00
11	Arus Keluar Kas	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
12	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (10-11)	(1.073.021.420,00)	(1.073.021.420,00)
13	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
14	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	154.222.895.833,46	154.222.895.833,46
15	Penerimaan Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya		3.275.700,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	154.222.895.833,46	154.226.171.533,46



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	URAIAN	Saldo TA 2013 (Rp)	Saldo TA 2013
17	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.061.463.816,00	155.061.463.816,00
18	Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran yang Terlambat Disetor		659.461.200,00
19	Jumlah Arus Keluar Kas	155.061.463.816,00	155.720.925.016,00
20	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (16-19)	(838.567.982,54)	(1.494.753.482,54)
21			
22	Kenaikan/Penurunan Kas (4+8+12+20)	(36.093.815.760,83)	(36.750.001.260,83)
23	Saldo Awal Kas BUD (Kas BUD TA 2012 + Kas di Bendahara Penerimaan TA 2012)	138.021.726.607,18	
24	Saldo Awal Kas BUD (Saldo Kas BUD TA 2012)		138.018.450.907,18
25	Saldo Akhir Kas (22+23)	101.927.910.846,35	
26	Saldo Akhir Kas BUD TA 2013 (22+24)		101.268.449.646,35
27	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	659.725.072,31	659.725.072,31
28	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		14.407.352,00
29	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		6.668.013.080,66
30	Saldo Akhir Kas (26+27+28+29)		108.610.595.151,32



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.5.4. Penjelasan Perubahan Anggaran

Pada tahun anggaran 2014 terjadi perubahan atas penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blitar No. 35 Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Maka terdapat beberapa SKPD yang mengalami perubahan anggaran baik berupa penambahan dan /atau pengurangan akibat pergeseran:

1. Sub Unit Organisasi 1.02.01.01 Dinas Kesehatan, mengalami perubahan anggaran baik berupa penambahan belanja akibat pergeseran;
2. Sub Unit Organisasi 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, mengalami perubahan anggaran berupa penambahan belanja akibat pergeseran;
3. Sub Unit Organisasi 1.20.05.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mengalami perubahan anggaran berupa penambahan pendapatan akibat pergeseran;

Tabel 74. Pergeseran Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2014

PERGESERAN ANGGARAN	PENAMBAHAN		PROGRAM
	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	
Dinas Kesehatan		107.250.000,00	Peningkatan pelayanan puskesmas
Dinas PU Bina Marga dan Pengairan		10.000.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
		11.500.000.000,00	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		13.500.000.000,00	Pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.107.250.000,00		

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah adanya Perubahan Anggaran dari APBD Perubahan Tahun 2014 disajikan beserta realisasinya sebagai berikut.

Tabel 73. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Setelah Anggaran Perubahan Sampai dengan Desember 2014 dan 2013

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2014	ANGGARAN PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1.878.258.695.890,00	1.913.365.945.890,00	1.927.712.093.449,89	100,75	1.604.229.567.580,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	167.268.618.919,00	167.268.618.919,00	188.827.430.090,89	112,89	115.670.863.817,37



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2014	ANGGARAN PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Pajak Daerah	41.226.372.150,00	41.226.372.150,00	47.934.618.068,60	116,27	21.856.652.834,50
Pendapatan Retribusi Daerah	27.177.787.214,00	27.177.787.214,00	23.965.271.566,00	88,18	20.565.238.381,72
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.694.048.967,00	2.694.048.967,00	2.012.683.600,95	88,18	1.573.086.737,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.170.410.588,00	96.170.410.588,00	114.914.856.855,34	119,49	71.675.885.863,85
PENDAPATAN TRANSFER	1.632.271.309.971,00	1.632.271.309.971,00	1.625.297.146.359,00	99,57	1.436.838.818.763,00
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	1.163.819.958.492,00	1.163.819.958.492,00	1.161.109.878.332,00	99,77	1.088.237.985.072,00
Dana Bagi Hasil Pajak	25.740.707.239,00	25.740.707.239,00	27.764.546.810,00	107,86	45.036.592.116,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39.410.434.253,00	39.410.434.253,00	34.676.514.522,00	87,99	28.581.290.956,00
Dana Alokasi Umum	1.027.251.687.000,00	1.027.251.687.000,00	1.027.251.687.000,00	100,00	944.297.542.000,00
Dana Alokasi Khusus	71.417.130.000,00	71.417.130.000,00	71.417.130.000,00	100,00	70.322.560.000,00
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	340.311.384.000,00	340.311.384.000,00	341.876.688.000,00	100,46	276.727.595.500,00
Dana Penyesuaian	340.311.384.000,00	340.311.384.000,00	341.876.688.000,00	100,46	276.727.595.500,00
Transfer Pemerintah Provinsi	128.139.967.479,00	128.139.967.479,00	122.310.580.027,00	95,45	71.873.238.191,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.008.253.982,00	128.008.253.982,00	121.877.736.579,00	95,21	71.399.808.284,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	131.713.497,00	131.713.497,00	432.843.448,00	328,62	473.429.907,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	78.718.767.000,00	113.826.017.000,00	113.587.517.000,00	99,79	51.719.885.000,00
Pendapatan Lainnya	78.718.767.000,00	113.826.017.000,00	113.587.517.000,00	99,79	51.719.885.000,00
BELANJA	1.978.832.457.444,55	2.013.939.707.444,55	1.803.200.913.471,44	89,54	1.637.252.053.174,00
BELANJA OPERASI	1.539.617.633.414,10	1.539.724.883.414,10	1.363.044.753.326,44	88,53	1.300.295.938.835,00
Belanja Pegawai	1.144.359.223.984,63	1.144.359.223.984,63	1.016.728.197.141,00	88,85	959.366.258.673,00
Belanja Barang dan Jasa	261.337.704.887,92	261.444.954.887,92	221.573.412.648,00	84,75	175.187.970.862,00
Belanja Bunga	9.721.202,44	9.721.202,44	9.721.202,44	100,00	0,00
Belanja Hibah	129.197.073.339,11	129.197.073.339,11	120.549.512.335,00	93,31	115.570.028.800,00
Belanja Bantuan Sosial	3.878.000.000,00	3.878.000.000,00	3.348.000.000,00	86,33	3.721.361.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	835.910.000,00	835.910.000,00	835.910.000,00	100,00	46.450.319.500,00
BELANJA MODAL	376.654.213.139,45	411.654.213.139,45	385.260.453.752,00	93,59	330.813.083.801,00
Belanja Tanah	1.501.930.000,00	1.501.930.000,00	234.473.500,00	15,61	305.906.700,00
Belanja Peralatan dan Mesin	34.432.627.974,62	34.432.627.974,62	26.982.855.760,00	78,36	48.966.251.565,00
Belanja Bangunan dan Gedung	109.604.605.007,01	109.604.605.007,01	102.978.867.182,00	93,95	94.087.076.833,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2014	ANGGARAN PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	207.753.081.990,82	242.753.081.990,82	238.361.984.855,00	98,19	173.405.454.533,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	23.361.968.167,00	23.361.968.167,00	16.702.272.455,00	71,49	14.048.394.170,00
BELANJA TAK TERDUGA	8.755.876.600,00	8.755.876.600,00	2.566.953.857,00	29,32	416.768.000,00
Belanja Tak Terduga	8.755.876.600,00	8.755.876.600,00	2.566.953.857,00	29,32	416.768.000,00
TRANSFER	53.804.734.291,00	53.804.734.291,00	52.328.752.536,00	97,26	5.726.262.538,00
Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa	53.804.734.291,00	53.804.734.291,00	52.328.752.536,00	97,26	5.726.262.538,00
Bagi Hasil Pajak	4.845.274.430,00	4.845.274.430,00	4.289.717.731,00	88,53	1.593.961.721,00
Bagi Hasil Retribusi	3.862.009.861,00	3.862.009.861,00	3.544.084.805,00	91,77	4.132.300.817,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	45.097.450.000,00	45.097.450.000,00	44.494.950.000,00	98,66	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(100.573.761.554,55)	(100.573.761.554,55)	124.511.179.978,45	(123,80)	(33.022.485.593,63)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	108.573.761.554,55	108.573.761.554,55	108.825.788.356,55	100,23	143.596.247.148,18
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	108.573.761.554,55	108.573.761.554,55	108.573.761.554,55	100,00	142.669.268.568,18
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	252.026.802,00	100,00	434.533.030,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	492.445.550,00
PENGELUARAN DAERAH	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.173.792.210,00	102,17	2.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.173.792.210,00	102,17	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	100.573.761.554,55	100.573.761.554,55	100.651.996.146,55	100,08	141.596.247.148,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	225.163.176.125,00	0,00	108.573.761.554,55

Anggaran dan realisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No. 35 Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dijelaskan lebih lanjut dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.5.5. Penjelasan Penyesuaian Rekening Aset Tetap

1. Latar Belakang

Adapun yang menjadi latar belakang penyesuaian rekening aset tetap antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil audit BPK tahun 2013 nomor 7.B/LHP/XVII.JATIM/05/2014 dimana pada Hasil Pemeriksaan nomor 6 dinyatakan **Aset tetap belum didukung daftar yang memadai dan menggambarkan nilai yang sebenarnya.**
- b. Mempermudah rekonsiliasi antara data aset di neraca dengan data barang milik daerah. Data aset dineraca mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 sedangkan data barang milik daerah berdasarkan Permendagri 17 tahun 2007, yang mana keduanya mempunyai struktur rekening aset tetap yang berbeda.
- c. Pada tahun 2014 aset di neraca sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 sudah mengacu pada permendagri 17 tahun 2007.
- d. Penyesuaian rekening tidak bertentangan dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam pasal 77 ayat (120, bahwa **Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.**

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut pada tahun 2014 dilaksanakan penyesuaian rekening aset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013. Data yang digunakan merupakan data aset tetap per 31 Desember 2013 setelah audit.

2. Penyajian Saldo Awal 2014

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang SAP, Laporan Keuangan disajikan secara komparatif. Agar neraca dapat disajikan secara komparatif, maka saldo aset tetap per 31 Desember 2013 setelah audit dilakukan penyesuaian rekening sebagai saldo awal 2014. Dalam proses penyesuaian tersebut terdapat perubahan jumlah saldo pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap lainnya. Sebagai contoh, dalam aset tetap per 31 Desember 2013 *Alat Olah Raga* masuk rekening *Peralatan dan Mesin*, pada saldo awal 2014 masuk pada rekening *Aset Tetap Lainnya*.

Adapun secara rinci perubahan atas saldo aset tetap per 31 Desember 2013 menjadi aset awal tahun 2014 sebagai berikut.

Tabel 76.
Perbedaan Saldo aset tetap per 31 Desember dengan per 1 Januari 2014

Rek	Aset	Sebelum Penyesuaian Per 31 Des 2013	Setelah Penyesuaian Per 1 Jan 2014	Selisih
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	301.445.996.701,70	301.302.004.101,70	143.992.600,00
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	689.741.212.886,92	690.057.828.950,92	(316.616.064,00)
1 . 3 . 4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	934.736.744.970,62	934.725.451.506,62	11.293.464,00
1 . 3 . 5	Aktiva tetap lainnya	28.395.950.837,00	28.234.620.837,00	161.330.000,00

- Selisih peralatan mesin sebesar Rp. 143.992.600,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bertambah dari:

- Gedung dan Bangunan	192.500.000,00	
- Jalan irigasi dan jaringan	112.822.600,00	
- Aktiva tetap lainnya	43.120.000,00	
	<i>Jumlah</i>	<u>348.442.600,00</u>

Berkurang ke:

- Aktiva tetap lainnya		<u>(204.450.000,00)</u>
	Selisih	143.992.600,00

- Selisih gedung dan bangunan sebesar Rp. (316.616.064,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bertambah dari:

- Jalan irigasi dan jaringan		76.236.550,00
------------------------------	--	---------------

Berkurang ke:

- Peralatan dan Mesin	(192.500.000,00)	
- Jalan irigasi dan jaringan	(200.352.614,00)	
	<i>Jumlah</i>	<u>(392.852.614,00)</u>
	Selisih	(316.616.064,00)

- Selisih Jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 11.293.464,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bertambah dari:

- Gedung dan Bangunan		200.352.614,00
-----------------------	--	----------------

Berkurang ke:

- Peralatan dan Mesin	(112.822.600,00)	
- Gedung dan Bangunan	(76.236.550,00)	
	<i>Jumlah</i>	<u>(189.059.150,00)</u>
	Selisih	11.293.464,00

- Selisih aktiva tetap lainnya sebesar Rp161.330.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bertambah dari:

- Peralatan dan Mesin		204.450.000,00
-----------------------	--	----------------

Berkurang ke:

- Peralatan dan Mesin		<u>(43.120.000,00)</u>
	Selisih	161.330.000,00

3. Perbandingan Aset Tetap di Neraca dengan Barang Milik Daerah

a. *Perbandingan Aset Tetap Tanah*

Perbandingan aset tanah per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Data Perbandingan Neraca dengan BMD TANAH

Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	93.157.628.561,00	118.610.445.673,00	(25.452.817.112,00)
2	Dinas Kesehatan	12.511.621.650,00	1.251.162.650,00	11.260.459.000,00
3	RSUD	25.960.000.000,00	25.960.000.000,00	-
4	Dinas PU Bina Marga	30.350.115.603,00	30.350.115.603,00	-
5	Dinas PU Cipta Karya	20.385.768.100,00	20.385.768.001,00	99,00
6	Bappeda	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	3.466.437.000,00	3.466.437.000,00	-
8	Badan Lingkungan Hidup	-	-	-
9	Dinas Penduk dan Capil	-	-	-
10	Badan PPKB	-	-	-
11	Dinas Sosial	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	-
12	Dinas Nakertrans	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
13	Dinas Koperasi dan UMKM	2.097.650.000,00	2.097.650.000,00	-
14	Disporbudpar	37.117.050.000,00	37.117.050.002,00	(2,00)
15	Badan Kesbangpol	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-
16	BPBD	-	-	-
17	Satpol PP	-	-	-
18	Sekretariat Daerah	691.874.500,00	691.874.500,00	-
	- Bagian Pemerintahan	125.274.500,00	125.274.500,00	-
	- Bagian Hukum	-	-	-
	- Bagian Kesra	-	-	-
	- Bagian Pembangunan	-	-	-
	- Bagian Perekonomian	-	-	-
	- Bagian Organisasi	-	-	-
	- Bagian Umum	566.600.000,00	566.600.000,00	-
	- Bag. Humas dan Protokol	-	-	-
19	Sekretariat DPRD	13.345.600.000,00	13.345.600.000,00	-
20	BPKAD	82.611.903.259,00	82.611.903.259,00	-
21	Inspektorat	-	-	-
22	BKD	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00	-
23	KPTSP	3.422.700.000,00	3.422.700.000,00	-
24	Dinas Pendapatan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	-
25	Kantor Ketahanan Pangan	324.000.000,00	324.000.000,00	-
26	Bapemas	9.563.400.000,00	9.563.400.000,00	-
27	Kantor Perpust dan Arsip	-	1,00	(1,00)
28	Dinas Pertanian	13.431.650.000,00	13.431.650.000	00,00
29	Dinas Peternakan	1.449.600.000,00	1.499.600.001,00	(50.000.001,00)
30	BP4K	15.184.900.000,00	15.184.900.000,00	-
31	Dinas Hutbun	34.453.680.000,00	34.453.680.000,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	4.658.592.400,00	4.658.592.400,00	-
33	Disperindag	19.134.194.000,00	19.134.194.000,00	-
34	Kecamatan Selopuro	406.850.000,00	406.850.000,00	-
35	Kecamatan Wlingi	11.987.000.000,00	11.987.000.000,00	-
36	Kecamatan Talun	271.080.000,00	271.080.000,00	-
37	Kecamatan Gandusari	91.000.000,00	91.000.000,00	-
38	Kecamatan Doko	198.500.000,00	198.500.000,00	-
39	Kecamatan Garum	651.150.000,00	651.150.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
40	Kecamatan Kanigoro	270.000.000,00	270.000.001,00	(1,00)
41	Kecamatan Sutojayan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
42	Kecamatan Binangun	150.000.000,00	150.000.000,00	-
43	Kecamatan Wates	2.659.072.850,00	2.659.072.850,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	157.500.000,00	157.500.001,00	(1,00)
45	Kecamatan Wonotirto	96.095.000,00	96.095.001,00	(1,00)
46	Kecamatan Bakung	345.197.500,00	345.197.500,00	-
47	Kecamatan Kademangan	176.525.000,00	176.525.000,00	-
48	Kecamatan Sanankulon	277.500.000,00	277.500.000,00	-
49	Kecamatan Srengat	1.164.280.000,06	1.164.280.000,00	0,06
50	Kecamatan Wonodadi	341.400.000,00	341.400.000,00	-
51	Kecamatan Udanawu	164.160.000,00	164.160.000,00	-
52	Kecamatan Ponggok	357.000.000,00	357.000.000,00	-
53	Kecamatan Nglegok	-	-	-
54	Kecamatan Selorejo	411.250.000,00	411.250.000,00	-
55	Kecamatan Kesamben	398.780.000,00	398.780.000,00	-
56	Kelurahan Garum	5.549.720.000,00	5.549.720.000,00	-
57	Kelurahan Tawangsasri	2.162.000.000,00	2.162.000.002,00	(2,00)
58	Kelurahan Sumberdiren	3.892.025.000,00	3.892.025.000,00	-
59	Kelurahan Bence	4.657.000.000,00	4.657.000.000,00	-
60	Kelurahan Kanigoro	4.245.360.000,00	4.245.360.004,00	(4,00)
61	Kelurahan Satriyan	6.318.140.000,00	6.318.140.000,00	-
62	Kelurahan Kembangarum	4.184.219.305,00	4.184.219.305,00	-
63	Kelurahan Jingglong	1.860.131.460,00	1.860.131.460,00	-
64	Kelurahan Kalipang	3.147.197.388,75	3.147.197.405,75	(17,00)
65	Kelurahan Jegu	1.482.444.847,50	1.482.444.847,50	-
66	Kelurahan Sukorejo	890.075.550,00	890.075.552,00	(2,00)
67	Kelurahan Sutojayan	1.015.246.292,25	1.015.246.292,25	-
68	Kelurahan Kedungbunder	743.261.970,70	743.261.970,70	-
69	Kelurahan Wlingi	2.187.039.187,50	2.187.039.188,50	(1,00)
70	Kelurahan Beru	5.034.715.600,00	5.034.715.600,00	-
71	Kelurahan Tangkil	6.867.067.680,00	6.867.067.681,00	(1,00)
72	Kelurahan Klemunan	3.918.776.400,00	3.918.776.400,00	-
73	Kelurahan Babadan	3.955.943.000,00	3.955.943.000,00	-
74	Kelurahan Talun	76.500.000,00	76.500.001,00	(1,00)
75	Kelurahan Bajang	23.930.218.125,00	23.930.218.125,00	-
76	Kelurahan Kaweron	4.791.458.375,00	4.791.458.376,00	(1,00)
77	Kelurahan Kamulan	4.120.636.300,00	4.120.636.301,00	(1,00)
78	Kelurahan Kauman	5.570.079.237,50	5.570.079.237,50	-
79	Kelurahan Dandong	1.338.773.437,50	1.338.773.438,50	(1,00)
80	Kelurahan Srengat	9.455.446.100,00	9.455.446.101,00	(1,00)
81	Kelurahan Togokan	3.904.754.500,00	3.904.754.500,00	-
82	Kelurahan Kademangan	8.923.054.775,00	8.923.054.775,00	-
83	Kelurahan Nglegok	9.285.811.050,00	9.285.811.050,00	-
TOTAL		586.656.201.004,76	600.898.559.056,70	(14.242.358.051,94)

b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Data Perbandingan Neraca dengan BMD Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	96.537.774.190,00	71.315.882.061,24	25.221.892.128,76
2	Dinas Kesehatan	42.596.143.300,00	43.166.654.220,00	(570.510.920,00)
3	RSUD	57.087.412.491,67	57.087.412.491,67	-
4	Dinas PU Bina Marga	13.233.403.053,68	13.233.403.053,68	-
5	Dinas PU Cipta Karya	6.504.363.955,00	5.214.806.959,00	1.289.556.996,00
6	Bappeda	1.708.594.093,99	1.708.594.093,99	-
7	Dinas Perhubungan	6.895.948.335,00	6.895.948.335,00	-
8	Badan Lingkungan Hidup	3.666.719.417,00	3.666.719.417,00	-
9	Dinas Penduk dan Capil	5.409.498.559,18	5.409.498.559,18	-
10	Badan PPKB	6.238.399.331,60	6.238.399.331,60	-
11	Dinas Sosial	1.026.695.500,00	1.026.695.500,00	-
12	Dinas Nakertrans	1.161.302.103,00	1.161.302.104,00	(1,00)
13	Dinas Koperasi dan UMKM	550.383.500,00	550.383.500,00	-
14	Disporbudpar	1.526.526.315,00	1.526.526.315,00	-
15	Badan Kesbangpol	1.162.094.214,00	1.162.094.214,00	-
16	BPBD	5.848.952.625,00	5.848.952.625,00	-
17	Satpol PP	2.724.659.477,00	2.724.659.489,00	(12,00)
18	Sekretariat Daerah	31.096.240.907,44	31.096.240.907,44	-
	- Bagian Pemerintahan	167.485.000,00	167.485.000,00	-
	- Bagian Hukum	131.525.500,00	131.525.500,00	-
	- Bagian Kesra	99.834.500,00	99.834.500,00	-
	- Bagian Pembangunan	1.335.992.979,00	1.335.992.979,00	-
	- Bagian Perekonomian	147.919.750,00	147.919.750,00	-
	- Bagian Organisasi	259.388.000,00	259.388.000,00	-
	- Bagian Umum	27.975.950.178,44	27.975.950.178,44	-
	- Bag. Humas dan Protokol	978.145.000,00	978.145.000,00	-
19	Sekretariat DPRD	18.276.182.998,00	18.276.182.998,00	-
20	BPKAD	3.409.905.394,74	3.409.905.394,74	-
21	Inspektorat	1.715.022.390,00	1.715.022.390,00	-
22	BKD	1.790.861.290,00	1.790.861.291,00	(1,00)
23	KPTSP	1.734.858.593,00	1.734.858.593,00	-
24	Dinas Pendapatan	6.277.958.313,00	6.028.531.420,03	249.426.892,97
25	Kantor Ketahanan Pangan	386.356.000,00	386.356.000,00	-
26	Bapemas	1.021.061.500,00	1.021.061.500,00	-
27	Kantor Perpust dan Arsip	1.042.702.814,36	1.042.702.863,36	(49,00)
28	Dinas Pertanian	5.213.969.424,04	5.213.969.424,04	00,00
29	Dinas Peternakan	3.710.213.606,00	3.710.213.606,00	-
30	BP4K	2.217.412.900,00	2.217.412.900,00	-
31	Dinas Hutbun	1.724.028.900,00	1.724.028.900,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	2.761.062.273,00	2.761.062.273,00	-
33	Disperindag	1.631.632.900,00	1.631.632.900,00	-
34	Kecamatan Selopuro	339.810.500,00	339.810.500,00	-
35	Kecamatan Wlingi	371.833.200,00	371.833.200,00	-
36	Kecamatan Talun	368.245.500,00	368.245.502,00	(2,00)
37	Kecamatan Gandusari	390.054.600,00	390.054.600,00	-
38	Kecamatan Doko	395.655.500,00	395.655.502,00	(2,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
39	Kecamatan Garum	634.511.000,00	634.511.008,00	(8,00)
40	Kecamatan Kanigoro	324.548.000,00	324.548.003,00	(3,00)
41	Kecamatan Sutojayan	344.852.500,00	344.852.500,00	-
42	Kecamatan Binangun	388.290.500,00	388.290.500,00	-
43	Kecamatan Wates	336.187.500,00	336.187.500,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	319.057.500,00	319.057.510,00	(10,00)
45	Kecamatan Wonotirto	343.400.500,00	343.400.500,00	-
46	Kecamatan Bakung	455.607.051,50	455.607.054,50	(3,00)
47	Kecamatan Kademangan	458.968.028,00	458.968.028,00	-
48	Kecamatan Sanankulon	336.590.691,00	336.590.691,00	-
49	Kecamatan Srengat	365.245.565,00	365.245.566,00	(1,00)
50	Kecamatan Wonodadi	315.184.150,00	315.184.150,00	-
51	Kecamatan Udanawu	344.377.500,00	344.377.500,00	-
52	Kecamatan Ponggok	410.736.100,00	410.736.108,00	(8,00)
53	Kecamatan Nglegok	366.080.150,00	366.080.160,00	(10,00)
54	Kecamatan Selorejo	333.459.224,00	333.459.224,00	-
55	Kecamatan Kesamben	380.710.395,00	380.710.395,00	-
56	Kelurahan Garum	143.068.000,00	143.068.000,00	-
57	Kelurahan Tawangsasri	151.791.937,50	151.791.937,50	-
58	Kelurahan Sumberdiren	100.195.500,00	100.195.500,00	-
59	Kelurahah Bence	199.679.000,00	199.679.000,00	-
60	Kelurahan Kanigoro	90.292.437,50	90.292.441,50	(4,00)
61	Kelurahan Satriyan	73.619.437,50	73.619.437,50	-
62	Kelurahan Kembangarum	120.763.000,00	120.763.000,00	-
63	Kelurahan Jingglong	145.776.937,50	145.776.938,50	(1,00)
64	Kelurahan Kalipang	174.664.000,00	174.664.000,00	-
65	Kelurahan Jegu	170.622.752,50	170.622.752,50	-
66	Kelurahan Sukorejo	202.993.187,50	202.993.187,50	-
67	Kelurahan Sutojayan	211.188.237,50	211.188.237,50	-
68	Kelurahan Kedungbunder	165.642.437,50	165.642.437,50	-
69	Kelurahan Wlingi	160.121.437,50	160.121.437,50	-
70	Kelurahan Beru	130.344.817,50	130.344.882,46	(64,96)
71	Kelurahan Tangkil	137.008.937,50	137.008.937,00	0,50
72	Kelurahan Klemunan	113.341.990,10	113.341.990,10	-
73	Kelurahan Babadan	111.153.407,50	111.153.409,50	(2,00)
74	Kelurahan Talun	267.657.227,50	267.657.227,50	-
75	Kelurahan Bajang	128.839.037,50	128.839.037,50	-
76	Kelurahan Kaweron	157.647.250,00	157.647.250,00	-
77	Kelurahan Kamulan	145.777.437,50	145.777.437,50	-
78	Kelurahan Kauman	151.068.437,50	151.068.438,50	(1,00)
79	Kelurahan Dandong	165.986.437,50	165.986.437,50	-
80	Kelurahan Srengat	180.525.937,50	180.525.937,50	-
81	Kelurahan Togokan	239.201.830,00	239.201.832,00	(2,00)
82	Kelurahan Kademangan	186.819.037,50	186.819.037,50	-
83	Kelurahan Nglegok	133.937.437,50	133.937.437,50	-
TOTAL		350.571.473.844,30	324.381.108.931,03	26.190.364913,27



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut.

Data Perbandingan Neraca dengan BMD Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	410.777.266.687,86	366.028.519.436,09	44.748.747.251,77
2	Dinas Kesehatan	60.738.925.291,00	60.738.925.291,00	-
3	RSUD	23.917.248.349,00	23.917.248.349,00	-
4	Dinas PU Bina Marga	4.180.321.000,00	4.180.321.000,00	-
5	Dinas PU Cipta Karya	71.915.051.776,00	66.032.358.748,00	5.882.693.028,00
6	Bappeda	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	11.231.804.451,04	11.231.804.451,04	-
8	Badan Lingkungan Hidup	2.890.316.200,00	2.890.316.200,00	-
9	Dinas Penduk dan Capil	413.501.000,00	413.501.000,00	-
10	Badan PPKB	3.341.404.299,64	3.341.404.299,64	-
11	Dinas Sosial	343.917.875,00	343.917.875,00	-
12	Dinas Nakertrans	343.856.094,00	343.856.094,00	-
13	Dinas Koperasi dan UMKM	354.377.000,00	354.377.000,00	-
14	Disporbudpar	35.130.978.925,00	35.130.978.925,00	-
15	Badan Kesbangpol	326.584.000,00	326.584.000,00	-
16	BPBD	1.164.151.000,00	1.164.151.000,00	-
17	Satpol PP	58.130.000,00	58.130.001,00	(1,00)
18	Sekretariat Daerah	3.923.983.770,00	3.923.983.770,00	-
	- Bagian Pemerintahan	-	-	-
	- Bagian Hukum	-	-	-
	- Bagian Kesra	-	-	-
	- Bagian Pembangunan	40.950.800,00	40.950.800,00	-
	- Bagian Perekonomian	-	-	-
	- Bagian Organisasi	-	-	-
	- Bagian Umum	3.883.032.970,00	3.883.032.970,00	-
	- Bag. Humas dan Protokol	-	-	-
19	Sekretariat DPRD	2.959.411.400,00	2.959.411.400,00	-
20	BPKAD	20.291.051.600,05	20.291.051.600,05	-
21	Inspektorat	46.125.000,00	46.125.000,00	-
22	BKD	437.513.000,00	437.513.000,00	-
23	KPTSP	430.790.500,00	430.790.500,00	-
24	Dinas Pendapatan	4.815.212.600,00	900.758.500,00	3.914.454.100,00
25	Kantor Ketahanan Pangan	309.860.000,00	309.860.000,00	-
26	Bapemas	812.305.339,33	812.305.339,33	-
27	Kantor Perpust dan Arsip	334.100.000,00	334.100.000,00	-
28	Dinas Pertanian	5.472.086.260,00	5.472.086.250,00	10,00
29	Dinas Peternakan	15.037.609.350,00	15.037.609.350,00	-
30	BP4K	3.539.958.042,00	3.539.958.042,00	-
31	Dinas Hutbun	330.018.030,00	330.018.030,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	9.688.538.730,00	9.688.538.730,00	-
33	Disperindag	13.584.769.150,00	13.584.769.150,00	-
34	Kecamatan Selopuro	963.870.000,00	963.870.000,00	-
35	Kecamatan Wlingi	471.447.000,00	471.447.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
36	Kecamatan Talun	373.179.000,00	373.179.000,00	-
37	Kecamatan Gandusari	290.053.000,00	290.053.000,00	-
38	Kecamatan Doko	193.757.250,00	193.757.250,00	-
39	Kecamatan Garum	254.803.500,00	254.803.500,00	-
40	Kecamatan Kanigoro	669.175.500,00	669.175.500,00	-
41	Kecamatan Sutojayan	152.269.800,00	152.269.800,00	-
42	Kecamatan Binangun	168.237.000,00	168.237.000,00	-
43	Kecamatan Wates	361.294.500,00	361.294.500,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	275.794.025,00	275.794.025,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	128.877.000,00	128.877.000,00	-
46	Kecamatan Bakung	3.613.745.250,00	3.613.745.250,00	-
47	Kecamatan Kademangan	355.166.500,00	355.166.500,00	-
48	Kecamatan Sanankulon	229.881.000,00	229.881.000,00	-
49	Kecamatan Srengat	257.794.850,00	257.794.850,00	-
50	Kecamatan Wonodadi	472.074.000,00	472.074.000,00	-
51	Kecamatan Udanawu	332.026.700,00	332.026.700,00	-
52	Kecamatan Ponggok	91.591.000,00	91.591.000,00	-
53	Kecamatan Nglegok	169.122.800,00	169.122.800,00	-
54	Kecamatan Selorejo	439.897.500,00	439.897.500,00	-
55	Kecamatan Kesamben	109.931.625,00	109.931.625,00	-
56	Kelurahan Garum	194.969.000,00	194.969.000,00	-
57	Kelurahan Tawangasari	267.957.050,00	267.957.050,00	-
58	Kelurahan Sumberdiren	190.400.750,00	190.400.750,00	-
59	Kelurahan Bence	325.962.000,00	325.962.000,00	-
60	Kelurahan Kanigoro	132.518.000,00	132.518.000,00	-
61	Kelurahan Satriyan	254.046.250,00	254.046.250,00	-
62	Kelurahan Kembangarum	364.593.725,00	364.593.725,00	-
63	Kelurahan Jingglong	184.739.000,00	184.739.000,00	-
64	Kelurahan Kalipang	347.457.550,00	347.457.550,00	-
65	Kelurahan Jegu	329.528.300,00	329.528.300,00	-
66	Kelurahan Sukorejo	303.798.500,00	303.798.500,00	-
67	Kelurahan Sutojayan	10.370.166.320,00	10.370.166.320,00	-
68	Kelurahan Kedungbunder	175.285.000,00	175.285.000,00	-
69	Kelurahan Wlingi	981.681.000,00	981.681.000,00	-
70	Kelurahan Beru	362.729.455,00	362.729.455,00	-
71	Kelurahan Tangkil	952.702.200,00	952.702.200,00	-
72	Kelurahan Klemunan	274.047.445,00	274.047.445,00	-
73	Kelurahan Babadan	896.830.100,00	896.830.100,00	-
74	Kelurahan Talun	411.054.000,00	411.054.000,00	-
75	Kelurahan Bajang	485.037.125,00	485.037.125,00	-
76	Kelurahan Kaweron	354.083.250,00	354.083.250,00	-
77	Kelurahan Kamulan	247.607.665,00	247.607.665,00	-
78	Kelurahan Kauman	336.383.850,00	336.383.850,00	-
79	Kelurahan Dandong	633.542.700,00	633.542.700,00	-
80	Kelurahan Srengat	141.018.000,00	141.018.000,00	-
81	Kelurahan Togokan	499.912.250,00	499.912.250,00	-
82	Kelurahan Kademangan	575.497.900,00	575.497.900,00	-
83	Kelurahan Nglegok	1.092.600.250,00	1.092.600.250,00	-
TOTAL		741.201.304.154,92	686.655.409.766,15	54.545.894.388,77



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Perbandingan Jalan, Jaringan, dan Instalasi per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut.

Data Perbandingan Neraca dengan BMD
Jalan, Jaringan, dan Instalasi
Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	113.438.839,12	180.994.600,00	(67.555.760,88)
2	Dinas Kesehatan	46.509.950,00	46.509.950,00	-
3	RSUD	3.754.755.181,00	3.754.755.181,00	-
4	Dinas PU Bina Marga	1.018.674.133.635,00	1.018.674.133.635,00	-
5	Dinas PU Cipta Karya	132.693.054.846,00	148.552.622.791,82	(15.859.567.945,82)
6	Bappeda	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	102.782.140,00	102.782.140,00	-
8	Badan Lingkungan Hidup	1.324.712.846,00	1.324.712.846,00	-
9	Dinas Penduk dan Capil	4.500.100,00	4.500.100,00	-
10	Badan PPKB	34.690.250,00	34.690.250,00	-
11	Dinas Sosial	2.270.000,00	2.270.000,00	-
12	Dinas Nakertrans	8.375.000,00	8.375.000,00	-
13	Dinas Koperasi dan UMKM	4.420.000,00	4.420.000,00	-
14	Disporbudpar	-	-	-
15	Badan Kesbangpol	-	-	-
16	BPBD	6.112.343.000,00	6.112.343.000,00	-
17	Satpol PP	2.500.000,00	2.500.000,00	-
18	Sekretariat Daerah	390.170.861,00	390.170.861,00	-
	- Bagian Pemerintahan	-	-	-
	- Bagian Hukum	-	-	-
	- Bagian Kesra	-	-	-
	- Bagian Pembangunan	-	-	-
	- Bagian Perekonomian	-	-	-
	- Bagian Organisasi	-	-	-
	- Bagian Umum	390.170.861,00	390.170.861,00	-
	- Bag Humas dan Protokol	-	-	-
19	Sekretariat DPRD	386.520.000,00	386.520.000,00	-
20	BPKAD	204.577.800,00	204.577.800,00	-
21	Inspektorat	69.723.500,00	69.723.500,00	-
22	BKD	-	-	-
23	KPTSP	-	-	-
24	Dinas Pendapatan	100.000.000,00	114.000.000,00	(14.000.000,00)
25	Kantor Ketahanan Pangan	-	-	-
26	Bapemas	23.150.000,00	23.150.000,00	-
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip	-	-	-
28	Dinas Pertanian	285.740.000,00	390.139.500,00	(104.399.500,00)
29	Dinas Peternakan	-	-	-
30	BP4K	-	-	-
31	Dinas Hutbun	14.169.500,00	14.169.500,00	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	1.538.133.507,00	1.538.133.507,00	-
33	Disperindag	14.165.000,00	14.165.000,00	-
34	Kecamatan Selopuro	-	-	-
35	Kecamatan Wlingi	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
36	Kecamatan Talun	-	-	-
37	Kecamatan Gandusari	-	-	-
38	Kecamatan Doko	412.160.000,00	412.160.000,00	-
39	Kecamatan Garum	-	-	-
40	Kecamatan Kanigoro	-	-	-
41	Kecamatan Sutojayan	-	-	-
42	Kecamatan Binangun	-	-	-
43	Kecamatan Wates	-	-	-
44	Kecamatan Panggungrejo	-	-	-
45	Kecamatan Wonotirto	-	-	-
46	Kecamatan Bakung	-	-	-
47	Kecamatan Kademangan	-	-	-
48	Kecamatan Sanankulon	-	-	-
49	Kecamatan Srengat	-	-	-
50	Kecamatan Wonodadi	-	-	-
51	Kecamatan Udanawu	28.400.000,00	28.400.000,00	-
52	Kecamatan Ponggok	-	-	-
53	Kecamatan Nglegok	-	-	-
54	Kecamatan Selorejo	-	-	-
55	Kecamatan Kesamben	-	-	-
56	Kelurahan Garum	114.076.000,00	114.076.000,00	-
57	Kelurahan Tawangsasri	553.950.000,00	553.950.000,00	-
58	Kelurahan Sumberdiren	-	-	-
59	Kelurahah Bence	58.451.500,00	58.451.500,00	-
60	Kelurahan Kanigoro	70.340.000,00	70.340.000,00	-
61	Kelurahan Satriyan	-	-	-
62	Kelurahan Kembangarum	585.437.500,00	585.437.500,00	-
63	Kelurahan Jingglong	166.620.900,00	166.620.900,00	-
64	Kelurahan Kalipang	182.018.000,00	182.018.000,00	-
65	Kelurahan Jegu	15.700.000,00	15.700.000,00	-
66	Kelurahan Sukorejo	182.150.400,00	182.150.400,00	-
67	Kelurahan Sutojayan	196.087.250,00	196.087.250,00	-
68	Kelurahan Kedungbunder	77.380.000,00	77.380.000,00	-
69	Kelurahan Wlingi	148.750.000,00	148.750.000,00	-
70	Kelurahan Beru	-	-	-
71	Kelurahan Tangkil	90.102.327,00	90.102.327,00	-
72	Kelurahan Klemunan	-	-	-
73	Kelurahan Babadan	239.127.400,00	239.127.400,00	-
74	Kelurahan Talun	151.300.000,00	151.300.000,00	-
75	Kelurahan Bajang	445.413.500,00	445.413.500,00	-
76	Kelurahan Kaweron	257.527.875,00	257.527.875,00	-
77	Kelurahan Kamulan	82.800.550,00	82.800.550,00	-
78	Kelurahan Kauman	63.890.000,00	63.890.000,00	-
79	Kelurahan Dandong	278.636.500,00	278.636.500,00	-
80	Kelurahan Srengat	182.701.000,00	182.701.000,00	-
81	Kelurahan Togokan	368.319.800,00	368.319.800,00	-
82	Kelurahan Kademangan	33.481.000,00	33.481.000,00	-
83	Kelurahan Nglegok	-	-	-
TOTAL		1.170.889.657.457,12	1.186.935.180.633,82	(16.045.523.206,70)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

e. Aset Tetap Lainnya

Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut.

Data Perbandingan Neraca dengan BMD Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	26.807.768.255,00	32.450.075.561,62	(5.642.307.306,62)
2	Dinas Kesehatan	693.200,00	1.622.200,00	(929.000,00)
3	RSUD	4.575.000,00	4.575.000,00	-
4	Dinas PU Bina Marga	69.472.000,00	69.472.000,00	-
5	Dinas PU Cipta Karya	2.679.973.500,00	2.982.429.000,00	(302.455.500,00)
6	Bappeda	277.865.500,00	277.865.500,00	-
7	Dinas Perhubungan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
8	Badan Lingkungan Hidup	712.050.550,00	712.050.550,00	-
9	Dinas Penduk dan Capil	-	-	-
10	Badan PPKB	-	-	-
11	Dinas Sosial	-	-	-
12	Dinas Nakertrans	-	-	-
13	Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-
14	Disporbudpar	125.450.125,00	125.450.125,00	-
15	Badan Kesbangpol	-	-	-
16	BPBD	16.700.000,00	16.700.000,00	-
17	Satpol PP	-	-	-
18	Sekretariat Daerah	498.050.400,00	498.050.400,00	-
	- Bagian Pemerintahan	-	-	-
	- Bagian Hukum	10.852.900,00	10.852.900,00	-
	- Bagian Kesra	-	-	-
	- Bagian Pembangunan	-	-	-
	- Bagian Perekonomian	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	- Bagian Organisasi	-	-	-
	- Bagian Umum	482.697.500,00	482.697.500,00	-
	- Bag. Humas dan Protokol	-	-	-
19	Sekretariat DPRD	89.913.400,00	89.913.400,00	-
20	BPKAD	-	-	-
21	Inspektorat	40.000,00	40.000,00	-
22	BKD	-	-	-
23	KPTSP	-	-	-
24	Dinas Pendapatan	1.260.000,00	860.000,00	400.000,00
25	Kantor Ketahanan Pangan	-	-	-
26	Bapemas	-	-	-
27	Kantor Perpust dan Arsip	241.818.070,00	241.819.625,00	(1.555,00)
28	Dinas Pertanian	-	-	-
29	Dinas Peternakan	-	-	-
30	BP4K	12.000,00	12.000,00	-
31	Dinas Hutbun	-	-	-
32	Dinas Kelautan Perikanan	120.045.000,00	120.045.000,00	-
33	Disperindag	6.000.000,00	6.000.000,00	-
34	Kecamatan Selopuro	-	-	-
35	Kecamatan Wlingi	-	-	-
36	Kecamatan Talun	-	-	-
37	Kecamatan Gandusari	-	-	-
38	Kecamatan Doko	18.000,00	18.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
39	Kecamatan Garum	65.010.000,00	65.010.000,00	-
40	Kecamatan Kanigoro	25.000,00	25.000,00	-
41	Kecamatan Sutojayan	2.870.000,00	2.870.000,00	-
42	Kecamatan Binangun	15.000,00	15.000,00	-
43	Kecamatan Wates	38.140.000,00	38.140.000,00	-
44	Kecamatan Panggungrejo	72.500.000,00	72.500.000,00	-
45	Kecamatan Wonotirto	18.500.000,00	18.500.000,00	-
46	Kecamatan Bakung	36.960.000,00	36.960.000,00	-
47	Kecamatan Kademangan	28.795.000,00	28.795.000,00	-
48	Kecamatan Sanankulon	-	-	-
49	Kecamatan Srengat	36.000.000,00	36.000.000,00	-
50	Kecamatan Wonodadi	31.500.000,00	31.500.000,00	-
51	Kecamatan Udanawu	-	-	-
52	Kecamatan Ponggok	100.000,00	100.000,00	-
53	Kecamatan Nglegok	-	-	-
54	Kecamatan Selorejo	-	-	-
55	Kecamatan Kesamben	-	-	-
56	Kelurahan Garum	-	-	-
57	Kelurahan Tawangasari	-	-	-
58	Kelurahan Sumberdiren	-	-	-
59	Kelurahah Bence	-	-	-
60	Kelurahan Kanigoro	-	-	-
61	Kelurahan Satriyan	-	-	-
62	Kelurahan Kembangarum	-	-	-
63	Kelurahan Jingglong	-	-	-
64	Kelurahan Kalipang	-	-	-
65	Kelurahan Jegu	-	-	-
66	Kelurahan Sukorejo	34.500.000,00	34.500.000,00	-
67	Kelurahan Sutojayan	3.250.000,00	3.250.000,00	-
68	Kelurahan Kedungbunder	-	-	-
69	Kelurahan Wlingi	4.590.000,00	4.590.000,00	-
70	Kelurahan Beru	-	-	-
71	Kelurahan Tangkil	-	-	-
72	Kelurahan Klemunan	148.000,00	148.000,00	-
73	Kelurahan Babadan	440.000,00	440.000,00	-
74	Kelurahan Talun	100.000,00	100.000,00	-
75	Kelurahan Bajang	-	-	-
76	Kelurahan Kaweron	4.600.000,00	4.600.000,00	-
77	Kelurahan Kamulan	-	-	-
78	Kelurahan Kauman	2.000.000,00	2.000.000,00	-
79	Kelurahan Dandong	-	-	-
80	Kelurahan Srengat	400.000,00	400.000,00	-
81	Kelurahan Togokan	6.511.800,00	6.511.800,00	-
82	Kelurahan Kademangan	-	-	-
83	Kelurahan Nglegok	-	-	-
TOTAL		32.039.809.800,00	37.985.103.161,62	(5.945.293.361,62)

- f. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Data Perbandingan Neraca dengan BMD
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dinas Kesehatan	242.440.700,00	242.440.700,00	00,00
2	RSUD	4.959.958.407,00	4.959.958.407,00	00,00
3	Dinas PU Bina Marga	540.380.200,00	540.380.200,00	00,00
4	Dinas PU Cipta Karya	64.724.520.150,00	67.093.020.650,00	2.368.500.00,00
TOTAL		70.467.299.457,00	72.835.799.957,00	2.368.500.00,00

g. Aset Lainnya

Perbandingan aset Lainnya Per 31 Desember 2014 pada neraca dengan daftar barang milik daerah adalah sebagai berikut.

Data Perbandingan Neraca dengan BMD
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2014

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.647.856.720,00	7.254.300.627,24	393.556.092,76
2	Dinas Kesehatan	64.469.222,00	381.387.555,02	(316.918.333,02)
3	RSUD	8.345.526.885,51	8.330.614.900,51	14.911.985,00
4	Dinas PU Bina Marga	15.228.955.100,00	15.214.480.100,00	14.475.000,00
5	Dinas PU Cipta Karya	13.035.425.200,00	422.825.006,00	12.612.600.194,00
6	Bappeda	104.741.000,00	17.341.000,00	87.400.000,00
7	Dinas Perhubungan	186.003.500,00	-	186.003.500,00
8	Badan Lingkungan Hidup	32.717.000,00	32.717.000,00	-
9	Dinas Penduk dan Capil	459.616.843,34	181.321.843,34	278.295.000,00
10	Badan PPKB	65.547.619,40	38.247.500,00	27.300.119,40
11	Dinas Sosial	1.250.000,00	1.250.000,00	-
12	Dinas Nakertrans	94.621.800,00	36.721.800,00	57.900.000,00
13	Dinas Koperasi dan UMKM	16.936.800,00	16.936.800,00	-
14	Disporbudpar	236.548.610,00	236.548.610,00	-
15	Badan Kesbangpol	67.248.000,00	67.248.000,00	-
16	BPBD	55.332.800,00	17.205.000,00	38.127.800,00
17	Satpol PP	-	-	-
18	Sekretariat Daerah	796.761.750,00	495.767.250,00	300.994.500,00
	- Bagian Pemerintahan	49.052.000,00	29.450.000,00	19.602.000,00
	- Bagian Hukum	13.832.500,00	-	13.832.500,00
	- Bagian Kesra	-	-	-
	- Bagian Pembangunan	79.460.000,00	-	79.460.000,00
	- Bagian Perekonomian	-	-	-
	- Bagian Organisasi	188.100.000,00	-	188.100.000,00
	- Bagian Umum	464.742.250,00	464.742.250,00	-
	- Bag. Humas dan Protokol	1.575.000,00	1.575.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
	Sekretariat DPRD	128.910.000,00	30.010.000,00	98.900.000,00
19	BPKAD	801.632.070,00	353.317.570,00	448.314.500,00
20	Inspektorat	9.220.000,00	9.220.000,00	-
21	BKD	523.181.000,00	315.541.000,00	207.640.000,00
22	KPTSP	294.133.125,00	56.693.125,00	237.440.000,00
23	Dinas Pendapatan	1.088.992.000,00	5.536.000,00	1.083.456.000,00
24	Kantor Ketahanan Pangan	533.288.000,00	533.288.000,00	-
25	Bapemas	408.529.000,00	317.129.000,00	91.400.000,00
26	Kantor Perpust dan Arsip	26.944.435,64	-	26.944.435,64
27	Dinas Pertanian	7.221.533.580,96	7.264.491.355,08	(42.957.774,12)
28	Dinas Peternakan	787.136.940,00	737.136.940,00	50.000.000,00
29	BP4K	89.252.000,00	16.586.000,00	72.666.000,00
30	Dinas Hutbun	70.622.448,00	70.622.448,00	-
31	Dinas Kelautan Perikanan	240.893.210,00	240.893.210,00	-
32	Disperindag	53.018.800,00	53.018.800,00	-
33	Kecamatan Selopuro	10.070.000,00	10.070.000,00	-
34	Kecamatan Wlingi	7.547.500,00	7.547.500,00	-
35	Kecamatan Talun	59.940.000,00	59.940.000,00	-
36	Kecamatan Gandusari	-	-	-
37	Kecamatan Doko	2.270.000,00	2.270.000,00	-
38	Kecamatan Garum	2.583.000,00	2.583.000,00	-
39	Kecamatan Kanigoro	6.564.000,00	6.564.003,00	(3,00)
40	Kecamatan Sutojayan	3.691.480,00	3.691.480,00	-
41	Kecamatan Binangun	1.510.000,00	1.510.000,00	-
42	Kecamatan Wates	68.387.000,00	68.387.000,00	-
43	Kecamatan Panggungrejo	11.213.000,00	11.213.000,00	-
44	Kecamatan Wonotirto	210.000,00	210.000,00	-
45	Kecamatan Bakung	47.537.500,00	47.537.500,00	-
46	Kecamatan Kademangan	8.570.000,00	8.570.000,00	-
47	Kecamatan Sanankulon	616.075.000,00	616.075.000,00	-
48	Kecamatan Srengat	4.925.000,00	4.925.000,00	-
49	Kecamatan Wonodadi	17.402.800,00	17.402.800,00	-
50	Kecamatan Udanawu	6.625.000,00	6.625.000,00	-
51	Kecamatan Pongkok	695.500,00	695.500,00	-
52	Kecamatan Nglegok	-	-	-
53	Kecamatan Selorejo	17.255.000,00	17.255.000,00	-
54	Kecamatan Kesamben	22.640.000,00	22.640.000,00	-
55	Kelurahan Garum	-	-	-
56	Kelurahan Tawangasari	890.000,00	890.000,00	-
57	Kelurahan Sumberdiren	-	-	-
58	Kelurahah Bence	105.000,00	105.000,00	-
59	Kelurahan Kanigoro	18.222.400,00	18.222.400,00	-
60	Kelurahan Satriyan	-	-	-
61	Kelurahan Kembangarum	90.000,00	90.000,00	-
62	Kelurahan Jingglong	-	-	-
63	Kelurahan Kalipang	2.060.000,00	2.060.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama SKPD	Neraca (Simda Keu) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Aset (Simda BMD) Per 31 Des 2014 (Rp.)	Selisih (Rp)
64	Kelurahan Jegu	5.812.000,00	5.812.000,00	-
65	Kelurahan Sukorejo	-	-	-
66	Kelurahan Sutojayan	3.922.000,00	3.922.000,00	-
67	Kelurahan Kedungbunder	150.000,00	150.000,00	-
68	Kelurahan Wlingi	4.295.000,00	2.395.000,00	1.900.000,00
69	Kelurahan Beru	2.064.000,00	2.064.000,00	-
70	Kelurahan Tangkil	480.000,00	480.000,00	-
71	Kelurahan Klemunan	11.138.480,00	11.138.480,00	-
72	Kelurahan Babadan	225.263.000,00	225.263.000,00	-
73	Kelurahan Talun	9.656.000,00	9.656.000,00	-
74	Kelurahan Bajang	-	-	-
75	Kelurahan Kaweron	460.000,00	460.000,00	-
76	Kelurahan Kamulan	-	-	-
77	Kelurahan Kauman	1.120.000,00	1.120.000,00	-
78	Kelurahan Dandong	2.628.000,00	2.628.000,00	-
79	Kelurahan Srengat	11.334.000,00	5.834.000,00	5.500.000,00
80	Kelurahan Togokan	22.590.437,50	22.590.437,50	-
81	Kelurahan Kademangan	22.500.000,00	22.500.000,00	-
82	Kelurahan Nglegok	-	-	-
TOTAL		59.977.337.557,35	44.001.488.540,69	16.276.843.516,66

- ❖ Selisih asset lain-lain pada selain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPU Cipta Karya, Dinas Pendapatan dan Dinas Pertanian merupakan Persediaan rusak dan atau asset tidak berwujud.

4.6. Penjelasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar memperoleh Dana BOS dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp80.951.345.000,00 yang diberikan kepada SD, SMP dan SMA/SMK Negeri. Anggaran BOS tersebut yang digunakan untuk operasional sekolah sebesar Rp75.256.191.233,00 dan untuk pembelian barang modal sebesar Rp. 5.463.001.267,00 yang nilainya menambah Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Rincian Dana BOS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 77. Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2014

NO	TINGKAT	DANA BOS (Rp)	BELANJA NON ASET (Rp)	BELANJA ASET (Rp)	SISA (Rp)
1	SD	47.513.570.000,00	45.317.086.766,00	2.117.893.234,00	78.590.000,00
2	SMP	19.952.775.000,00	19.288.626.658,00	624.085.842,00	40.062.500,00
3	SMAN/SMKN	13.485.000.000,00	10.650.477.809,00	2.721.022.191,00	113.500.000,00
JUMLAH		80.951.345.000,00	75.256.191.233,00	5.463.001.267,00	232.152.500,00

Belanja Aset sebesar Rp5.463.001.267,00 terdiri dari :

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.213.491.495,00;
- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.249.509.772,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Aset tersebut telah dimasukkan dalam laporan neraca tahun 2014, sedangkan Sisa Dana BOS senilai Rp232.152.500,00 merupakan kelebihan transfer sehingga telah di kembalikan ke Propinsi oleh lembaga.

4.7. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pemerintah Kabupaten Blitar setelah tanggal Neraca 31 Desember 2014 menghadapi permasalahan hukum berupa gugatan dari penyedia jasa terkait pemutusan kontrak Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Permasalahan diajukan oleh para penggugat yaitu PT AWRM selaku Penyedia Jasa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya pada tanggal 16 Januari 2015, dimana para penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan antara lain sebagai berikut.

- a. Menyatakan bahwa tindakan termohon (Pemerintah Kabupaten Blitar c.q. RSU Ngudi Waluyo Wlingi, cq. PPK Pekerjaan Perencana Pembangunan Gedung IBS RSUD Ngudi Waluyo Wlingi) melakukan pemutusan kontrak Nomor 027/998/409.206/2014 tanggal 2 September 2014 merupakan perbuatan melanggar hukum;
- b. Meminta termohon untuk tidak memasukkan PT AWRM dalam daftar hitam;
- c. Meminta termohon untuk tidak mencairkan jaminan pelaksanaan;
- d. Menghukum termohon untuk membayar kerugian materiil yang dialami PT AWRM sebesar Rp568.750.493,00;
- e. Menghukum termohon untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari atas ketermbatan memenuhi isi putusan perkara;
- a. Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara.

Terkait gugatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini sedang menjalani proses persidangan di BANI Surabaya.

4.8. Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Blitar pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan masih belum sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak.

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk evaluasi perbaikan Laporan Keuangan kedepan. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhloi upaya yang telah kami lakukan.

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO